

**HUBUNGAN PENDIDIKAN SEJARAH DAN LINGKUNGAN
KELUARGA DENGAN SIKAP NASIONALISME**

**(Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Sejarah FKIP UHAMKA)**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Pendidikan dalam Bidang
Ilmu Pengetahuan Sosial



Oleh :

RUDY GUNAWAN

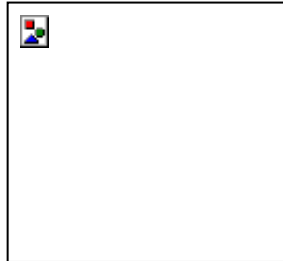
009833

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2008**

**HUBUNGAN PENDIDIKAN SEJARAH DAN LINGKUNGAN
KELUARGA DENGAN SIKAP NASIONALISME
(Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Sejarah FKIP UHAMKA)**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Pendidikan dalam Bidang
Ilmu Pengetahuan Sosial**



Promovendus

**RUDY GUNAWAN
NIM. 009833**

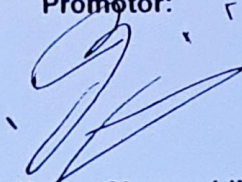
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2008**

**HUBUNGAN PENDIDIKAN SEJARAH DAN LINGKUNGAN KELUARGA
DENGAN SIKAP NASIONALISME**

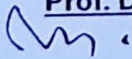
**(Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
UHAMKA)**

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH PANITIA DISERTASI

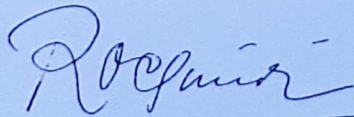
Promotor:



Prof. Dr. Helius Sjamsuddin, MA.

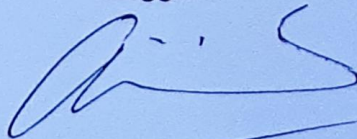


Ko-Promotor:



Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriadmadja, MA.

Anggota:



Prof. Drs. H. A. Kosasih Djahiri

Tim Penguji;

1. Prof. Dr. Helius Sjamsuddin, MA.
2. Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriadmadja, MA.
3. Prof. Drs. H. A. Kosasih Djahiri
4. Prof. Dr. H. Susanto Zuhdi, MA.
5. Dr. Hj. Enok Maryani, MS.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul ***HUBUNGAN PENDIDIKAN SEJARAH DAN LINGKUNGAN KELUARGA DENGAN SIKAP NASIONALISME (Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA)*** beserta seluruh isinya adalah benar-benar hasil saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan dengan etika dan aturan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 25 Juli 2008

Pembuat Pernyataan,

Rudy Gunawan

ABSTRAK

HUBUNGAN PENDIDIKAN SEJARAH DAN LINGKUNGAN KELUARGA DENGAN SIKAP NASIONALISME (Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin menurunnya sikap nasionalisme dikalangan mahasiswa. Pada saat ini nasionalisme seakan-akan tenggelam, kini nasionalisme menghadapi tantangan besar dari pusaran peradaban baru bernama globalisasi. Nasionalisme sebagai kemampuan dasar (*basic drive*) serta daya juang (*elan vital*) dari sebuah bangsa bernama Indonesia sedang diuji fleksibilitasnya dalam arti kemampuan untuk berubah sehingga selalu akurat dalam menjawab tantangan jaman. Fleksibilitas tidaklah mengurangi jiwa nasionalisme, justru sebaliknya menunjukkan begitu dalamnya nasionalisme mengakar sehingga dalam waktu bersamaan tetap hidup dan terus-menerus bermetamorfosis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara nyata tentang hubungan pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada mahasiswa program studi pendidikan sejarah FKIP UHAMKA Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif serta dianalisis juga dengan kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga mempunyai hubungandengan sikap nasionalisme. Hal ini menunjukkan besarnya peran pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga terhadap pembentukan sikap nasionalisme di kalangan mahasiswa.

Implikasi hasil penelitian mengisyaratkan bahwa sikap nasionalisme mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang apabila pendidikan sejarah yang diberikan kepada mahasiswa dapat menarik dan tidak membosankan. Peran penting dosen sebagai pemegang kebijakan dalam menentukan pembelajaran di kelas tidak dapat diabaikan, karena itu dosen mutlak memiliki wawasan yang luas dan mengetahui berbagai metode dalam pendidikan sejarah sehingga dapat meningkatkan aktifitas dan kreatifitas mahasiswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran sejarah.

Demikian juga dengan pendidikan di lingkungan keluarga memberikan kontribusi terhadap sikap nasionalisme mahasiswa. Orang tua yang memberikan pendidikan cinta tanah air dengan membawa mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan hari-hari besar nasional diwaktu kecil, akan membawa kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

ABSTRACT
THE CONTRIBUTION OF HISTORY EDUCATION AND FAMILY ENVIRONMENT TOWARDS THE ACQUIREMENT OF THE SPIRIT OF NATIONALISM AMONG THE YOUNG GENERATIONS (A CASE STUDY AMONG THE UHAMKA STUDENTS)

This research is focused on how the history students of UHAMKA attained their soul of nationalism. The assumptions are that the spirit of nationalism among the young generation is decreasing gradually caused by the social change of industrialization and globalization.

As the basic drive and elan vital of the Indonesian people, the 1945 soul of nationalism during the course of history had to face the challenges of national building, economic development, and political upheaval, and today also has to meet the wave of globalization. Actually, these challenges were trials or tests of endurance whether the spirit has the flexibility to adapt or adjust to the change. Although in the process, the shift looked like the national spiritual tendency inclined toward diminishing, nonetheless, the Indonesian people expected that the soul survived the metamorphosis and regain its vigour and vitality.

It is in the need to understand these changes that this study is conducted, using quantitative research method enriched by qualitative analysis, selecting the UHAMKA history student as the population and sample, with teaching history and family environment as variables. The finding showed that innovative teaching history has the potential to improve and contribute to the student's spirit of nationalism, while family environment contributes less than the former.

The result implication showed also that only lecturers who are omnivorous readers and have the professional skills in teaching history who could perform innovative history teaching, and consequently improve the students quality in the spirit of nationalism. Meanwhile, the family environment which was expected to mold the values of national spirit among their children through family activities and parent's modeling, in reality contribute less than the effort of formal education, because of social change which influenced family transitions such as the shift of woman activities from domestic to public sphere, and caused disruption in family communications.

Key words: teaching history, family environment, the spirit of nationalism.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Segala puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah Subhannahu Wata'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul ***Hubungan Pendidikan Sejarah dan Lingkungan Keluarga Dengan Sikap Nasionalisme (Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA)***. Penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar doktor Ilmu Pendidikan pada Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

Disertasi ini didasarkan pada penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan juga didukung dengan analisis kualitatif dalam pembahasan di bab empat. Disertasi ini dimulai dengan permasalahan dimana nasionalisme generasi muda khususnya para mahasiswa sebagai *agent of change* dalam masyarakat dipertanyakan. Unsur-unsur pengikat nasionalisme sudah luntur disebabkan perilaku pemimpin yang tidak mencerminkan keutuhan bangsa, dan kurang berorientasi ke arah bagaimana memakmurkan kehidupan masyarakat, seperti dengan merebaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah merupakan suatu sistem yang terikat oleh kepentingan kelompok, golongan atau ras tertentu, sehingga sulit pemerintah sebagai pengikat unsur nasionalisme untuk memberantasnya. Kedua, yaitu kesenjangan ekonomi antara

golongan kaya dan miskin yang semakin lebar, dimana etnik dominan yang menguasai ekonomi menjadikan kecemburuan yang tidak rasional. Akibatnya sulit hidup dalam perbedaan untuk menuju kesamaan, yang akhirnya nasionalisme bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa menjadi luntur. Ketiga, yaitu sistem otonomi daerah yang keliru ditafsirkan dan tergesa-gesa mengakibatkan tumbuhnya primordialisme yang tajam, kesukuan yang semakin kental dan anti ras lain untuk dapat domisili di daerah lain menunjukkan nasionalisme akan semakin lemah dan kemungkinan lenyap.

Pendidikan sejarah sebagai bagian dari pendidikan dan bagian dari ilmu sejarah memiliki potensi penting dalam memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan bangsa. Pendidikan nasional bangsa Indonesia yang sedang mengalami perubahan-perubahan menuju ke arah masyarakat Indonesia modern memerlukan persiapan dan pembinaan generasi muda, yang menjadi pendukung pada masa depan dan dalam hal ini adalah mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda. Dalam bidang ekonomi juga diharapkan kemandirian dalam pentas pergaulan ekonomi internasional. Nasionalisme dalam hal ini dimaksudkan dengan prinsip mendahulukan kepentingan bangsa, namun tidak berarti anti modal asing, anti utang luar negeri atau anti pergaulan ekonomi dunia (Baswir, 2006:35)

Bagi generasi muda, nasionalisme diuji oleh pola hidup konsumeris, hedonis, individualis, materialis, dan permisif yang telah menjadi gaya

hidup sebagian generasi muda Indonesia. Belum lagi jika nasionalisme dihadapkan secara diametral dengan kebebasan yang *kebablasan* (tidak terkendali) yang akan terus menguat sejalan dengan telah ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berpijak pada isu kebebasan dan keterbukaan.

Yang paling penting bagi dunia pendidikan bagaimana caranya mengatasi faktor-faktor penyebab agar jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa tidak luntur atau bahkan lenyap. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tumbuhnya sikap nasionalisme. Antara lain, faktor dosen serta faktor lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan spiritual. Dilihat dari tempatnya, dapat dibedakan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat dan luar kampus atau rumah. Yang tidak kalah penting adalah faktor mahasiswa itu sendiri, baik faktor dari dalam diri mahasiswa itu sendiri maupun faktor dari luar diri siswa.

Jika mencermati substansi lingkungan keluarga dahulu (pada umumnya) setiap orang tua mendidik kepada anak-anaknya sifat-sifat yang sarat mengandung nilai kepahlawanan. Sehingga menimbulkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya. Pada peringatan hari-hari besar nasional banyak anak-anak yang diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang tanpa mereka sadari pada awalnya tetapi pada akhirnya memunculkan kerinduan akan hari-hari nasional tersebut. Seperti memperingati hari kemerdekaan, hari pahlawan, hari Kartini, sumpah

pemuda dan lain-lain. Anak-anak dilibatkan berbagai lomba-lomba, tanpa ada paksaan dan mereka senang mengikuti upacara, gerak jalan, hias sepeda, karnaval dan lain-lain diharapkan menumbuhkan rasa nasionalisme.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan sejarah dengan dukungan lingkungan keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap nasionalisme. Hal ini sesuai dengan kajian teoretis bahwa sikap nasionalisme erat kaitannya dengan pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga.

Bandung, 25 Juli 2008

Rudy Gunawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim.

Syukur alhamdulillah berkat rahmat, hidayah, dan karunia Allah Subhannahu Wata'ala, disertasi yang berjudul ***Hubungan Pendidikan Sejarah dan Lingkungan Keluarga Dengan Sikap Nasionalisme (Penelitian Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA)*** dapat penulis selesaikan. Secara formal penulisan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat dalam menempuh ujian doktor pendidikan pada Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung.

Penulisan disertasi ini sulit dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, antara lain:

- (1) Bapak Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menempuh studi di Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana UPI.

- (2) Bapak Prof. Furqon, Ph.D., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana UPI beserta staf yang telah banyak memberikan bantuan yang bersifat moril maupun administratif-akademis selama penulis mengikuti studi.
- (3) Ibu Dr. Enok Maryani, M.S., selaku Ketua Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana UPI, yang telah memberikan fasilitas, kemudahan, dan motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
- (4) Bapak Prof. Dr. Helius Sjamsuddin, MA. selaku Promotor sekaligus orang tua , yang dalam kesibukannya telah memberikan kesempatan, bimbingan dan dorongan kepada penulis untuk terus menyelesaikan studi, serta ketelitian dan kecermatannya dalam memeriksa disertasi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau dan terus dapat mengamalkan ilmu kepada para mahasiswa yang sangat membutuhkan pikiran dan bimbingannya.
- (5) Ibu Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriadmadja, MA. selaku Ko-Promotor, yang dengan keramahan, kesabaran memberikan bimbingan dan arahan-arahan juga memahami kondisi psikologis penulis dan melihat juga dengan kaca mata orangtua memberi dorongan untuk segera menyelesaikan disertasi, yang sangat berguna bagi penulis. Meskipun dalam kondisi yang kadang kurang sehat beliau tetap bersemangat untuk memberikan bimbingan di kampus maupun di rumah tanpa mengenal hari libur. Semoga Allah selalu memberi

kesehatan dan umur yang panjang karena pemikiran-pemikiran kritis dan sistematis membuat banyak mahasiswa menjadi "*segan*"

- (6) Bapak Prof. Drs. H. A. Kosasih Djahiri, selaku anggota Promotor, yang dengan penuh kesabaran, kearifan, walau kadang dalam kondisi kurang sehat beliau tetap semangat dan mau memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan disertasi ini. Baik di laboratorium PKN maupun di Sekolah Pascasarjana serta di rumah beliau di Jl. Tamansiswa Bandung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada beliau sehingga tetap mencurahkan ilmunya kepada para mahasiswa.
- (7) Para dosen S.3 Program Studi Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana UPI, yaitu Prof. Dr. Achmad Sanusi, SH., MPA.; Prof. Drs. Numan Somantri, MSc.; Prof. Drs. H. A. Kosasih Djahiri; Prof. Dr. H. Endang Sumantri, M.Ed.; Prof. Dr. H. Abdul Aziz Wahab, MA.; Prof. Dr. Sudardja Adiwikarta, MA.; Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata; Prof. Dr. Hj. Mulyani Sumantri, Prof. Furqon, Ph.D., yang telah banyak memberikan wawasan dan limpahan ilmu, serta bimbingan kepada penulis. Semoga Allah Subhannahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal kepada mereka semua.
- (8) Bapak Prof. Dr. Qomari Anwar, MA, selaku mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dan Dr. Suyatno selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Drs. Ramli Sairin, MM selaku mantan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah

Prof.Dr. Hamka, dan *khususon* Dr. Wr. Hendra Saputra, M.Hum, selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka sebagai orang tua, kakak dan juga sekaligus atasan yang selalu mengingatkan dan selalu mendorong untuk segera menyelesaikan kuliah *"Rudy anda alumnus dan kader di UHAMKA, kita sulit untuk bergerak karena kurang SDM yang berasal dari kita sendiri, cepat selesaikan kuliah. Tinggalkan tugas-tugas di Uhamka, biar saya yang mengcover"* beserta staf yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis selama melanjutkan pendidikan program doktor di Sekolah Pascasarjana UPI.

- (9) Rekan-rekan sejawat yang sama-sama mengabdikan di Program Studi Pendidikan Sejarah/Jurusan PIPS FKIP Universitas Muhammadiyah Prof.Dr Hamka, Dra. Lelly Qodariah, M.Pd., Dra Suswandari, M.Pd., Drs. Kusmajid Abdullah, Drs. H. Syamsuddin Dasan, M.Ag., Drs. H. Susilo Wardoyo, M.Pd., Drs.H. Yusron Razak, MA., Dra Sri Giyanti, MM., Drs. Nur Busro, MM., Drs. H. Pono Fadlullah, M.Hum. Ir. H. Satari Suandana. yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa untuk keberhasilan studi kepada penulis.
- (10) Rekan-rekan seperjuangan, Dr. Sukadi, M.Pd.; Dr. Kusnadi, M.Pd.; Dr. Murni, M.Pd.; Drs. Darsono, M.Pd.; Drs.Riswan Jaenudin, M.Pd.; Drs. Maman Suratman, MSi.; Drs. Wawan Hermawan, M.Pd.; Drs.Faqih Samlawi, M.A.; Huriah Rachmah, M.Pd.

- (11) Kedua orang tua (*mamih dan apih*): Hj.Royani dan H.Tasminuddin, (Ibu-Bapak): Suparti dan Subroto, juga A Mumu, A Jamal, Ceu Yuyun serta adik-adik yaitu Nunung, Wiwi, Iyus, Dade yang telah memberikan dorongan dan bantuan moril , terutama doa bagi keberhasilan studi penulis.
- (12) Istriku tersayang Swastika Rini, S.Pd yang telah dengan sabar serta banyak melakukan pengorbanan dan dukungan yang tak terhingga, anakku tersayang Farhan Ariiq (3,5 Tahun), buah hati dan belahan jiwa yang kehadirannya sangat dinantikan selama tujuh tahun pernikahan.Yang sering papah '*tinggalkan*' dan selalu mengatakan "*papah lama banget di Bandung*", "*naik apa pah*", "*aku kangen pah*", "*hati-hati ya pah*" memberikan dorongan agar penulis secepatnya menyelesaikan studi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan disertasi ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Teriring do'a semoga segala amal perbuatan dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan pahala yang setimpal dari Allah Subhannahu Wata'ala. Dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada penulis untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Amin....Ya Robbal Alamin....

Bandung, 25 Juli 2008
Penulis,
Rudy Gunawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	20
C. PEMBATASAN MASALAH	20
D. KERANGKA PEMIKIRAN	21
E. VARIABEL OPERASIONAL DAN DEFINISI OPERASIONAL	24
F. TUJUAN PENELITIAN	27
G. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN	28
H. ASUMSI	28
I. HIPOTESIS	31
BAB II KAJIAN TEORETIK	32
A. KONSEP PENDIDIKAN	32
B. PENDIDIKAN SEJARAH	35
C. KELUARGA	57
1. Lingkungan Keluarga	58
2. Transisi dalam Keluarga	77
3. Peranan Keluarga sebagai Pendidik Awal Semangat Kebangsaan dan Patriotisme	90
D. SIKAP NASIONALISME DAN PEMUDA DALAM PERUBAHAN SOSIAL	92
1. Sikap Nasionalisme	92
2. Pemuda dalam Perubahan Sosial	125
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	148
A. TUJUAN OPERASIONAL PENELITIAN	148
B. METODE PENELITIAN	148
C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN	150

	D. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	151
	1. Populasi.....	151
	2. Sampel.....	151
	E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN.....	153
	1. Instrumen Pengukuran Pendidikan Sejarah	155
	2. Instrumen Pengukuran Lingkungan Keluarga	157
	3. Instrumen Pengukuran Sikap Nasionalisme Mahasiswa.....	159
	F. TEKNIK ANALISIS DATA.....	161
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	164
	A. DESKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA JAKARTA	164
	B. PENGUJIAN HIPOTESIS.....	166
	1. Hubungan Antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme.....	167
	2. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme.....	173
	C. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	179
	1. Hubungan Antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme	179
	2. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme	188
	D. KETERKAITAN PENDIDIKAN SEJARAH, LINGKUNGAN KELUARGA DAN SIKAP NASIONALISME	191
BAB V	KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI..	199
	KESIMPULAN.....	199
	IMPLIKASI.....	211
	REKOMENDASI.....	212
	DAFTAR PUSTAKA	214
	LAMPIRAN	226
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	276

DAFTAR GAMBAR

Halaman

No	Gambar	
1.1	Hubungan antara Pendidikan Sejarah dan Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme	23
1.2	Hubungan Antarvariabel	24
2.1	Teori Perkembangan Ekologi Bronfenbrenner	60
3.1	Konstelasi Hubungan antar Variabel Penelitian	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian berat menyangkut masa depan bangsa. Nasionalisme terancam retak oleh krisis-krisis yang menyeruak: krisis moneter, krisis moral, krisis sosial, krisis politik, krisis kebangsaan dan sebagainya. Krisis yang berkepanjangan tersebut antara lain disebabkan oleh berbagai masalah sosial kemasyarakatan seperti pertentangan politik, etnik, sosial budaya dan merebaknya sikap, perilaku permisif terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsung lama. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai profesionalisme, supremasi hukum dan etika universal bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks ini persoalannya adalah bagaimana kondisi buruk ini dapat dibenahi dan berkembang menjadi perikehidupan yang lebih baik melalui upaya mengakomodasi tuntutan dari perubahan masyarakat. (Suprastowo, 1998).

Nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas, atau semangat dan jiwa nasionalisme yang dikemukakan Ernest Renan dalam pidatonya di Sorbonne, Paris tahun 1882, telah berhasil membentuk sebuah komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. Semangat tersebut oleh para

pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang.

Kebijakan pendidikan nasional di awal abad XX telah menciptakan inti dari elite baru Indonesia yang terdiri dari para dokter, guru, dan pegawai sipil pemerintah. Bersamaan dengan itu, kebencian yang laten terhadap dominasi kolonial timbul di atas ambang kesadaran nasional. Berdirinya *Boedi Oetomo* (1908) menjadi tanda kebangkitan nasionalisme Indonesia yang kemudian diikuti organisasi-organisasi nasional lainnya. Jiwa nasionalisme kaum elite terdidik inilah yang menyebabkan gagasan komunitas`terbayangkan (*imagined community*), yakni terbentuknya negara-bangsa Indonesia yang merdeka (Anderson, 1983) di kalangan rakyat. Para elite politik ini jarang mendapat kesempatan bertemu tatap muka, namun idea atau gagasan tentang kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia mereka adalah sama, akibat kapitalisme modern dan teknologi cetak ke penjuru dunia (Anderson, 1983:xx) dari hari ke hari semakin meluas dan menguat di hati rakyat.

Di zaman Jepang, tekanan politik dan ekonomi semakin berat, hal ini justru memperkuat semangat nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pada kurun waktu 1945-1950, jiwa nasionalisme diperteguh oleh semangat mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan Indonesia yang dirongrong oleh perlawanan kedaerahan dari negara-negara boneka bentukan Belanda.

Organski membagi perkembangan nasionalisme menjadi empat tahap (Nasikun, 1996:3-4). *Pertama*, tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitif. *Kedua*, tahap perkembangan politik industrialisasi. *Ketiga*, tahap perkembangan politik kesejahteraan nasional; dan *Keempat*, tahap perkembangan politik kemakmuran. Realitas politik Indonesia pasca Orde Baru justru menunjukkan adanya pertanyaan kembali tentang identitas bersama yang kita bangun sebagai sebuah bangsa. Masalah integrasi nasional di Indonesia tampaknya belum selesai. Sepertinya tahapan nasionalisme Organsky dalam praktiknya di Indonesia kini mengalami siklus sehingga kembali pada tahap kesatuan nasional pertama.

Fukuyama (2001: 463) menjelaskan nasionalisme secara spesifik merupakan fenomena modern karena menggantikan hubungan antara penguasa dan budak dengan saling mengesampingkan antara pengakuan dan kesamaan derajat, tidak sepenuhnya rasional karena mengembangkan pengakuan hanya kepada para anggota dari suatu kelompok nasional atau etnik yang terbaru. Nasionalisme merupakan bentuk legitimasi yang lebih demokratis dan egalitarian, dibandingkan monarki berdasarkan keluarga. Dimana masyarakat bisa dianggap sebagai bagian dari warisan patrimonial.

Karena itu, gerakan nasionalisme tidak dengan serta-merta diasosiasikan dengan gerakan-gerakan demokratis semenjak terjadinya Revolusi Perancis. Namun, kaum nasionalis menuntut agar derajat yang

diakui bukanlah derajat kemanusiaan universal, tetapi derajat untuk kelompok mereka sendiri. Tuntutan pada jenis pengakuan ini secara potensial menuju pada konflik dengan kelompok-kelompok lain yang mencari pengakuan untuk derajat mereka sendiri secara partikular.

Nasionalisme Indonesia menurut Benedict Anderson (1999), memang sedang diuji dan dipertanyakan. Masyarakat yang dibayangkan (*Imagined Community*) mengenai negara bangsa, mengalami pengaburan karena berbagai krisis dan kesenjangan sosial kultural yang kontraproduktif. Di beberapa daerah tidak hanya dipertanyakan, lebih dari itu, ditolak, tidak dikehendaki. Di wilayah paling barat, Aceh-Sabang, ada *gerakan Aceh Merdeka*. Di wilayah paling timur, Irian-Merauke, ada *gerakan Papua Merdeka*. Di negeri Melayu yang kaya minyak (tetapi kini mulai antri minyak tanah) Riau, tidak hanya menuntut negara federal, melainkan juga menuntut merdeka melalui *Riau Merdeka*. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdengar berita, ada juga *Gerakan Deli* dan *Minang Merdeka* (Gonggong, 2002).

Krisis multi dimensi yang berkepanjangan tersebut memicu kerusuhan demi kerusuhan di berbagai daerah di tanah air ini. Berbagai tindak kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan dan ketertiban yang secara sah memiliki monopoli atas perangkat kekerasan, melainkan telah pula dilakukan oleh masyarakat kebanyakan sampai pada masyarakat pedesaan (Balitbang Depdikbud, 1999; 1). Dampak lanjutan krisis multi dimensi tersebut memunculkan pertanyaan besar menyangkut

masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia serta kebudayaannya. Pembangunan selama tiga dasawarsa terakhir ini ternyata berujung dengan kekerasan, intoleransi dan semangat membesar-besarkan perbedaan, kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang utuh dan masyarakat yang bersatu di masa mendatang patut dipertanyakan. Persatuan bangsa dan kesatuan masyarakat sedang dalam persoalan serius, kebutuhan dan pengembangan budaya Indonesia pada akhirnya akan menjadi problem besar.

Keretakan negara kesatuan akan makin nampak pada saat melihat rangkaian pertentangan yang saling membunuh (dengan latar agama dan etnik) seperti di Ambon-Maluku, Ternate, Poso-Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Keretakan terjadi justru ketika berada di alam kemerdekaan Indonesia yang berbentuk Republik Kesatuan.

Kini nasionalisme menghadapi tantangan besar dari pusaran peradaban baru bernama globalisasi. Nasionalisme sebagai *basic drive* (kemampuan dasar) serta *elan vital* (daya juang) dari sebuah bangsa bernama Indonesia sedang diuji fleksibilitasnya, dalam arti kemampuan untuk berubah sehingga selalu akurat dalam menjawab tantangan zaman. Fleksibilitas tidaklah mengurangi jiwa nasionalisme, justru sebaliknya, fleksibilitas menunjukkan begitu dalamnya nasionalisme mengakar

sehingga dalam waktu bersamaan dia tetap hidup dan terus-menerus bermetamorfosis.

Globalisasi, sudah menjadi idiom sehari-hari. Pengertian yang umum dari idiom itu ialah bahwa terjadi kecenderungan perubahan yang berlaku luas di dunia. Sebuah perubahan yang terjadi tidak lagi bersifat lokal, perubahan itu membawa dunia menjadi tanpa batas (*borderless world*). Giddens (1999:150) memaknai globalisasi sebagai konsep “keterjarakkan ruang dan waktu” (*virtual space and time*). Arus globalisasi tentu memberi dampak juga terhadap proses transformasi yang sedang terjadi, pada sebuah bangsa termasuk negara Indonesia.

Kasus Indonesia dalam persepsi global, unsur-unsur pengikat nasionalismenya sudah luntur disebabkan perilaku pemimpin yang tidak mencerminkan keutuhan bangsa, yaitu bagaimana memakmurkan kehidupan masyarakat, malah berperilaku yang justru menghancurkan nasionalisme. Korupsi, kolusi dan nepotisme sudah merupakan suatu sistem yang terikat oleh kepentingan kelompok, golongan atau ras tertentu, sehingga sulit pemerintah sebagai pengikat unsur nasionalisme untuk memberantasnya. Kedua, yaitu kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin yang semakin lebar, di mana etnik dominan yang menguasai ekonomi menjadikan kecemburuan yang tidak rasional. Akibatnya sulit hidup dalam perbedaan untuk menuju kesamaan, yang akhirnya runtuhlah nasionalisme bangsa sebagai suatu bangsa. Ketiga, yaitu sistem otonomi daerah yang keliru ditafsirkan dan tergesa-gesa

mengakibatkan tumbuhnya primordialisme yang tajam, kesukuan yang semakin kental dan anti ras lain untuk dapat domisili di daerah lain menunjukkan nasionalisme akan semakin lemah dan kemungkinan untuk lenyap.

Pada saat ini nasionalisme seakan-akan tenggelam, terutama di kalangan generasi muda Indonesia yang tidak lain adalah para mahasiswa yang sedang mencari jati diri. Mahasiswa terbawa arus budaya Barat agar dianggap telah maju. Pemikiran Barat yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi sesuatu yang diidam-idamkan. Mereka lebih menyukai hasil kebudayaan bangsa lain dibandingkan kebudayaan bangsa sendiri. Inilah antara lain beberapa gejala, di samping terlihat berkurangnya sikap nasionalisme di kalangan pelajar atau generasi muda.

Bagi generasi muda, nasionalisme diuji oleh pola hidup konsumeris, hedonis, individualis, materialis, dan permisif yang telah menjadi gaya hidup sebagian generasi muda Indonesia. Belum lagi jika nasionalisme dihadapkan secara diametral dengan kebebasan yang kebablasan (tidak terkendali) yang akan terus menguat sejalan dengan telah ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berpihak pada isu kebebasan dan keterbukaan.

Atas fenomena di atas, yang penting bagi suatu bangsa adalah kesetiaan/komitmen. Fukuyama (2001) menyebutnya kepercayaan (*the trust*). Kesetiaan dan kepercayaan sebagai unsur perekat eksistensi

bangsa yang punya rasa ikatan nasionalisme. Bangsa kita belum dapat menumbuhkan rasa saling percaya di semua tingkat dan lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Meskipun nasionalisme bagi bangsa Indonesia, masih sangat dibutuhkan, dan mungkin akan terus diperjuangkan selama perjalanan negara bangsa (*nation state*) ini ke depan, nyatanya bangsa kita hampir "kehilangan" nasionalisme.

Fukuyama (2001; 471) menjelaskan jika nasionalisme harus menghilang perlahan seperti kekuatan politik, maka nasionalisme itu pasti menjadi toleran. Kelompok-kelompok nasional dapat mempertahankan bahasa-bahasa, dan pelbagai rasa identitas mereka yang berbeda, tetapi identitas itu terutama akan diekspresikan dalam wilayah budaya ketimbang wilayah politik. Inilah barangkali yang menjadi tanda-tanda zaman bahwa nasionalisme itu akan menjadi usang (*obsolete*) dan tidak diperlukan lagi. Bila asumsi Fukuyama terbukti bahwa nasionalisme merupakan wilayah politik yang menjadi pengikatnya, sedangkan wilayah politik akan sirna dan digantikan dengan ekspresi budaya dari etnis dan daerah tertentu, maka hal itu merupakan tanda-tanda bahwa pada bangsa Indonesia sudah mulai tumbuh rasa kedaerahan dan kesukuan yang semakin kental sehingga dikhawatirkan akan muncul *chaos*. Secara sederhana fenomena *chaos* dapat digambarkan dengan metafora "*Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas* (Lorenz, 1993; 14).

Dalam masa pembangunan dewasa ini, salah satu fungsi pendidikan adalah mengembangkan kesadaran nasional sebagai daya mental dalam proses pembangunan nasional dan identitasnya. Struktur kepribadian nasional tersusun dari karakteristik perwatakan yang tumbuh dan melembaga dalam proses pengalaman sepanjang kehidupan bangsa. Dengan demikian kepribadian dan identitasnya bertumpu pada pengalaman kolektif, yaitu pada sejarahnya. Dalam konteks pembentukan identitas bangsa, maka pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang fundamental (Kartodirdjo, 1989).

Keampuan pendidikan sejarah pun dipertanyakan kontribusinya terhadap kekokohan integrasi bangsa. Hasan (1999) dalam tulisannya "Pendidikan Sejarah untuk Membangun Manusia Baru Indonesia" membuat perspektif baru dengan berpijak kepada pengalaman masa lalu untuk memahami apa yang terjadi pada masa sekarang. Tulisan itu tentu saja bukan didasari oleh sikap epigon "kepak sayap kupu-kupu yang menimbulkan angin taufan" yang ditamsilkan *chaos* di atas, melainkan didasarkan oleh tanggung jawab moral sebagai "intelektual" atau "akademisi" yang memberikan pencerahan. Istilah Edward Said (1998; 3), "intelektual adalah individu dengan dikarunia kemampuan untuk merepresentasikan, mengekspresikan dan mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap filosofi pendapatnya kepada publik", dalam hal ini khususnya tentang pendidikan sejarah yang memerlukan perubahan mendasar.

Sejarah merupakan wahana pendidikan yang tertua di Indonesia dibandingkan dengan disiplin lain dalam ilmu-ilmu sosial, baik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaan (Hasan, 1996; 9). Ia juga menjadi bahan pendidikan politis untuk keabsahan dan memperkokoh legitimasi pemerintah. Secara tradisional tujuan pendidikan selalu dikaitkan atas pandangan "*transmission of culture*" (Hasan, 1997; 13). Pandangan tersebut sebenarnya menghendaki pendidikan sejarah sebagai pengetahuan yang diharapkan menjadi wahana pendidikan untuk mencapai "*the glorious past*" dalam arti agar generasi muda dapat menghargai hasil karya agung di masa lampau terutama untuk memupuk rasa bangga (*dignity*) sebagai bangsa. Pandangan semacam ini dalam terminologi filsafat pendidikan disebut "*perennialisme*" (Supardan, 2004).

Perkembangan selanjutnya dalam pendidikan sejarah terjadi pergeseran dari perenialisme ke esensialisme bahkan rekontruksionisme sosial bergabung secara ekletik (Hasan, 1999; 9). Pendidikan sejarah tidak saja menjadi wahana memahami keagungan masa lampau dan pengembangan kemampuan intelektual ataupun *center for excellence*, tetapi juga menjadi wahana dalam upaya memperbaiki kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Meminjam istilah James Banks sering dikategorikan sebagai instrumentalis maupun eksperimentalis, sejarah juga memiliki "nilai praktis dan pragmatis" bagi siswa untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Brameld, 1955; 93).

Peneliti menyadari bahwa untuk menuju pendidikan sejarah yang demikian merupakan sebuah pendakian yang terjal, karena memerlukan pemecahan pemikiran yang luas dalam menuju perubahan pendidikan sejarah dari "monodisiplin" ke arah "inter/multidisiplin". Pernyataan di atas sesuai yang dikatakan Robinson (1965) dalam perubahan dari *The Old History* ke *The New History*, esensinya adalah perubahan dari sejarah tradisional/konvensional ke *social scientific history*. Hasan (1999; 9) yang mengidentifikasi implikasi adanya pergeseran filsafat pembelajaran sejarah dari perenialisme-esensialisme-rekonstruksionisme.

Pendidikan sejarah sebagai bagian dari pendidikan dan bagian dari ilmu sejarah memiliki potensi penting dalam memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan bangsa, pendidikan nasional bangsa Indonesia yang sedang mengalami perubahan-perubahan menuju ke arah masyarakat Indonesia modern memerlukan persiapan dan pembinaan generasi muda yang akan menjadi pendukung pada masa depan dan dalam hal ini adalah mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda. Bagi dunia pendidikan, bagaimana caranya mengatasi faktor-faktor penyebab agar jiwa nasionalisme di kalangan pelajar dan generasi muda tidak luntur atau bahkan lenyap. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tumbuhnya sikap nasionalisme. Antara lain, faktor guru serta, faktor lingkungan seperti lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan spiritual. Dilihat dari tempatnya, dapat dibedakan lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, dan luar sekolah atau rumah. Faktor yang penting

adalah siswa itu sendiri, baik faktor dari dalam diri siswa itu sendiri maupun faktor dari luar diri siswa.

Pendidikan memegang peranan penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, sifatnya mutlak baik dalam kehidupan seseorang, keluarga maupun bangsa dan negara, maju dan mundur suatu bangsa ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan bagi suatu bangsa merupakan suatu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan salah satu tujuan negara yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan cita-cita nasional itu digariskan pula dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UUSPN Tahun 2003 pasal 3).

Djahiri (1985 : 3) menjelaskan bahwa: "Pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung secara terus menerus dan kontinyu sepanjang hayat ke arah membina manusia atau anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya ". Kutipan di atas, memberikan gambaran bahwa tujuan pendidikan nasional sangat tinggi dan mulia. Untuk tercapainya tujuan tersebut bukan merupakan hal yang mudah, dan merupakan tanggung jawab bersama antara pihak keluarga,

sekolah, masyarakat, pemerintah dan yang tak kalah pentingnya adalah guru.

Peranan Guru menurut isi UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai pembentuk sikap disiplin dan meningkatkan prestasi belajar siswa ke arah terciptanya warga negara yang baik (*good citizenship*). Pembentukan prestasi belajar siswa tersebut dapat dilakukan melalui belajar. Belajar yang dimaksud yaitu mendewasakan diri dari perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Belajar dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan dan bagian dari hidup yang berlangsung sepanjang hayat. Kapan saja di mana saja baik di sekolah maupun luar sekolah. Namun suatu hal yang sudah pasti bahwa belajar yang dilakukan seseorang senantiasa dilandasi oleh maksud dan dorongan tertentu/prestasi.

Setiap aktivitas manusia pada dasarnya selalu didasari oleh suatu alasan atau prestasi sebagai dorongan tertentu, dorongan-dorongan itu mungkin bersumber dari lubuk hati individu itu sendiri yang disebut motif internal dan mungkin pula dorongan itu muncul dari luar individu yang disebut motif eksternal. Perhatikan perbuatan orang-orang di tengah masyarakat, maka dorongan yang menyebabkan seperti itu sulit diketahui kecuali diri masing-masing. Karena itu prestasi belajar yang ada pada diri manusia sifatnya abstrak. Dengan demikian belajar yang dimiliki seseorang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi kita bisa mengamati melalui tingkah laku yang diperlihatkan. Dari tingkah laku itulah

dapat diramalkan tujuan seseorang yang sebenarnya lewat segala aktivitas sehari-hari, sehingga terbentuk prestasi belajar yang diharapkan.

Prestasi siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor keluarga, seperti latar belakang sosial ekonomi orang tua, pendidikan orang tua, asal keluarga, perhatian orang tua, jarak antara rumah dengan sekolah. Keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan mahasiswa, karena keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan mahasiswa, tempat ia mulai belajar dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial. Sebagian besar dari kehidupan mahasiswa adalah di dalam keluarga. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Conny Semiawan (1984 : 62) bahwa “ orang tua dalam lingkungan belajar anak di rumah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak. Lingkungan belajar anak di rumah merupakan lingkungan pertama bagi anak “.

Keluarga adalah fundamen atau dasar bagi perkembangan mahasiswa selanjutnya. Maka tidak dapat disangkal lagi betapa pentingnya lingkungan keluarga bagi perkembangan mahasiswa menjadi manusia berkepribadian dan berguna bagi masyarakat. Pentingnya lingkungan keluarga banyak dikemukakan oleh para ahli. Comenius yang hidup dalam tahun 1592-1670 mengatakan bahwa tingkatan permulaan bagi pendidikan anak-anak dilakukan dalam lingkungan keluarga, yang disebutnya *Scola-Materna* (Sekolah Ibu) (Purwanto, 1988).

Dalam lingkungan keluarga orang tua mendidik anaknya dengan kata-kata, perbuatan yang baik yang dicontoh si anak. Pendidikan itu

berupa tanggung jawab atas beberapa hal tertentu. Misal menyimpan mainan pada tempatnya, mengatur tempat tidur, tanpa belajar bertanggung jawab dari kecil, kelak anak itu tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai-nilai nasionalisme yang perlu dipupuk dalam masa pembangunan sekarang ini.

Mencermati substansi lingkungan keluarga, kita dengan mudah menemukan setiap orang tua mengajarkan kepada anak-anak sifat yang sarat mengandung nilai kepahlawanan. Saat di kandungan, setiap saat calon bayi didoakan agar kelak menjadi anak yang saleh, yang berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Begitu lahir, anak dimuliakan dengan berbagai ritual religius kultural. Semua handai taulan dan tetangga hadir, dimohon ikut mendoakan segala yang terbaik untuk sang bayi. Setiap saat orang tua mengajar anak untuk senantiasa berbuat baik, misal suka menolong, membagi makanan kepada teman, bersikap ramah dan menjamu tamu dengan baik, memberikan kelonggaran jalan atau tempat duduk kepada yang lebih tua, memelihara tanaman dengan menyiram secara teratur, melarang memetik daun atau menebang ranting secara sembarangan, dan melarang menyakiti binatang. Anak-anak selalu diminta patuh dan mendengarkan nasihat orang yang lebih tua, patuh dan tekun menjalankan kewajiban agama, rajin belajar supaya pandai dan berhasil menjadi "orang".

Perspektif tentang keluarga mulai berubah seiring dengan perkembangan jaman. William J. Goode (2007) menggambarkan secara

cemerlang kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat perkotaan dan industri yang menggerogoti organisasi keluarga tradisional melalui pendekatan modernisasi. Dalam karyanya, *World Revolution and Family Pattern* (1963), Goode berhasil mengumpulkan secara lengkap dan sistematis data yang bersifat kesejarahan. Konsep kesejarahan atau bersifat kesejarahan dijelaskan oleh Goode sebagai berikut: "... by historical research, we do not mean merely references to historical events or reading history books but genuinely archival investigation and specifically the testing of sociological propositioning with historical data...". Dalam penelitian itu, Goode menolak pendapat yang memandang sistem keluarga sebagai terkait dalam hubungan sebab-akibat dengan berbagai fenomena sosial seperti industri dan perkembangan ekonomi.

Menurut Goode, perubahan ke arah industrialisasi dan perubahan keluarga merupakan proses paralel, keduanya dipengaruhi oleh perubahan sosial dan ideologi-ideologi perorangan (*personal ideologies*). Ada tiga ideologi yang merupakan sumber utama perubahan yaitu ideologi kemajuan ekonomi (*ideology of economic progress*), ideologi keluarga konjugal (*ideology of conjugal family*) dan ideologi persamaan derajat (*ideology of egalitarian*). Dari ketiga ideologi tersebut, keluarga konjugal merupakan yang paling radikal dan bersifat menghancurkan tradisi lama dalam hampir semua masyarakat dan merupakan tradisi pendorong timbulnya kelompok-kelompok radikal di setiap negara yang berkembang. Goode mengakui bahwa tipe keluarga konjugal adalah yang paling cocok

dengan perkembangan industri, dalam pengertian bahwa sistem keluarga konjugal paling menguntungkan perkembangan industri, namun sebaliknya tidaklah demikian. Industri bukanlah yang paling menguntungkan bagi sistem keluarga konjugal. Bahkan Goode menyebutkan bahwa putusya hubungan dalam sistem keluarga besar merupakan pengorbanan yang paling mahal yang diberikan oleh keluarga terhadap pertumbuhan industri, karena ini berarti putus hubungan-hubungan yang telah dibina turun-temurun dalam kehidupan keluarga tradisional. Oleh karena itu, bagi Goode, industrialisasi dianggap sebagai faktor paling kritis dalam proses perubahan kompleks yang sedang terjadi.

Sementara itu Berger *et al* (1982) telah meneliti proses modernisasi di Dunia Ketiga dan pengaruhnya terhadap jalan hidup tradisional, pola kekerabatan dan konstruksi sosial dari realitas serta menemukan telah mengalami perubahan. Di masyarakat industri, mereka menemukan proses perkembangan yang disebutkannya "*demodernization*" yang muncul dari bentuk gerakan "gerak balik-budaya" (*counterculture*). Berger *et al*, berargumen bahwa walaupun teknologi modern diterapkan, banyak orang di Dunia Ketiga yang menghadapi dengan keterampilan yang rendah tanpa menghayati ideologi kemodernan. Proyek-proyek pembangunan besar di Dunia Ketiga (misalnya pertambangan) dijadikan ilustrasi yang meyakinkan mengenai hal seperti itu. Proyek-proyek seperti itu memisahkan seseorang dari keluarga dan pola hidup tradisional serta

menempatkannya di dunia industri dan menjadikan hidup individu itu tanpa bentuk dan susunan yang jelas.

Tentu saja hal ini membawa perubahan-perubahan pada nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga. Nilai-nilai kebaikan dalam lingkungan keluarga, diharapkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan anak. Namun kenyataan tidak semua anak tumbuh sehat menjadi "orang". Oleh pengaruh lingkungan yang sangat kuat, anak tumbuh di luar kontrol orang tua, jauh dari yang diharapkan. Bahkan sebagian malah menjadi "momok" bagi keluarga dan lingkungan. Melawan orang tua, semau *gue*, sekolah *rak genah*, terlibat penyalahgunaan narkoba, bahkan kriminal. Pengaruh industrialisasi yang begitu besar berdampak pada pola asuh orang tua terhadap anak. Keasyikannya dengan kerja yang semula dimaksudkan sebagai kewajiban luhur memenuhi kebutuhan materiil keluarga menggeser nilai kebersamaan dengan keluarga menjadi nomor sekian. Itulah awal bencana, yakni ketika anak kemudian beralih dan menghabiskan waktu bersama "pengasuh alternatif" berupa berbagai fasilitas kehidupan modern: televisi, *play station*, telepon seluler, internet, *dugem* (dunia gemerlap) dan akhirnya narkoba.

Kegagalan pendidikan keluarga dalam penanaman dan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, menjadi penyokong utama kegagalan pembangunan karakter bangsa (*nation character building*). Maka tidak perlu heran, bila sebagian kalangan berpendapat, makin sulit menemukan keteladanan karena sebagian tokoh tidak berkarakter dan tidak patut

diteladani. Belakangan juga muncul wacana makin rendahnya nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa. Hasil sebuah jajak pendapat menyebutkan, kebanggaan kita sebagai orang Indonesia berkurang dari tahun ke tahun.

Fenomena itu sekaligus menunjukkan belum efektif upaya penanaman dan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, khususnya dalam keluarga. Dengan demikian ada produk generasi yang secara *fardhu kifayah* idealnya melahirkan (tokoh) keteladanan, tapi ternyata tidak mampu mengemban amanah tersebut. Oleh karena itu, kita dapat berpikir besar, tapi bertindaklah mulai dari yang kecil-kecil (*to think globally to act locally*). Kita harus kembali ke rumah, sebab *baitti jannati*, rumahku adalah istanaku. Di rumah itulah, kita berkuasa penuh untuk mengatur dan membantu anak-anak memahami, menyeleksi, dan menghindari pengaruh buruk lingkungan global. Di antara nilai-nilai untuk menguatkan reinternalisasi dibutuhkan nilai-nilai kebaikan hidup sebagai dasar tumbuhnya nilai-nilai kepahlawanan dan kebangsaan yang akan melekat selama hayat mereka.

Berangkat dari pemikiran di atas maka dipandang perlu diadakan penelitian tentang Hubungan Pendidikan Sejarah dan Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: **"Apakah ada hubungan antara pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme mahasiswa?"**

Berdasarkan rumusan masalah selanjutnya dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apakah ada hubungan yang berarti antara pendidikan sejarah dengan sikap nasionalisme ?
2. Apakah ada hubungan yang berarti antara lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme ?

C. PEMBATASAN MASALAH

Pengertian-pengertian mengenai sikap nasionalisme, pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga mencakup pengertian yang luas. Oleh sebab itu diperlukan pembatasan masalah yang meliputi tiga hal, yaitu:

1. Sikap nasionalisme terbentuk pada diri seseorang mulai dari kecil sampai dewasa baik lewat pendidikan formal maupun informal. Dalam penelitian ini sikap nasionalisme yang diteliti adalah sikap nasionalisme yang ada pada diri mahasiswa. Sikap nasionalisme yang diteliti meliputi bagaimana mahasiswa memelihara kelangsungan hidup

- bangsa, menjaga eksistensi bangsa dan cara mahasiswa mengembangkan potensi bangsa.
2. Aspek pendidikan sejarah meliputi metode pembelajaran, materi pembelajaran, penanaman semangat kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, semangat perjuangan, semangat kompetisi, menghargai perbedaan dan menghargai budaya, karya artistik bangsa Indonesia. Dari 45 mata kuliah yang diajarkan di Program Studi Pendidikan Sejarah UHamka, maka penelitian ini dibatasi pada mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah Sejarah Indonesia.
 3. Dalam lingkungan keluarga, aspek yang diteliti meliputi pola pembinaan keluarga, hubungan antara orang tua dan mahasiswa serta hubungan antar anggota keluarga.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Setelah mengetahui latar belakang dan tujuan penelitian ini, maka dapat ditarik suatu silogisme dari ketiga variabel tersebut. Sikap dapat berubah karena situasi dan kondisi dari pendidikan sejarah. Dengan pemahaman sejarah yang utuh sikap nasionalisme mahasiswa tinggi karena dapat mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Juga mahasiswa yang berasal dari lingkungan keluarga yang mempunyai pola pembinaan, hubungan anak-orang tua dan hubungan antar anggota keluarga yang baik akan mempunyai sikap nasionalisme yang positif.

Mereka yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang baik tidak mendukung pembentukan sikap nasionalisme.

Perubahan pemikiran diungkapkan oleh Kuhn (1989) yang disebut dengan paradigma. Pergantian suatu paradigma yang tidak lagi mampu menerangkan fakta-fakta (persoalan-persoalan) baru yang hanya dapat dijelaskan melalui sebuah paradigma baru tidak hanya menjelaskan fakta-fakta tersebut melalui cara yang lebih memuaskan. Untuk dapat diterima sebuah paradigma, sebuah teori harus lebih baik dari teori yang berbicara tentang persoalan yang sama, tetapi ia tidak perlu dan dalam kenyataannya, tidak pernah menerangkan seluruh fakta, yang dengannya ia dapat dipertentangkan. Kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut:

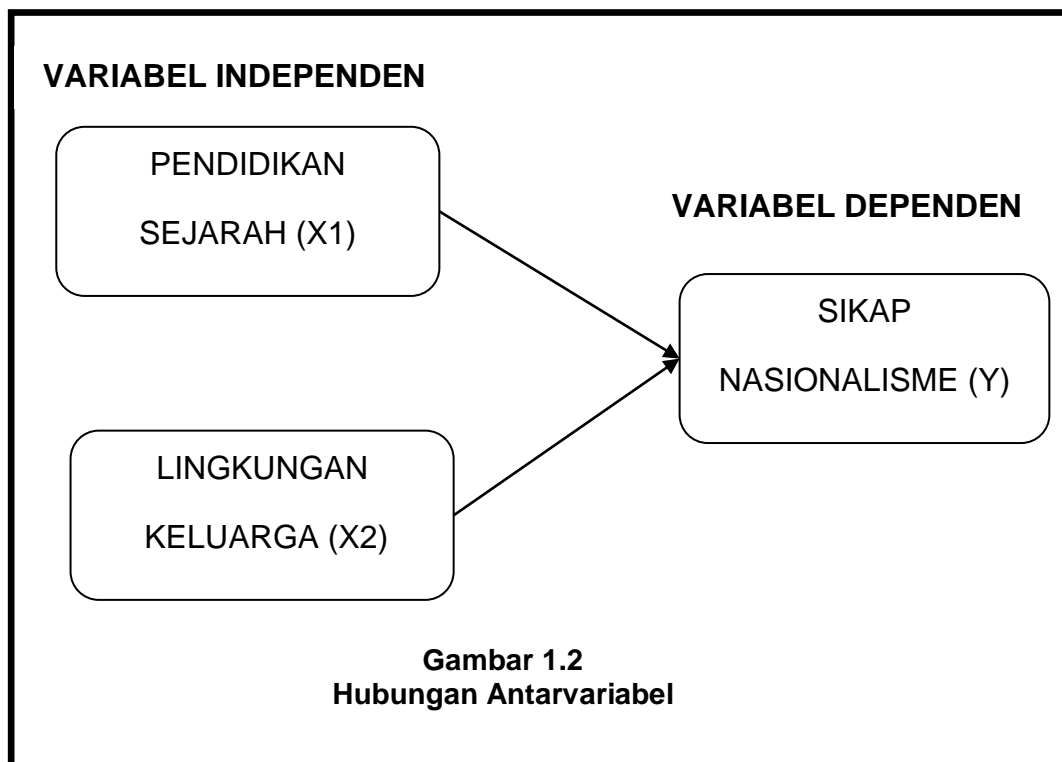


Gambar 1.1
Hubungan antara Pendidikan Sejarah dan Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme

E. VARIABEL OPERASIONAL DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Variabel Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, pertanyaan penelitian dan kerangka pemikiran, pola hubungan antarvariabel penelitian antara variabel independen pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme, dideskripsikan sebagai berikut:



Perincian sub variabel dan indikator-indikator penelitian untuk variabel-variabel di atas dijelaskan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.1.
Variabel dan Indikator Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	
X1 (Pendidikan Sejarah)	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan materi pendidikan sejarah oleh mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dalam mengakui tujuan dan guna sejarah
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran pendidikan sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Keaktifan dalam mengembangkan tujuan dan guna sejarah
	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian mahasiswa terhadap materi pendidikan sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecakapan dalam menghargai tujuan dan guna sejarah
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian materi pendidikan sejarah oleh mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dalam menyeimbangkan nilai-nilai pada tujuan dan guna sejarah
	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik perilaku mahasiswa setelah menerima pendidikan sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dalam bertingkah laku seperti yang ada dalam tujuan dan guna sejarah
X2 (Lingkungan Keluarga)	<ul style="list-style-type: none"> • Pola Pembinaan Keluarga Mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan orang tua yang demokratis • Pembinaan orang tua yang otoriter • Pembinaan orang tua yang permisif
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan orang tua dan mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan orang tua dan mahasiswa yang harmonis • Hubungan yang saling menghargai • Hubungan yang bertanggung jawab
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan antar anggota keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai sesama anggota keluarga • Hubungan yang tidak membedakan antar anggota keluarga • Memberi kepercayaan kepada sesama anggota keluarga

<p>Y (Sikap Nasionalisme)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara Kelangsungan Hidup Bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Memelihara keutuhan dan kedaulatan wilayah nasional Indonesia • Mendasarkan setiap tindakan pada Pancasila dan UUD 1945 • Memelihara kekayaan dan hasil-hasil pembangunan nasional
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Potensi Bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggali, menghimpun, mengidentifikasi dan mewariskan budaya bangsa • Berusaha mengarahkan perubahan sosial sesuai dengan moralitas Pancasila • Mengadakan kontak budaya dan menghilangkan segala bentuk dominasi kelompok tertentu
	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah hal-hal yang membahayakan Eksistensi Bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpikiran dan berperasaan fanatisme sempit • Mencegah kesenjangan pembangunan serta peningkatan kesadaran nasional • Menentang segala bentuk pengekangan dalam proses demokratisasi dan desentralisasi

2. Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian memiliki kejelasan agar tidak mengundang tafsir yang berbeda karena setiap terminologi memiliki makna yang berbeda dalam konteks dan lapangan studi yang berbeda. Untuk itu dirumuskan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut.

Variabel bebas X1 merupakan konsep pendidikan sejarah yang didefinisikan sebagai pengorganisasian proses belajar dalam upaya pemerolehan pengetahuan dan pembentukan sikap yang dapat diwujudkan dalam kepribadian dan tingkah laku peserta belajar (mahasiswa) dalam menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai sesuatu yang berguna bagi kehidupannya setelah memperoleh materi Sejarah Indonesia.

Variabel X2 merupakan konsep lingkungan keluarga yang meliputi pola pembinaan keluarga mahasiswa, hubungan orang tua dan mahasiswa serta hubungan antaranggota keluarga yang diterima oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sejak lahir sampai menyelesaikan studi.

Variabel Y adalah sikap nasionalisme yaitu kecenderungan bertindak dari mahasiswa terhadap tanah air yang diwujudkan dalam bentuk rela berkorban, tolong menolong, bertanggung jawab, toleransi, munculnya *sense of belonging* dan *sense of solidarity*.

F. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara nyata tentang hubungan antara pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

G. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dapat lebih meningkatkan upaya penanaman sikap nasionalisme pada diri mahasiswa melalui pendidikan sejarah dan lingkungan keluarga, baik dalam proses belajar mengajar di lembaga maupun membangun diri dalam masyarakat.
2. Dapat mengetahui tinggi rendahnya tingkat sumbangan pendidikan sejarah, lingkungan keluarga dalam pembentukan sikap nasionalisme. Dengan demikian dapat diketahui sample mahasiswa mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembinaan dan pengembangan sikap nasionalisme.
3. Merupakan sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga pendidikan agar lebih meningkatkan kondisi dan lingkungan belajar mahasiswa, sehingga mampu memberikan suasana tumbuh dan berkembangnya penghayatan sikap nasionalisme.

H. ASUMSI

Berdasarkan kajian teoretis ketiga variabel dan penarikan silogisme di atas, terdapat hubungan yang perlu ditempatkan secara logis sebagai dasar penyusunan hipotesis. Dalam hal ini adalah Pendidikan sejarah dan Lingkungan keluarga terhadap Sikap Nasionalisme. Berikut akan dibahas bagaimana kaitan dari masing-masing variabel.

1. Hubungan Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme

Salah satu fungsi pendidikan sejarah adalah menyampaikan pengetahuan mengenai masa lampau kepada para mahasiswa. Pendidikan seperti ini biasanya hanya menyampaikan fakta sejarah belaka kepada mahasiswa dan hanya pada domain kognitif tingkat rendah. Hal ini menimbulkan kebosanan pada diri mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak mampu menghayati hakikat dari belajar sejarah.

Pendidikan sejarah di lembaga formal (Universitas) memberi sumbangan yang besar terhadap sikap nasionalisme mahasiswa. Tentunya seorang dosen dalam memberikan atau menanamkan sikap nasionalisme akan tidak sama antara satu dengan yang lain. Namun karena minat mahasiswa terhadap pelajaran sejarah, ada yang tinggi dan ada yang rendah, maka sikap nasionalisme mahasiswa pun akan tidak sama.

Sikap nasionalisme yang termuat dalam pendidikan sejarah, pada hakikatnya menyangkut masalah kesatuan, kemerdekaan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Sikap nasionalisme tidak dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu setiap jaman di mana pun akan dijumpai sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme hanya akan tercermin manakala bergulat dengan waktu, kehidupan, tantangan serta kadar pengaruhnya pada setiap individu. Dengan demikian sikap nasionalisme relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa pada masa sekarang ini, walaupun hal

itu masih menuntut adanya suatu proses penanaman nilai nasionalisme pada mahasiswa.

Dalam kaitannya dengan penanaman sikap nasionalisme, maka pendidikan sejarah merupakan suatu sarana yang efektif untuk menanamkan sikap nasionalisme kepada mahasiswa di lembaga pendidikan formal. Apabila pendidikan sejarah tersebut menarik dan mampu membentuk suatu sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi serta menghayati nasionalisme dalam kehidupan sehari-harinya, maka sikap nasionalisme mahasiswa juga akan tinggi.

2. Hubungan Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme

Pembentukan sikap nasionalisme tidak terlepas dari lingkungan keluarga. Hal ini disebabkan karena dalam perjalanan hidup seseorang yang pertama kali adalah penyesuaian terhadap pola dan standar yang secara tradisional disajikan di dalam lingkungan keluarga mewarnai sikap setiap anggota masyarakatnya, karena keluarga memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakatnya. Oleh karena dalam lingkungan masyarakat yang masih mendukung sikap nasionalisme yang kuat, akan menanamkan sikap tersebut kepada diri mahasiswa sesuai dengan sikap keluarganya. Dalam hal ini tidak terkecuali dalam semua lingkungan keluarga, baik lingkungan keluarga demokratis, lingkungan keluarga otoriter, dan lingkungan keluarga bebas.

I. HIPOTESIS

Bertolak dari kajian teoretik dan kerangka berpikir dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme.
2. Terdapat hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. KONSEP PENDIDIKAN

Bidang pendidikan termasuk rumpun ilmu perilaku, suatu rumpun ilmu yang mengkaji aktivitas manusia (Sukmadinata, 2007:24). Lingkup kajian aktivitas manusia sangatlah luas, mencakup aktivitas manusia sebagai individu atau kelompok, sebagai kesatuan etnis, bangsa atau ras, dalam lingkup geografis, administratif atau sosial-budaya, dalam satuan organisasi, institusi, pemerintahan, berkenaan dengan kegiatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, keamanan, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan manusia tersebut menjadi kajian bermacam-macam bidang ilmu dan profesi seperti: psikologi, sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, politik, dan manajemen.

Pendidikan bagi sebagian orang seringkali dicerna sebagai suatu kegiatan pengisian otak dengan pengetahuan-pengetahuan tertentu (Baharuddin & Makin, 2007:105). Pengetahuan tertentu tersebut diyakini akan menghasilkan keterampilan-keterampilan tertentu pula. Seseorang dikatakan berpendidikan apabila dia memiliki potensi kognitif yang dikontrol oleh institusi-institusi yang menyelenggarakannya. Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memerlukan penanganan yang sangat serius dari

pemerintah. Melalui tujuan pendidikan nasional, pemerintah berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1).

Konsep pendidikan tersebut mengandung beberapa pandangan yang sangat mendasar mengenai (Baharuddin & Makin, 2007) :

1. pengakuan terhadap potensi individu
2. keyakinan bahwa potensi itu dapat dikembangkan melalui usaha sadar dan terencana
3. keyakinan bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran merupakan wahana untuk mengembangkan potensi itu
4. harapan bahwa pengembangan potensi itu dapat mewujudkan dalam bentuk berbagai kualitas personal individu yang bermanfaat dalam kehidupan. Keseluruhan proses pendidikan itu dibingkai oleh dan bermuara pada tujuan pendidikan nasional.

Tujuan di atas harus dijadikan acuan oleh penyelenggara pendidikan termasuk guru di dunia persekolahan itu mau dan mampu memberikan kontribusi optimal dan langgeng tentu saja kontribusi yang diberikan harus dalam koridor perwujudan visi dan misi pendidikan untuk menghasilkan pendidik yang kompeten, berkarakter, profesional dan

bukan pendidik yang hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang berijazah saja, akan tetapi sumberdaya manusia yang berijazah, dan berkemampuan, secara nyata, dan berahlak mulia, serta berbudi pekerti luhur ,taat kepada orang tua, dan guru.

Gejala dan upaya pendidikan timbul sebagai perilaku dan upaya manusia, di atas perilaku individual-sosial memenuhi kebutuhan dasar-primer (*survival*) bertahan hidup, sebagai bagian kegiatan untuk meningkatkan kehidupan agar lebih bermakna/bernilai. Kegiatan dan gejala pendidikan timbul khususnya ketika sekumpulan individu ingin memenuhi kebutuhan makna (*meaning*) yang lebih tinggi/abstrak seperti pengetahuan, nilai keadilan, kemakmuran dan ketrampilan agar terbebas dari kondisi berkekurangan seperti kemiskinan, penyakit atau kurangnya pengertian dalam interaksi dan untuk berinteraksi dengan alam sekitar. Sebagian orang yang kurang mengerti, barangkali dapat merasa cukup apabila sebagai individu melengkapi dirinya dengan pengetahuan dari hasil belajar atau mendidik diri sendiri. Tetapi keperluan kelompok akan pengetahuan hanya mungkin terpenuhi apabila sekumpulan manusia saling belajar dan mengajar, dalam relasi kebersamaan saling menghargai dalam kelompok kecil seperti dalam keluarga dan persahabatan, tempat munculnya gejala mempengaruhi kemampuan, perilaku dari individu lain di lingkungan terbatas dan tatap muka secara mikro. Menurut ilmu pedagogik, pendidikan pada lingkup tatap muka (bentuk mikro) relatif terjamin mutunya atas dasar kualitas individu

belajar, bahkan pihak pendidik harus berkebiasaan mengoreksi dan mendidik dirinya (Langeveld: 1944,1974)

B. PENDIDIKAN SEJARAH

Pengertian sejarah mengandung suatu konsep, yaitu: sejarah sebagai suatu ilmu dan seni (Kuntowijoyo, 1999: 59). Sejarah sebagai peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas manusia sudah tidak dapat diamati dan diaktualisasikan kembali, karena memang sejarah bersifat *heimahlig*, tetapi peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas tersebut tercatat dan tersimpan dalam sejarah sebagai kisah atau ilmu, yakni kisah atau ilmu mengenai peristiwa-peristiwa atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Sejarah dalam pengertian sebagai kisah atau ilmu pada masa lalu dapat diungkap dan diaktualisasikan kembali untuk kepentingan-kepentingan ilmu pendidikan pada masa kini. Pada hakekatnya sejarah sebagai kisah atau memori memberi pengalaman manusia, merekam peristiwa atau aktivitas-aktivitas manusia dalam memperjuangkan sikap dan nilai yang dijunjung tinggi.

Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Melayu “sejarah” yang mengambil dari bahasa Arab “syajarah” yang berarti pohon, keturunan, dan asal usul. Pengertian semacam itu sama dengan pengertian silsilah atau riwayat (Widja, 1988; 8). Sedangkan Moh. Ali (1983; 8) menjelaskan sejarah adalah :

1. kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, benda dan secara singkat yang menyangkut perubahan nyata di dalam kehidupan manusia
2. cerita yang tersusun secara sistematis, rapi dan teratur
3. ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa sejarah pada hakekatnya adalah suatu peristiwa, suatu kisah, dan suatu ilmu yang berguna bagi hidup manusia.

Melalui pendidikan sejarah diharapkan akan timbul kesadaran sejarah yang dapat membantu peserta didik mengenal identitas dirinya dalam kaitan hidup bersama dalam komunitas yang lebih besar, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif (*collective memory*) dalam memiliki kebersamaan dalam sejarah, kebersamaan dalam memiliki riwayat masa lampau. Proses pengenalan diri yang meningkat menjadi kesadaran kolektif ini merupakan titik awal timbulnya rasa harga diri, rasa bangga (*sense of pride*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan tanah air (Wiriaatmadja, 1992; 67)

Mempelajari sejarah bukan sekedar menghafal nama tokoh-tokoh, rentetan angka tahun, peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi dimaksudkan agar anak didik mengerti betul-betul apa yang dipelajari. Selanjutnya untuk dijadikan cermin bagi tindakan di masa sekarang, karena dengan bercermin pada masa lampau tentang keadaan sekarang, diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Pengalaman-pengalaman dalam sejarah bukan hanya diketahui saja, tetapi dapat dipakai sebagai pelajaran untuk memperbaiki usaha-usaha pada masa mendatang (Barnadib, 1973: 45).

Sartono Kartodirdjo (1999b: 31) menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan nasional, amat dibutuhkan kesadaran untuk membangkitkan warga negara yang penuh dedikasi terhadap bangsa dan negara. Agar pelajaran sejarah mempunyai dampak afektif yang tinggi kiranya cukup relevan dengan mempelajari biografi orang-orang besar yang secara konkret menggambarkan *role-model* tentang semangat pengabdian hidupnya yang sering berakhir dengan pengorbanan jiwa.

Sejarah merupakan memori pengalaman manusia, karena melalui sejarah pengalaman-pengalaman manusia dapat dilukiskan kembali. Mengingat berarti berusaha untuk mengetahui lagi pengalaman-pengalaman masa lampau. Sebab itu mempelajari sejarah dapat menentukan kadar atau harkat kemanusiaan. Tanpa memahami sejarah tidak akan memiliki pengetahuan mengenai perilaku manusia, karena melalui dan dari belajar sejarah akhirnya masyarakat dapat menyadari dan mengetahui bahwa harkat, martabat, dan identitas sebagai manusia dibentuk dan disempurnakan melalui dan oleh sejarah, manusia memanfaatkan dirinya melalui sejarah.

Pengetahuan masalah pendidikan sejarah tidak dapat dilepaskan dari masalah pengajaran dan masalah sejarah. Secara kebahasaan

pengajaran berarti proses, perbuatan dan cara mengajar. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* 1990, segala sesuatu mengenai mengajar dinamakan pengajaran. Menurut Mursell (1975; 1) Pengajaran merupakan pengorganisasian proses belajar, Pengajaran merupakan system dari berbagai komponen yang terorganisir dan mempunyai tujuan yang jelas.

Pendidikan sejarah mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan sejarah sebagai bagian dari pendidikan nasional dituntut harus mampu menumbuhkan jiwa patriotik dan sikap nasionalisme. Pendidikan sejarah yang sesuai akan membentuk sikap mahasiswa yang positif dengan tujuan pendidikan sejarah.

Melalui pendidikan sejarah para mahasiswa memperoleh pengetahuan yang bermakna tentang perjalanan dan perjuangan bangsanya di masa lampau. Di samping menuntut kedewasaan belajar sejarah juga membantu mengembangkan kedewasaan. Individu menjadi dewasa karena belajar sehingga pengetahuan, sikap dan ketrampilannya berkembang. Karena membantu kedewasaan subjek didik maka pendidikan sejarah tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang kesejarahan (kognitif) melainkan juga mengenalkan pengalaman-pengalaman hidup manusia, perjalanan, dan perjuangan bangsanya pada masa lampau (afektif) yang berguna bagi masa kini.

Menurut Hill (1956; 9-10) pendidikan sejarah dapat:

1. membuka pintu kebijaksanaan, kesabaran, dan daya kritik yang dalam
2. memuaskan rasa ingin tahu pada orang lain, tokoh-tokoh, perbuatan dan cita-citanya
3. mengembangkan warisan kebudayaan
4. melatih seseorang untuk berusaha memecahkan permasalahan yang dipertentangkan dengan semangat menyelidiki kebenaran. Berdasarkan fungsinya, seandainya sejarah dikomunikasikan dan dihayati secara mendalam maka sejarah akan mempunyai andil yang besar dalam pembentukan kepribadian bangsa.

Penghayatan sejarah secara mendalam akan mempercepat pembentukan kepribadian bangsa. Setelah mendapatkan pendidikan sejarah sikap mahasiswa diharapkan positif terhadap nasionalisme. Karena pendidikan sejarah merupakan pendidikan nilai yang memanfaatkan peristiwa sejarah maka sikap mahasiswa akan selalu berhubungan dengan nasionalisme.

Pengungkapan peristiwa sejarah di dalam kelas menuntut ketrampilan dosen dalam menyampaikannya. Peristiwa sejarah tersebut harus mampu digambarkan oleh dosen secara jelas kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mempunyai gambarannya dengan jelas. Pembelajarannya diselenggarakan dengan baik agar dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku mahasiswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan sejarah.

Mahasiswa dalam pendidikan sejarah mendapat informasi kesejarahan dari dosen, informasi yang diterima mahasiswa berhubungan dengan ciri peristiwa sejarah yaitu : *what, when, who, where, why, dan how*. Mahasiswa dibawa oleh dosen pada suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, karena itu dituntut imajinasi. Gambaran peristiwa sejarah yang diterima dapat difahami, dihayati, dan diamalkan.

Permasalahan yang timbul berhubungan dengan ketrampilan-ketrampilan penyampaian peristiwa sejarah kepada mahasiswa, dosen seringkali mengalami kesukaran memberikan gambaran tentang masa lampau pada mahasiswa, sehingga pendidikan sejarah menjadi kurang menarik bagi mahasiswa dan membosankan.

Permasalahan yang lain berhubungan dengan penerimaan mahasiswa terhadap informasi kesejarahan, ini menuntut perhatian mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menggambarkan dengan benar dan jelas suatu peristiwa sejarah yang disampaikan oleh dosen.

Pendidikan sejarah agar menarik dan menyenangkan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain dengan mengajak mahasiswa pada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada saat ini. Di lingkungan belajar terdapat berbagai peristiwa sejarah yang dapat membantu dosen untuk membantu pemahaman mahasiswa tentang masa lalu. Demikian juga mahasiswa akan lebih tertarik terhadap pendidikan sejarah karena berhubungan dengan situasi nyata di

sekitarnya (isu-isu kontroversial), selain itu mahasiswa dapat menggambarkan suatu peristiwa masa lalu seperti dalam perkuliahan sejarah.

Kondisi nyata di sekitar mahasiswa dapat digunakan oleh dosen sebagai cara untuk menggambarkan suatu peristiwa sejarah. Seperti diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia mengalami perjalanan waktu dan perubahan dari sejak jaman pra-sejarah hingga jaman sekarang. Banyak daerah menyimpan berbagai peninggalan sejarah sebagai bukti otentik terjadinya peristiwa sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah di setiap daerah di Indonesia mempunyai benang merah; dalam artian saling berkaitan sehingga dalam konteks holistik akan membentuk substansi sejarah yang saling melengkapi, yang akan membawa mahasiswa pada lingkup yang lebih luas, misalnya kepada pemahaman sejarah yang maksimal.

Peristiwa sejarah di sekitar mahasiswa diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami bentuk-bentuk peristiwa masa lalu dan terjadinya suatu peristiwa masa lalu, selain itu mahasiswa mampu menggambarkan suatu peristiwa sejarah. Penggunaan peristiwa sejarah di sekitar mahasiswa dapat juga digunakan sebagai contoh untuk menerangkan suatu konsep-konsep kesejarahan, misalnya konsep tentang kepahlawanan, penjajahan, perjuangan, perlawanan, kolonialisme. Penggunaan peristiwa sejarah dari lingkup sekitar mahasiswa atau lokal bergerak ke lingkup daerah lain dan nasional

bahkan internasional dikenal dengan proses induktif. Saat ini masih terbuka ruang-ruang yang perlu dikemukakan untuk melengkapi sejarah nasional Indonesia. Sejarah Indonesia masih lebih banyak membahas bagian barat saja, malahan didominasi sejarah tentang Jawa (Wahid, 2007).

Pendidikan sejarah tidak hanya diarahkan untuk menanamkan pemahaman masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan tentang adanya perkembangan masyarakat kebangsaan dan cinta tanah air serta bangga sebagai bangsa Indonesia dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia; tetapi ditekankan pula pada berbagai kegiatan yang dapat memberikan pengalaman yang dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan kecintaan pada manusia secara universal. Dengan demikian terdapat perubahan cara berpikir, bernalar, kematangan emosional dan sosial, serta meningkatkan kepekaan perasaan dan kemampuan mereka untuk memahami dan menghargai perbedaan.

Ditegaskan oleh Wiriaatmadja (1998: 93) pendidikan sejarah di sekolah merupakan salah satu wahana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, terutama sebagai upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan peserta didik. Pengetahuan dan pengalaman peserta didik tentang sejarah diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan dan kearifan untuk menghadapi kehidupan masa kini. Kesadaran akan

kebangsaan akan memberikan kepribadian yang tegar karena pengenalan jati diri, dan menumbuhkan kemauan dan kesediaan untuk bekerja keras bagi diri dan bangsanya.

Fungsi dari pendidikan sejarah dikemukakan oleh Kartodirdjo (1982: 43) untuk membangkitkan minat kepada sejarah tanah airnya, untuk mendapatkan inspirasi dari sejarah baik dari kisah-kisah kepahlawanan maupun peristiwa-peristiwa tragedi nasional, memberi pola berpikir secara rasional-kritis-empiris, mengembangkan sikap mau menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Ditambahkan oleh Kartodirdjo (1989) bahwa pendidikan sejarah di perguruan tinggi selain melatih mahasiswa untuk berpikir kritis yang lebih penting mempunyai fungsi pragmatis, yaitu berfungsi dalam pembentukan identitas dan eksistensi bangsa. Dengan demikian selain pengetahuan kesejarahan (kognitif), dalam pembelajaran sejarah terkandung pendidikan nilai yang berguna membentuk kesadaran sejarah dan sikap. Sehingga dalam pendidikan sejarah juga bermuatan nilai-nilai, yaitu : nilai nasionalisme, kepahlawanan, persatuan dan kesatuan, pantang-menyerah, ulet, bertanggung jawab, kebajikan, religius, keluhuran, dan sebagainya. Pendidikan sejarah diharapkan dapat mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, sehingga mahasiswa mempunyai kesadaran sejarah dan kepribadian bangsa.

Menurut Suryo (1991) pendidikan sejarah termasuk sebagai sejarah normatif, karena substansi, tujuan, dan sarana lebih ditujukan pada segi-segi normatif; yaitu segi nilai dan makna yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Imam Farizi (2003:208) mengatakan pendidikan sejarah mempunyai perspektif masa depan (*present mindedness*) perlu dimulai dengan mengubah konstruk berpikir dan bahkan paradigma lama dari wahana untuk mengenang masa lampau menjadi wahana sistemik untuk membangun masa depan, dengan menempatkan “kesadaran sejarah” sebagai esensi pendidikan sejarah menjadi pembebasan.

Hill (1956: 10) mengajukan beberapa kegunaan dari pendidikan sejarah bagi anak:

1. Secara unik memuaskan rasa ingin tahu dari anak tentang orang lain, kehidupan, tokoh-tokoh, perbuatan dan cita-citanya, yang dapat menimbulkan gairah dan kekaguman.
2. Lewat pendidikan sejarah dapat diwariskan kebudayaan dari umat manusia, penghargaan terhadap sastra, seni serta cara hidup orang lain.
3. Melatih tertib intelektual, yaitu ketelitian dalam memahami dan ekspresi, menimbang bukti, memisahkan yang penting dari yang tidak penting, antara propaganda dan kebenaran.
4. Melalui pendidikan sejarah dapat dibandingkan kehidupan jaman sekarang dengan masa lampau.
5. Pendidikan sejarah memberikan latihan dalam pemecahan masalah-masalah/pertentangan dunia masa kini.

Pendidikan sejarah di sekolah menurut Meulen (1987: 82-84) bertujuan:

1. ikut membangun kepribadian dan sikap mental anak didik

2. membangkitkan keinsafan akan suatu dimensi yang amat fundamental dalam eksistensi umat manusia, yaitu kontinuitas gerakan dan peralihan terus menerus dari yang lalu ke arah masa depan
3. mengantarkan manusia ke kejujuran dan kebijaksanaan pada anak didik
4. untuk menanamkan cinta bangsa dan sikap kemanusiaan. Arti terpenting pendidikan sejarah adalah dapat memecahkan masalah masa kini dengan menggunakan masa lampau.

Kaitannya dengan nasionalisme dalam pendidikan sejarah menurut Kartodirdjo (*Kompas*, 30 Oktober 2001) salah satu penyebab kurangnya kesadaran nasionalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa pada dasarnya juga disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap sejarah. Pendidikan sejarah perlu diperhatikan, tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga punya afeksi memberikan pengaruh pada tingkat emosi. Jadi, nasionalisme dapat dikembangkan lewat pendidikan sejarah. Misalnya, Bagaimana di masa lampau para perintis kemerdekaan begitu tinggi idealisme dan nasionalismenya. Mereka tidak mencari pangkat dan jabatan sendiri-sendiri. Mereka datang dari (studi) di negeri Belanda dan kebanyakan terus memimpin pergerakan. Hidupnya tidak selalu enak, banyak keprihatinan, tetapi dalam jangka yang cukup panjang menempa mereka menjadi pimpinan dalam negara yang merdeka.

Jadi sebenarnya fungsi sejarah nasional adalah sebagai penumbuh kebudayaan nasional. Lewat pengetahuan sejarah muncul kesadaran sejarah dan kesadaran nasional. Sehingga generasi muda dapat diberi inspirasi, aspirasi. Mereka diberi model peran kepahlawanan dan heroisme, pendidikan sejarah perlu menekankan heroisme agar generasi muda mendapat inspirasi bagaimana para pemimpin besar ini mengabdikan diri kepada masyarakat dan negara. Dengan demikian negara kita tetap tegak dan lestari, dapat lebih kuat.

Nasionalisme sebagai suatu ideologi sangat diperlukan untuk menghadapi globalisasi. Tanpa itu kita akan dilanda oleh globalisasi, tidak punya pegangan. Maka saat ini untuk meningkatkan *national building* adalah melakukan upaya dengan merevitalisasi nasionalisme.

Menurut Hasan (1999: 6) secara tradisional pendidikan sejarah di sekolah-sekolah diarahkan pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai peristiwa sejarah, pengembangan berpikir kronologis, pengembangan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan toleransi. Hasan (1999: 7) melihat proses pengembangan kemampuan berpikir kronologis yang merupakan kemampuan berpikir dasar dalam sejarah maupun sikap toleransi dikembangkan sebagai suatu *nurturant effect* dan bukan sebagai suatu *instructional effect*. Ditambahkan oleh Hasan (1999:7-8) peristiwa sejarah adalah peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan, perubahan, peristiwa sejarah dapat memberikan pelajaran bermanfaat bagi persiapan kehidupan

mahasiswa di masa mendatang. Disarankan oleh Hasan (1996: 8) pendidikan sejarah harus dapat mempersiapkan siswa/mahasiswa dalam kualitas yang mampu melakukan kritik terhadap setiap informasi yang diterimanya.

Hasan (1999: 8) memberikan pemikirannya tentang pendidikan sejarah pada masa mendatang sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pengembangan terhadap peristiwa sejarah yang cukup mendasar untuk digunakan sebagai dasar memahami lingkungan sekitarnya, membangun semangat nasionalisme, dan sikap toleransi.
2. Kemampuan berpikir kritis yang dapat digunakan untuk mengkaji dan memanfaatkan pengetahuan sejarah, ketrampilan sejarah, dan nilai suatu peristiwa sejarah dalam membina kehidupan yang memerlukan banyak keputusan kritis dan dalam menerapkan ketrampilan sejarah untuk memahami berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terjadi di sekitarnya.
3. Ketrampilan sejarah yang dapat digunakan siswa dalam mengkaji berbagai informasi yang sampai kepadanya untuk menentukan kesahian informasi, memahami dan mengkaji setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat di sekitarnya, dan digunakan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.
4. Kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah, kemampuan menyaring nilai yang ada, memilih dan mengembangkan nilai-nilai positif menjadi milik dirinya dan nilai-nilai negatif untuk pelajaran yang tidak terulangi, dan meniru keteladanan yang dipertunjukkan oleh berbagai pelaku dalam berbagai peristiwa sejarah.

Nash dan Crabtree yang menulis buku tentang *National Standards for Histories* (dalam Hasan, 1996: 9) sangat menekankan pengembangan ketrampilan sejarah, pemahaman ketrampilan berpikir dan ketrampilan sejarah merupakan kualitas yang dinyatakan sebagai standar yang harus dikuasai setiap mahasiswa yang belajar sejarah.

Ditambahkan oleh Hasan (1999: 9) bahwa ada *shift* dalam filsafat pendidikan sejarah dari filsafat perenialisme yang menekankan pada *transmission of the glorious past* kepada suatu posisi di mana berbagai aliran filsafat seperti *esensialisme* dan bahkan *social reconstructionism* bergabung dengan *perenialisme*. Dengan demikian pendidikan sejarah tidak hanya sebagai wahana pengembangan kemampuan intelektual dan kebanggaan akan masa lampau, tetapi juga menjadi wahana untuk memperbaiki kehidupan sosial-budaya-politik-ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Pendidikan sejarah menjadi pendidikan yang mempunyai nilai praktis dan pragmatis bagi mahasiswa.

Pendekatan pendidikan sejarah pada masa mendatang menurut Hasan (1996: 9) adalah sebagai berikut :

1. Keterkaitan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa
2. Pemahaman dan kedadaran akan karakteristik cerita sejarah yang tidak pernah bersifat final, dan
3. Perluasan tema sejarah politik dengan tema sejarah sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.

Pendidikan sejarah yang berlaku selama ini hampir tidak menyentuh lingkungan sekitar mahasiswa, demikian juga jarak waktu peristiwa sejarah dengan mahasiswa. Pendidikan sejarah masa kini harus mendekatkan dan menghubungkan apa yang terjadi dalam buku-buku teks sejarah dengan lingkungan sekitar mahasiswa, pendidikan sejarah harus penuh makna sehingga dapat memberikan kontribusi penyelesaian masalah sekarang. Pendidikan sejarah yang berpedoman

pada cerita sejarah dalam buku teks adalah hasil rekonstruksi para sejarawan, untuk itu para mahasiswa harus dikembangkan pemahaman bahwa cerita sejarah tersebut dapat berubah berdasarkan temuan fakta baru dan bersifat subyektif. Pendekatan tema politik yang menjadi fokus kajian pelajaran sejarah pada masa lalu hendaknya dirubah, dengan fokus ekonomi, budaya, sosial, teknologi. Sehingga dengan perluasan tema, dapat membuka pemahaman mahasiswa tentang perjalanan hidup manusia atau masyarakat yang menyangkut berbagai aspek kehidupan; pada gilirannya mahasiswa akan dapat memahami makna perkembangan suatu masyarakat baik secara global maupun di lingkungan sekitarnya serta proses penjatidirian (Hasan, 1999).

Menurut Sjamsuddin (1999: 13) sejarah selalu dikaitkan dengan kegunaan praktisnya, semacam ajaran moral dan/atau pendidikan, tetapi bila berlebihan akan dapat menjadikan sejarah sebagai ajaran moral yang menggusarkan. Sjamsuddin (1999: 14) mengelompokkan nilai guna dari ilmu sejarah menjadi dua bagian, yaitu : nilai intrinsik dan nilai disiplin. Nilai intrinsik merupakan nilai yang dikandung oleh sejarah sebagai sebuah tubuh ilmu pengetahuan (*a body of knowledge*), yaitu : interpretasi dan eksplanasi, bimbingan (*guidance*), inspirasi, dan kesadaran kelompok. Sedangkan nilai disiplin yaitu nilai-nilai yang merupakan hasil dari sejarah sebagai sebuah medium disiplin intelektual. Ditegaskan oleh Sjamsuddin (1999: 16) bahwa mempelajari sejarah tidak hanya membantu menafsirkan dan menjelaskan peristiwa-

peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan dinamika manusia, menyediakan bimbingan, inspirasi, dan solidaritas kelompok dalam menjalani kehidupan mereka, tetapi juga menyiapkan suatu disiplin mental yaitu melatih penggunaan proses mental dan latihan dalam pengembangan sikap-sikap mental tertentu sebagai bagian dari olah intelektual. Nilai disiplin ilmu dari ilmu sejarah ini terdiri dari : melatih penggunaan proses mental, perkembangan sikap mental.

Dengan memperhatikan nilai guna sejarah, diharapkan sejarah dapat membuat kita mampu memahami diri kita sendiri dan masalah-masalah serta prospek-prospek kemanusiaan pada masa kini dan masa yang akan datang; yang merupakan peranan sosial pendidikan sejarah (Sjamsuddin, 1996: 17).

Abdullah (1996: 7) mengatakan bahwa penilaian moral sekarang pun dipakai sebagai ukuran dalam menilai masa lampau. Masa lampau dipelajari dan diajarkan untuk memberikan pembenaran terhadap hari ini. Contohnya, sejarah bukan saja menjadi pembenaran dari pengingkaran terhadap kekuasaan kolonial, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam memupuk komunitas baru, yang disebut bangsa.

Abdullah (1996: 10) menekankan bahwa pendidikan sejarah bukanlah rentetan peristiwa yang kering dan partikularistik, yang berhenti pada dirinya. Strategi pendidikan sejarah sebaiknya dimulai dengan pemahaman bahwa sejarah adalah sebuah corak wacana intelektual, yang kritis dan rasional.

Ditambahkan oleh Abdullah (1996: 10-11) pendidikan sejarah diajarkan secara berjenjang atau bertahap. *Tahap pertama* sebaiknya sejarah diajarkan sebagai sarana untuk memupuk kesadaran atau lingkungan sosial, dipupuk rasa keakraban atau *sense of intimacy*. Lewat pendidikan sejarah mahasiswa dibekali pengetahuan dan kesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari komunitas di sekelilingnya. Dirinya dituntut bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya dan dirinya adalah bagian dari lingkungan sosialnya. Dalam pendidikan sejarah diperkenalkan proses integrasi yang dimulai dari tingkat lokal, pelajaran dimulai dengan aktivitas pemimpin-pemimpin lokal untuk menjadikannya lokalitasnya menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar.

Pada tahap kedua disarankan oleh Abdullah (1996: 10) dalam pendidikan sejarah mahasiswa diperkenalkan tentang makna dari dimensi waktu dalam dinamika kehidupan, *sense of actuality*, dan pengetahuan serta kesadaran bahwa para mahasiswa adalah bagian dari komunitas yang lebih luas, pemupukan *sense of history* atau rasa hayat sejarah. Ditekankan pada mahasiswa bahwa segala sesuatu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui pergumulan, perjuangan, usaha, dan terlibat dalam proses historis. Pada tahap kedua ini diarahkan pada memberikan pengalaman pada mahasiswa. Materi pelajaran sejarah tidak didominasi oleh sejarah-politik, tetapi bercorak sejarah sosial; sehingga dapat menumbuhkan kreativitas-lokal guna mengatasi tantangan alam dan tantangan masa depan. Ditekankan pada

mahasiswa bahwa pertumbuhan nasionalisme Indonesia, umpamanya, dapat lebih dulu diterangkan dengan mengungkapkan jaringan sosial-kultural, yang terikat sejak lama, antara daerah-daerah di kepulauan Indonesia. Laut, perdagangan, bahasa, agama akan tampil sebagai jaringan sosio-kultural yang menjadi semakin mengental ketika kolonialisme semakin berkuasa.

Pada tahap ketiga sejarah diajarkan sebagai kegiatan akademis untuk memahami corak dari perubahan jaman, sehingga mahasiswa dapat memahami perkembangan jaman yang terjadi pada masa kini.

Ditegaskan oleh Abdullah (1996: 11) bahwa pendidikan sejarah harus dihindarkan dari kecenderungan antikuariat (kisah masa lalu dipelajari hanya sekedar pelipur lara atau bahan hafalan yang menjemukan), pendidikan sejarah hendaknya menjauhkan diri dari keterangan sejarah (*historical explanation*) yang ideologis tanpa pertanggungjawaban yang rasional.

Menurut Abdullah (1996: 12) sebagai suatu konsep tema utama, yang menentukan seleksi bahan pendidikan tidaklah berarti mengadakan marginalisasi, apalagi pendiaman suara atau peristiwa sejarah yang tidak disenangi. Selanjutnya kerangka konseptual yang dipilih dalam pelajaran sejarah dalam hubungan dengan integrasi nasional dan jatidiri bangsa adalah bahwa komunitas bangsa kita tidaklah ada dengan sendirinya. Komunitas ini terwujud setelah melalui proses sejarah yang panjang, komunitas bangsa terdiri atas kesatuan suku bangsa dan

kesatuan etnik. Integrasi nasional sebagai konsep sejarah, sebab secara konseptual tidak dapat dilihat sebagai *state of being*, tetapi *the state of becoming* suatu proses yang menjadi; jadi bercorak historis. Sedangkan jati diri merupakan hasil terjadinya proses pematangan integrasi nasional. Dari sudut pengisahan atau *mode of emplotment* (Abdullah, 1996: 13) sejarah Indonesia dapat dikisahkan dalam tiga corak pengisahan, yaitu : (1) pengisahan romantik, (2) pengisahan heroik, (3) pengisahan patriotik.

Keberhasilan suatu proses pendidikan adalah bila mahasiswa mau belajar, untuk itu pendidikan sejarah yang *problem oriented* cenderung mengkaji peristiwa sejarah dengan pelbagai permasalahannya, jadi bukan hanya didasarkan pada bagaimana memperoleh pengetahuan (*how to know*) tetapi tahu bagaimana harus mengetahui (*to know how to know*). Mahasiswa hendaknya dirangsang untuk mengenali dan mengkaji peristiwa sejarah secara utuh, dengan melakukan restrukturisasi pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki (Hariyono, 1995).

Sejarah punya peluang untuk menawarkan bagaimana belajar untuk berpikir, dalam pendidikan sejarah diharapkan mahasiswa mampu mengumpulkan, mengorganisir dan mengklasifikasi data yang luas. Sejarah mampu mendidik mahasiswa bagaimana mencari informasi yang relevan, menggunakan untuk memecahkan masalah, dan mengkomunikasikan hasilnya (Hariyono, 1995).

Sejarah dapat mengembangkan pengertian tentang warisan kebudayaan, dan pendidikan sejarah dapat melatih murid-murid supaya teliti dalam pengertian dan ekspresi, menimbang bukti-bukti, memisahkan yang tidak penting dari yang penting, membedakan antara propaganda dan kebenaran.

Garvey dan Krug (1977: 2) menjelaskan tentang studi sejarah sebagai “....*studying history can mean : (a) to acquire knowledge of historical facts; (b) to gain an understanding or appreciation of past events or period or people; (c) to acquire the ability to evaluate and criticize historical writing; (d) to learn the techniques of historical research; (e) to learn how to write history*”. Dengan studi sejarah dimaksudkan dapat: memperoleh pengetahuan fakta sejarah, mendapatkan pengertian atau apresiasi peristiwa-peristiwa atau periode atau masyarakat pada masa lalu, mendapatkan kemampuan mengevaluasi dan mengkritik tulisan sejarah, mempelajari teknik-teknik penelitian sejarah, dan belajar bagaimana menulis sejarah.

Tetapi perlu ditegaskan di sini bahwa dalam kajian masa lalu dari sejarah itu terkandung di dalamnya pengertian proses dan perspektif sejarah, artinya bukan masa lalu untuk kepentingan masa lalu melainkan masa lalu sebagai titik tolak untuk masa sekarang dan selanjutnya (Sjamsuddin, 1996: 191).

Dikatakan oleh O'Hara dan O'Hara (2001: 9) bahwa “....*history can and does make an important contribution to children's education in*

general and a unique contribution to their social, cultural and intellectual development particular". Sejarah dapat memberikan kontribusi penting pada pendidikan umum anak dan sumbangan unik pada perkembangan secara khusus di bidang-bidang sosial, cultural, dan intelektual mereka.

Selanjutnya ditambahkan oleh O'Hara dan O'Hara (2001: 10) :

1. *History offers children a means by which they can gain insights into the affairs of the modern world (HMI, 1988) by revealing examples of how the past has influenced the present and by offering lessons for the future.*
2. *History provides opportunities for the development of key learning skills of use across the whole curriculum and adult life.*
3. *History involves subject matter that is intrinsically interesting and has the potential to motivate, stimulate and fire children's curiosity, while the process of historical enquiry fits well with social interaction (Bruce, 1977) views of how children learn.*
4. *History plays a unique and pivotal role in personal and social development through the transmission of society's 'cultural heritages' (HMI, 1988) as children explore the choices, attitudes and values of people in the past*".

Rumusan O'Hara dan O'Hara (2001: 10) di atas menjelaskan bahwa sejarah memberikan kepada anak-anak kemampuan memahami peristiwa/kejadian di dunia modern, dengan contoh-contoh yang terjadi dimasa lampau yang berpengaruh terhadap masa kini dan sebagai pelajaran untuk masa depan. Sejarah memberikan kesempatan bagi perkembangan kunci ketrampilan belajar untuk digunakan seluruh kurikulum dari usia dewasa. Sejarah meliputi bahan-bahan yang pada hakekatnya menarik dan memiliki potensi untuk memotivasi, menstimulus dan menggugah rasa ingin tahu sedangkan proses inkuiri sejarah sesuai dengan pandangan para interaksionis sosial mengenai

bagaimana anak-anak belajar. Sejarah mempunyai peran yang unik dan amat penting dalam perkembangan sosial dan personal melalui transmisi warisan kebudayaan masyarakat seperti mengadakan penyelidikan oleh anak-anak memilih, sikap dan nilai-nilai masyarakat pada masa lampau.

Menurut Sunal dan Haas (1993: 279) : *“History is one of the specifically identified subjects in goal 3 of the National Goals for Education (1990) that will help prepare students for responsible citizenship, further learning, and productive employment in our modern economy”*. Sejarah memperkenalkan subjek pada tiga nilai nasional untuk pendidikan yang mana menolong mempersiapkan para pelajar sebagai warganegara yang bertanggung jawab, meningkatkan belajar, dan pekerjaan produktif dalam ekonomi modern.

Banks (1990: 282) mengatakan : *“Many educators and lawmakers believe that history should be taught in the public schools because it contributes to the development of patriotism and democratic attitudes.* Banyak para pendidik dan pembuat undang-undang percaya bahwa sejarah akan mengajarkan pada publik sekolah sebab sejarah memberikan kontribusi pada pengembangan sikap patriotisme dan demokrasi. Lebih lanjut Banks (1990: 283) menjelaskan bahwa kita membutuhkan pemahaman sejarah untuk menolong pemahaman kita tentang dunia kita. Selain itu dibutuhkan juga pemahaman sejarah untuk menentukan alternatif masa yang akan datang yang mana berakar dalam realitas sejarah dibandingkan mitos dan ilusi. Juga nilai utama

belajar sejarah akan menolong mahasiswa mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang sejarah. Para mahasiswa tidak hanya belajar produk sejarah sebagai temuan dalam buku teks dan sumber-sumber lain; mereka juga memecahkan masalah-masalah sejarah menggunakan metode ahli sejarah. Dengan menggunakan metode sejarah, para mahasiswa akan mengambil generalisasi yang mana membantu pemahaman mereka tentang tingkah laku manusia pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Generalisasi sejarah juga akan menolong para pelajar menghargai langkah dan luas perubahan dalam dunia modern.

C. KELUARGA

Kajian teori mengenai keluarga meliputi lingkungan keluarga, transisi dalam keluarga dan peranan keluarga sebagai pendidik awal semangat kebangsaan dan patriotisme pada mahasiswa. Keluarga mempunyai posisi strategis dalam membantu mahasiswa mulai dari kecil sampai dewasa untuk mengembangkan dasar-dasar semangat kebangsaan dan patriotisme. Keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan terpenting (Dewantara, 1962:100), oleh sebab itu keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia termasuk mahasiswa

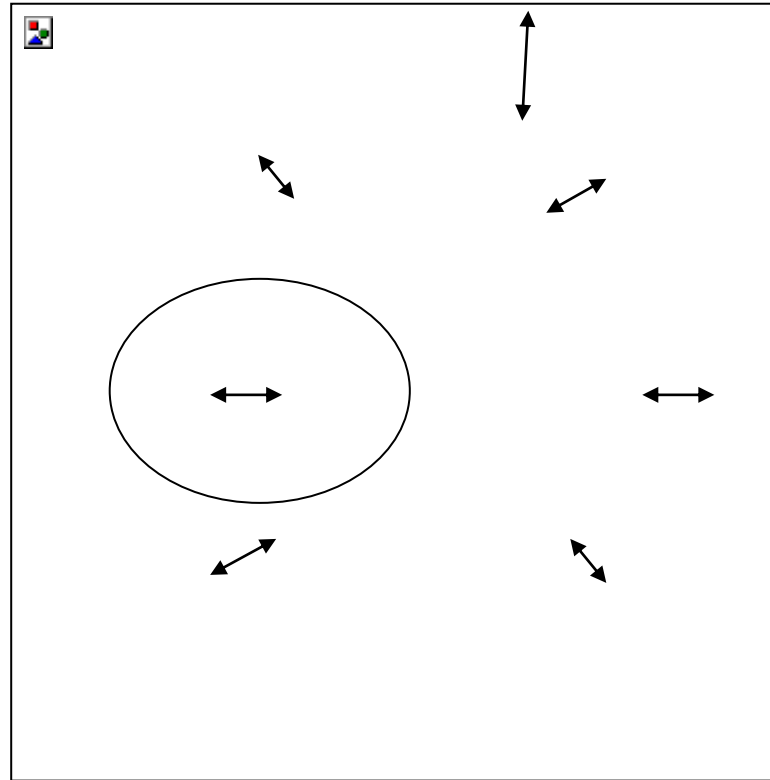
1. Lingkungan Keluarga

Sartain dikutip Purwanto (1988; 77) mengatakan lingkungan (*environment*) telah meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan dan perkembangan atau *life processes*. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan kepribadian anak dimana jika dihadapkan dengan genetik ia adalah faktor luar yang berpengaruh dalam pembentukan dan perubahan kepribadian seseorang baik itu faktor-faktor lingkungan pra kelahiran atau pasca kelahiran yang mencakup lingkungan alam, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga mencakup lingkungan keluarga, sekolah, mazhab dan sebagainya.

Teori yang mempengaruhi perkembangan sosioemosional anak disebut dengan teori Ekologi Bronfenbrenner (Santrock, 2007) yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1917-...). Fokus utama dari teori ini adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak (Santrock, 2007:84-85; Sarwono, 2005:75). Teori ekologi ini terdiri dari lima sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas, yaitu:

- a. Mikrosistem
Suatu setting dimana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain adalah keluarga, teman sebaya, sekolah dan tetangga. Individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia dan orang lain secara timbal balik dan membantu merekonstruksi setting tersebut.
- b. Mesosistem
Kaitan antara mikrosistem. Misalnya hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah dan antara keluarga dengan teman sebaya. Pengalaman yang didapat di dua tempat memberikan pengalaman dan kesimpulan baru kepada individu.
- c. Ekosistem
Terjadi ketika pengalaman di setting lain (dimana murid tidak berperan aktif) mempengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri.
- d. Makrosistem
Adalah kultur yang lebih luas. Kultur adalah istilah luas yang mencakup peran etnis dan factor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Kultur adalah konteks terluas di mana murid dan guru tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat.
- e. Kronosistem
Adalah kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak.

Gambar teori Ekologi *Bronfenbrenner* dapat dilihat pada halaman berikut.



Gambar 2.1
Teori Perkembangan Ekologi Bronfenbrenner (Santrock, 2007:84)

Sementara itu ada beberapa definisi istilah untuk mengartikan keluarga. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995:471) menyebutkan keluarga dapat berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Dapat juga disebut *batih* yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga. Istilah keluarga berbeda dengan rumah tangga. rumah tangga berarti sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, seperti belanja dan sebagainya. Oleh karena itu, ia bersifat material

ekonomis. Orang yang mengatakan urusan sebelum menikah, mempersiapkan dahulu rumah baru kemudian urusan rumah tangga mengacu pada pengertian material ekonomis tadi. Oleh karena itu pengertian rumah tangga dan keluarga itu dibedakan.

Namun demikian istilah rumah tangga juga dapat disamakan artinya dengan keluarga. Arti dari rumah tangga (*household*) adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batih, yaitu keluarga yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, dan anak-anak yang belum menikah atau memisahkan diri. (Soekanto, 2004).

Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Akan tetapi asal-usul keluarga dapat pula terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan status yang berbeda, kemudian mereka tinggal bersama memiliki anak. Anak yang dihasilkan dari hidup bersama ini disebut keturunan dari kelompok itu. Dari sinilah pengertian keluarga dapat dipahami dari berbagai segi. *Pertama*, dari segi orang yang melangsungkan perkawinan yang sah serta dikaruniai anak. *Kedua*, lelaki dan perempuan yang hidup bersama serta memiliki seorang anak, namun tidak menikah. *Ketiga*, dari segi hubungan jauh antar anggota keluarga, namun masih memiliki ikatan darah. *Keempat*, keluarga yang mengadopsi anak dari orang lain. (Suhendi, 2001:42)

Pada bagian lain, Hammudah Abd al-Ati (<http://salehlapadi.wordpress.com/2007/02/25/peran-lingkungan->

[keluarga-dalam-membentuk-kepribadian-anak/](#)) menyebutkan bahwa dewasa ini telah terjadi sikap ambiguitas (tidak pasti) dalam melihat definisi keluarga. Hal itu disebabkan adanya tumpang tindih antara pengertian kekeluargaan (*kinship*) keluarga (*family*). Untuk menghindari adanya kebingungan itu, ia mencoba mendefinikan keluarga dari perspektif Islam. Keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, yang satu dan lainnya mempunyai ikatan baik akibat hubungan darah atau pernikahan. Perikatan itu membawa pengaruh adanya sikap saling berharap (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajaran agama, dikukuhkan secara hukum, serta secara individual saling mempunyai ikatan batin.

Pengertian keluarga ini lebih diaksentuasikan pada *mutual expectation* antara para anggota dalam struktur keluarga. Adanya sikap saling berharap merupakan unsur yang lebih penting dalam keluarga daripada unsur tempat tinggal sebab seringkali kedua pihak yang membentuk keluarga itu saling memisahkan diri. Lebih dari itu ia juga didasari pada adanya sikap saling berharap. Memang, ada konsep sosiologis yang menyebutkan bahwa kesatuan tempat tinggal merupakan salah satu karakteristik dasar dari suatu keluarga yang mengelompokkan (*nuclear family*) tetapi dalam kajian keluarga muslim bukan tipe keluarga berkelompok karena mungkin saja mereka kemudian terpisah-pisah.

Dalam Islam, asal-usul keluarga terbentuk dari perkawinan (laki-laki dan perempuan) dan kelahiran manusia (laki-laki dan perempuan) (Q.S. An-Nisa:1). Asal usul ini erat kaitannya dengan aturan Islam bahwa dalam upaya pengembangbiakan keturunan manusia, hendaklah dilakukan dengan perkawinan.

Jelaslah, bahwa dalam keluarga terdapat hubungan fungsional di antara anggotanya. Yang perlu diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhi hubungan itu, yaitu struktur keluarga itu sendiri. Struktur keluarga banyak menentukan batih hubungan antar anggota mungkin saja lebih kita karena terdiri dari jumlah anggota yang terbatas. Akan tetapi, pada keluarga luas, hubungan antar anggota keluarga sangat renggang karena terdiri dari jumlah anggota yang banyak dengan tempat terpisah. (Goode, 2007)

Dengan memperhatikan berbagai definisi di atas, Horton dan Hunt (1996:267) memberikan beberapa pilihan dalam mendefinisikan keluarga yaitu:

- a. suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama.
- b. suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan.
- c. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.
- d. Pasangan tanpa nikah yang mempunyai anak.
- e. Para anggota suatu komunitas yang biasanya mereka ingin disebut sebagai keluarga.

Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang dikenal anak memiliki peran yang sangat menentukan dalam membantu perkembangan kepribadiannya. Berbagai aliran dalam dunia psikologi mengakui hal itu. Aliran psikoanalisis misalnya sangat menekankan dan percaya akan pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan kepribadian anak. Bahkan dinyatakan bahwa pola kepribadian anak sudah terbentuk dalam usia yang masih sangat muda, yaitu antara 0 sampai 5 tahun. Lingkungan keluarga yang sehat, biasanya akan melahirkan anak-anak yang berkepribadian sehat pula. Sebaliknya lingkungan keluarga yang tidak sehat akan melahirkan anak-anak yang memiliki kepribadian yang tidak sehat pula.

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di disemua masyarakat. Istilah “struktur sosial” dalam ilmu antropologi seringkali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan. Sebaliknya, ada yang membantah dalam masyarakat tertentu sistem hukum tidak ada karena memang tidak ada suatu badan atau hukum resmi. Memang kemungkinan untuk mengabstraksikan aspek hukum, ekonomi dan dinamika politik tingkah laku dapat dilakukan, meskipun tidak ada badan yang secara resmi menangani bidang-bidang ini dalam masyarakat itu. Tetapi kedudukan pribadi dalam keluarga dan tanggung jawabnya merupakan perhatian baik secara resmi maupun tidak pada masyarakat dengan tingkat teknologi tinggi maupun rendah (Goode, 2007 ; 7).

Tugas-tugas kekeluargaan merupakan tanggungjawab langsung setiap pribadi dalam masyarakat, dengan satu dua pengecualian. Hampir setiap orang dilahirkan dalam keluarga dan juga membentuk keluarganya sendiri. Setiap orang merupakan sanak keluarga dari banyak orang. Banyak orang yang mungkin saja dapat lolos dari kewajiban agama yang oleh orang lain dianggap sebagai suatu keharusan, demikian juga dengan badan politik masyarakat. Hampir tidak ada peran tanggungjawab keluarga yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti halnya tugas khusus dalam pekerjaan dapat diwakilkan kepada orang lain.

Keikutsertaan dalam aktivitas keluarga mempunyai segi menarik lainnya, ialah bahwa meskipun tidak didukung oleh hukuman resmi yang biasanya mendukung banyak kewajiban lainnya tetapi semua orang tetap mengambil bagian. Umpamanya, kita wajib ikut serta dalam kegiatan yang ekonomis atau produktif, jika tidak ingin menghadapi pilihan kelaparan. Kita harus masuk dalam ketentaraan, membayar pajak dan menghadap ke pengadilan, atau menghadapi hukuman Fisik dan kekuatan. Tetapi tidak ada hukuman serupa itu bagi orang yang menolak untuk kawin, atau tidak mau berbicara dengan bapak atau saudaranya. Meskipun begitu, tekanan sosial itu demikian memaksa dan terus menerus, dan demikian terbaurnya dengan imbalan baik secara langsung maupun tidak, sehingga hampir semua orang menyesuaikan diri kepada tuntutan-tuntutan keluarga.

Sehat tidaknya lingkungan keluarga banyak bergantung pada harmonis tidaknya hubungan antara anggota keluarga tersebut. Sedangkan harmonis tidaknya hubungan antar anggota keluarga sangat tergantung pula pada cara orang tua membina hubungan, memperlakukan atau mengasuh anak-anaknya (Gordon,1983 : 158).

Orang tua yang memperlihatkan sikap keras terhadap pendirian sendiri tanpa menghargai anak-anak, mendominasi kehidupan anak, unjuk kuasa dan mengucilkan anak, akan menghilangkan kebahagiaan pada diri anak, karena anak akan mengalami perasaan tertekan, tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri, anak merasa terancam, gusar dan tidak enak. Perasaan ini akan berkontribusi pada persepsi dan kesan anak bahwa orang tua sebagai pemimpin keluarga telah berlaku tidak sehat. Kondisi demikian akan mudah memicu konflik dalam diri anak, yang mungkin akan berakibat pada konflik terbuka dengan orang tua. Kondisi yang tidak sehat ini juga akan mengakibatkan anak frustrasi. Anak idealnya dihargai sebagai manusia yang memiliki berbagai potensi diri dan dapat melakukan pilihan dan berproses aktif (Djahiri,2001 :4).

Pada sisi lain sikap melindungi, menerima, berlaku arif dan bijaksana, memberikan penjelasan atas konsekuensi dari perilaku yang diperlihatkannya, mendukung perbuatan-perbuatan positif anak, dan mengarahkan perbuatan negatifnya secara bijaksana, serta mengenalkan bagaimana cara hidup dalam kelompok sosial, akan

mengakibatkan anak merasa aman, mampu mengembangkan potensi-potensinya, memiliki rasa percaya diri dan lingkungan. Perasaan semacam ini akan berkontribusi terhadap persepsi yang positif terhadap orang tua, yang sekaligus membangun kesan yang baik terhadap suasana kehidupan keluarga.

Dalam lingkungan keluarga, ibu memegang peranan penting terhadap pendidikan anaknya. Sejak bayi dilahirkan ibu selalu berada di sampingnya, memberi makan, minum, merawat. Bayi lahir, dipeluk dan dibelai dengan kasih sayang. Tingkat pendidikan ibu bermacam-macam, sesuai pengalaman belajarnya. Menunjuk pada taraf kebudayaan yang tinggi dimiliki keluarga, khususnya pendidikan ibu, dapat berpengaruh besar dalam perkembangan kecerdasan, tingkah laku anak. Ibu dengan pengalaman belajarnya, kaya perbendaharaan kata, sehingga anak dapat berbahasa dengan baik (Winkel, 1987; 107). Ibu sering mengucapkan kata-kata, anak-anak mendengarkan dan menirukan atau berbicara. Ini merupakan pengalaman belajar, yaitu melatih ketrampilan mendengarkan (*listening*), berbicara (*speaking*), menulis (*writing*), dan membaca (*reading*).

Dalam kehidupan sehari-hari, sering terlihat orang tua mengajak anaknya, yang berusia di bawah enam tahun melakukan sholat lima waktu, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha walaupun bacaan doanya belum lengkap. Pengalaman sholat ini merupakan pengalaman belajar

keagamaan, yang juga mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa anak.

Orang tua ada kalanya menuntut dari anak agar sejak kecilnya mulai belajar bertanggung jawab atas beberapa hal tertentu. Misal menyimpan mainan pada tempatnya, mengatur tempat tidurnya, menyirami tanaman. Pengalaman belajar ini perlu bagi anak, yang nanti di kemudian hari akan menjadi orang bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Tanpa belajar bertanggung jawab dari kecilnya, kelak anak itu tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka kurang sekali mempunyai sifat itu (Purwanto, 1988; 89). Tetapi hendaknya tuntutan orang tua jangan berat bagi anak. Aturan yang telah ditetapkan orang tua sering dilanggar. Maka janganlah menghukum anak, karena melanggar aturan rumah. Menghukum bukanlah merupakan suatu cara menghadapi pemecahan masalah anak (Dreikurs, 1986; 58).

Pengalaman-pengalaman pertama yang menyenangkan dalam keluarga, semasa kecilnya menolong untuk menyakinkan dari perkembangan sikap sosial yang positif. Elizabeth B. Hurlock mengatakan: "*The home thus appears indeed to be a set of learning for the development of social skill and perhaps of desire to participate in activities with other individual*" (Hurlock, 1974).

Bahwa iklim psikologis yang ditetapkan dilingkungan keluarga dapat disebabkan berbagai tipe orang tua, misalnya dominasi (*otoriter*) atau selalu mengalah terhadapnya. Dapat pula suasana itu diciptakan

karena sifat menerima (*acceptance*) atau menolak (*rejection*). Berpijak pada asumsi bahwa cara orang tua memperlakukan dan mengasuh anak merupakan faktor yang dominan dalam menentukan sehat tidaknya lingkungan keluarga, maka kajian ini difokuskan pada hubungan lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme.

Orang tua pengasuh anak memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan anak. Perlakuan orang tua dalam pengasuhan anak sangat menentukan perilaku anak dalam menjadi perilaku yang prososial atau anti sosial. Bahwa pola pengasuhan yang dianut orang tua dalam mengasuh anak akan mempengaruhi bagi terwujudnya nilai-nilai dalam diri anak.

Ada beberapa pola asuhan yang dapat digunakan orang tua dalam membina, membimbing dan mendidik anak-anaknya. Hurlock (1974; 123) mengelompokkan empat pola dasar yang bipolar tentang pola hubungan antar orang tua dengan anak, yaitu pola :

- a. toleran – tidak toleran
- b. permisif - keras (ketat)
- c. membiarkan – turut terlibat
- d. hubungan “dingin” – hubungan “hangat”.

Gordon (1983; 158) menggolongkan pola asuhan orang tua atas 3 pola, yaitu pola otoriter, permissive, dan demokratis. Pola otoriter dan permisif, sebagai pola asuhan yang jelek (*bad-parent*), dan pola

demokrasi dipandang sebagai pola yang baik (*good parent*). Demikian juga yang disampaikan oleh Singgih D. Gunarsa (1983; 6) membedakan menjadi tiga yaitu otoriter, bebas, dan demokrasi.

Pola asuh yang otoriter akan terjadi komunikasi satu dimensi atau satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan patuh terhadap orang tuanya, anak tidak mempunyai pilihan lain. Orang tua memerintah dan memaksa tanpa kompromi. Anak melakukan perintah orang tua karena takut, bukan karena suatu kesadaran bahwa apa yang dikerjakannya itu akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Orang tua memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan anak, keinginan anak, keadaan khusus yang melekat pada individu anak yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain. Perintah yang diberikan berorientasi pada sikap keras orang tua, sikap keras merupakan suatu keharusan bagi orang tua. Sebab tanpa sikap keras ini anak tidak akan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam keluarga yang bersifat otoriter perkembangan anak ditentukan oleh orang tuanya. Sifat pribadi anak yang otoriter biasanya suka menyendiri, mengalami kemunduran kematangan, ragu-ragu di dalam semua tindakan serta lambat berinisiatif.

Pola asuh bebas, berorientasi bahwa anak itu makhluk hidup yang berpribadi bebas. Anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat

menurut hati nuraninya. Seorang anak yang lapar, ia harus memasukkan nasi ke dalam mulutnya sendiri, mengunyah sendiri dan menelan sendiri. Tidak mungkin orang tua yang mengunyah dan memasukkan makanan ke dalam perut anaknya. Orang tua membiarkan anaknya mencari dan menemukan sendiri apa yang diperlukan untuk hidupnya. Anak telah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggap baik. Orang tua sering mempercayakan anaknya kepada orang lain, sebab orang tua terlalu sibuk dalam pekerjaan, organisasi sosial dan sebagainya. Orang tua hanya bertindak sebagai polisi yang mengawasi permainan menegur dan mungkin memarahi. Orang tua kurang bergaul dengan anak-anaknya, hubungan tidak akrab dan anak harus tahu sendiri tugas apa yang harus dikerjakan.

Memperhatikan dua pola asuh tersebut di atas dapat diketahui bahwa pola otoriter memandang anak sebagai objek saja. Anak dipandang sebagai keranjang sampah yang dapat diisi sesuka orang tua. Pada anak tidak ada pilihan lain, kecuali mengikuti perintah orang tua. Pada pola yang kedua anak dipandang sebagai subjek yang diperbolehkan berbuat menurut pilihannya sendiri. Segala tugas diserahkan sepenuhnya pada anak. Dua pola ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pola asuh otoriter memang memungkinkan terlaksananya proses transformasi nilai dapat berjalan lancar. Akan tetapi anak mengerjakan tugas dengan rasa tertekan dan takut. Akibatnya jika orang tua tidak ada mereka akan berbuat yang lain. Dia

akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Pola asuh bebas memang memandang anak sebagai subjek, anak bebas menentukan pilihannya sendiri. Akan tetapi anak menjadi berbuat semau-maunya; ia berbuat dengan mempergunakan ukuran diri sendiri. Padahal anak berada dalam dunia anak dan dia harus masuk pada dunia nilai dari dunia anak. Oleh karena itu anak akan kebingungan ibarat anak ayam yang ditinggalkan induknya. Akhirnya anak akan lari ke sana ke mari tanpa arah. Idealnya anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri dan diberi dorongan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa kebangsaan yaitu dengan mengikuti berbagai lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional. Dengan demikian sedikit-sedikit akan timbul kecintaan pada bangsa dan negaranya.

Pola asuh demokratis. Pola asuh ini berpijak pada dua kenyataan bahwa anak adalah subjek yang bebas dan anak sebagai makhluk yang masih lemah dan butuh bantuan untuk mengembangkan diri. Manusia sebagai subjek harus dipandang sebagai pribadi. Anak sebagai pribadi yang masih perlu mempribadikan dirinya, dan terbuka untuk dipribadikan. Proses kepribadian anak akan berjalan dengan lancar jika “cinta kasih” selalu tersirat dan tersurat dalam proses itu. Dalam suasana yang diliputi oleh rasa cinta kasih ini akan menimbulkan pertemuan sahabat karib, dalam pertemuan dua saudara. Dalam pertemuan itu dua pribadi bersatu padu. Dalam pertemuan yang bersatu padu akan timbul

suasana keterbukaan. Dalam suasana yang demikian ini maka akan terjadi pertumbuhan dan pengembangan bakat-bakat anak yang dimiliki oleh anak dengan subur.

Demikian juga dengan penggunaan identitas pribadi seperti nama, bahasa, budaya akan menanamkan dan memunculkan kesadaran jati diri. Hal ini penting untuk proses penanaman semangat/jiwa nasionalisme dalam keluarga yang akhirnya diharapkan akan berkembang. Anak akan bangga menunjukkan identitas dirinya dimana pun berada sebagai anak bangsa Indonesia. Karena menganggap bahasa dan budaya yang dimiliki sama dan sederajat dengan bangsa lain.

Anak yang hidup dalam keluarga demokratis, hubungan orang tua dengan anak terbuka. Ada sesuatu masalah dibicarakan bersama, dipecahkan bersama pula. Sikap anak lebih menyesuaikan diri, fleksibel, dapat menguasai diri, mau menghargai pekerjaan orang lain, menerima kritik dengan terbuka, aktif dalam hidupnya, emosi lebih stabil dan mempunyai tanggung jawab. *"Children brought up by democratic method, make better social adjustment outside the home and have more favorable attitude toward people"* (Hurlock, 1973; 130).

Gunarsa (1983) mendeskripsikan pola asuh atas tiga kategori yaitu otoriter, bebas, dan demokrasi, namun dalam kehidupan nyata sehari-hari sebenarnya pengasuhan yang digunakan orang tua sifatnya multidimensional. Yaitu mengkombinasikan ketiga pola tersebut.

Meskipun multidimensional sifatnya, namun orang tua akan memperlihatkan cara-cara yang dominan dalam mengasuh anak-anaknya.

Secara sekilas, kehidupan sehari-hari menampakkan fenomena yang biasa saja. Bila dikaji lagi secara mendalam menghadirkan disparitas fenomena yang menyiratkan banyak persoalan dan memiliki lingkup yang sangat kompleks. Dalam era global dewasa ini, kompleksitas masalah kehidupan mengalami perubahan yang cepat sekali. Hal ini memberikan kesan bahwa kehidupan sehari-hari menggalau dan beraneka (Shochib, 1997; 11). Dengan cara pandang tertentu yang cermat, tajam dan menyeluruh, dapat dimunculkan pertanyaan mengapa perubahan itu terjadi, pertanyaan tersebut membuat fenomena-fenomena menunjukkan keteraturan. Jika dalam era globalisasi tidak ada upaya untuk mengantisipasi, manusia dapat larut dan hanyut di dalamnya. Sehubungan dengan itu, perubahan yang cepat mengharuskan adanya pelbagai upaya terhadap anak agar mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengakomodasi dan mewarnainya. Karena anomali era global secara maknawi semakin meningkat untuk digandrungi oleh anak remaja.

Salah satu upaya yang esensial maknanya adalah mengundang anak-anak untuk mengaktifkan diri dengan nilai-nilai moral untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Dengan demikian, upaya tersebut menunjukkan perlu adanya posisi dan

tanggung jawab dari orang tua. Karena orang tua berkewajiban meletakkan dasar-dasar disiplin diri kepada anak, dan bersama sekolah dan masyarakat dikembangkanlah disiplin diri itu. Disiplin diri merupakan substansi esensial di era global untuk dimiliki dan dikembangkan oleh anak karena dengan itu ia dapat memiliki kontrol internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Dengan demikian, anak tidak hanyut oleh arus globalisasi, tetapi sebaliknya ia mampu mewarnai dan mengakomodasi.

Dalam membantu anak untuk memahami perubahan yang terjadi begitu cepat pada saat ini maka anak perlu dibantu dalam penanaman konsep dari sisi anak. Margaret Mead dalam Young Pai (1990:177-178) menyebutkan "*grown-ups can learn to cope with a rapidly changing world more effectively by observing the young. We need to have the young ask the questions that we would never think to ask, but enough trust must be re-established so that the elders will be permitted to work with them on the answers*".

Bantuan orang tua dalam meletakkan dasar-dasar dan pengembangan disiplin diri anak adalah menciptakan situasi dan kondisi yang mendorong anak memiliki dasar-dasar disiplin diri dan dalam pengembangannya melibatkan dua subjek yaitu orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai si terdidik. Bantuan orang tua kepada anak untuk memiliki dasar-dasar disiplin diri dan mengembangkannya merupakan suatu pekerjaan dari pendidik. Dalam hal ini, pendidik dapat

mempengaruhi atau memasukkan sesuatu yang bersifat psikologis kepada si terdidik agar mau bekerja sama dalam pencapaian tujuan sehingga akhirnya dapat mengerjakan sendiri. Ini berarti tindakannya dimengerti dan dipahami oleh anak. Pemahaman dan pengertian anak terhadap maksud orang tuanya berarti ada pertemuan makna antara pendidik dan si terdidik.

Dalam menanamkan sikap nasionalisme di keluarga, faktor usia anak menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam memberikan pengajaran di lingkungan keluarga. Pada saat anak sudah mulai dapat mengidentifikasi warna, anak dapat dikenalkan pada bendera merah putih lengkap dengan makna yang terkandung di dalamnya. Apalagi warna dasar bendera Indonesia merupakan warna dasar yang mudah untuk diperkenalkan pada anak. Memberikan contoh-contoh tentang keberanian yang terkandung pada warna merah dapat dengan menceritakan perjuangan-perjuangan atau mengajak anak bermain perang-perangan. Memberi pengertian tentang keberanian dapat dibarengi dengan menceritakan kesucian yang terkandung pada warna putih bendera Indonesia sehingga anak mendapatkan gambaran nyata tentang bendera Indonesia dan sejarahnya.

Nama anak yang khas Indonesia pun dapat menjadi cerita tersendiri. Nama Mandra atau Euis kemungkinan kecil tidak akan ditemukan di negara Amerika. Faktor nama saja sudah mampu memberikan perbedaan jati diri dan jika ditambah dengan menerangkan

bahasa yang berlainan di tiap negara ataupun bahasa daerah yang berbeda-beda di Indonesia dapat memberikan gambaran nyata betapa kayanya budaya Indonesia sehingga Indonesia layak untuk dijadikan kebanggaan. Untuk saat ini memang pemberian nama tidak lagi berciri khas daerah masing-masing yang diakibatkan munculnya rasa malu dan merasa tidak keren jika menggunakan nama asli Indonesia.

Orang tua juga dapat memberikan keteladan pada anak dengan memberikan contoh nyata. Misalnya, langsung menghadap bendera dimana pun berada pada saat melihat bendera merah putih dikibarkan, ikut memperingati perayaan hari nasional dengan melibatkan anak dan menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga kebanggaan anak akan muncul akan negaranya.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sosialisasi dalam berbagai segi kehidupan dipelajari dalam keluarga. Tentu hasilnya akan sangat tergantung kepada berbagai karakteristik keluarga anak itu diasuh dan dibesarkan. Dengan demikian lingkungan keluarga mempunyai peran yang besar dalam membentuk sikap nasionalisme anak.

2. Transisi dalam Keluarga

Secara sekilas, kehidupan sehari-hari menampakkan fenomena yang biasa saja. Bila dikaji lebih mendalam, ternyata menghadirkan disparitas fenomena yang menyiratkan banyak persoalan dan memiliki

lingkup yang sangat kompleks. Dalam era global dewasa ini, kompleksitas masalah kehidupan mengalami perubahan yang cepat sekali. Hal ini memberikan kesan bahwa kehidupan sehari-hari semakin menggalau dan beraneka. Dengan cara pandang tertentu yang cermat, tajam dan menyeluruh sehingga memunculkan pertanyaan mengapa perubahan itu terjadi. Pertanyaan tersebut membuat fenomena-fenomena menunjukkan keteraturannya. Jika dalam era globalisasi tidak ada upaya untuk mengantisipasi, manusia dapat larut dan hanyut di dalamnya. Berkaitan dengan itu, perubahan yang cepat mengharuskan ada berbagai upaya terhadap anak agar mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengakomodasi dan mewarnainya. Karena anomali era global secara maknawi semakin meningkat untuk digandrungi oleh anak remaja. Misalnya seks bebas, ekstasi, minuman keras dan tawuran antar remaja (Schohib, 1997:11).

Kehidupan masyarakat di manapun juga, keluarga merupakan unit terkecil yang peranannya sangat besar. Peranan yang sangat besar itu disebabkan oleh karena keluarga mempunyai fungsi penting di dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Fungsi yang sangat penting itu terutama dijumpai pada peran untuk melakukan sosialisasi, yang bertujuan untuk mendidik warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianut, untuk pertama kali diperoleh dalam keluarga. Pola perilaku yang benar dan tidak menyimpang untuk pertama kali juga dipelajari dari keluarga (Soekanto, 2004:40).

Kehidupan keluarga yang kurang serasi, mengakibatkan sangat besar kemungkinan bahwa anggota keluarga akan menjadi parasit bagi masyarakat. Kehidupan keluarga yang kurang serasi bukanlah semata-mata terjadi oleh karena ayah dan ibu hidup terpisah, akan tetapi justru menyangkut keadaan di mana salah satu anggota keluarga tidak berfungsi, sehingga tidak memenuhi peranan yang diharapkan darinya. Perubahan yang terjadi dalam keluarga sebenarnya hanyalah *unifactorial hypotheses* (Goode,2007:209) yaitu menyatakan bahwa perubahan keluarga terbentuk atau terjadi terutama karena suatu faktor besar, seperti halnya bangsa, musim atau ekonomi.

Anggapan umum diantara para ahli sosial, bahwa perubahan teknologi atau industri adalah faktor utama yang menyebabkan perubahan dalam keluarga. Hipotesis demikian itu memperoleh kekuatan berdasarkan kemungkinan yang wajar. Sudah jelas bahwa kehidupan keluarga Indonesia pada jaman sebelum kemerdekaan berbeda dengan era globalisasi sekarang ini. Pembangunan yang berlangsung sejak dekade 1970-an, secara bertahap melakukan industrialisasi yang mendorong terjadinya urbanisasi. Semakin sempit lahan pertanian di desa dan keterbatasan lapangan kerja, pada umumnya merupakan faktor pemicu mobilitas penduduk dari desa ke kota. Industrialisasi dan urbanisasi tidak hanya mengubah sistem produksi yang menggunakan teknologi maju, melainkan juga berdampak terhadap pola sikap dan perilaku terutama di kalangan generasi muda.

Melalui arus informasi baik melalui media cetak atau elektronik, pengaruh global masuk ke bidang ilmu dan teknologi, seni, gaya hidup, termasuk yang berdampak negatif terhadap kehidupan remaja seperti minuman keras, narkoba dan *free sex*. Semua faktor tersebut terjadi dalam sejarah perkembangan masyarakat di dunia. Industrialisasi dalam arti samar tetapi luas itu memang menyebabkan pola sosial modern dan keluarga ini, tetapi hanya karena adanya persamaan. Hipotesa tersebut terlihat sederhana tetapi memang benar-benar terjadi (Goode, 2007:210). Namun kita harus benar-benar menemukan elemen-elemen industrialisasi mana yang mula-mula memasuki suatu masyarakat dan mempengaruhi pula berbagai bidang kehidupan keluarga.

Penelitian mengenai perubahan keluarga terutama diganggu oleh meratanya mitos mengenai masa lampau. Kebanyakan diskusi mengenai keluarga di Amerika Serikat mengandung mitos yang demikian, yaitu gambaran kehidupan yang serasi dahulu di tanah pertanian kakek yang swasembada namun sedikit sekali penelitian yang mencoba membuktikannya.

Penelitian keluarga dalam periode setelah Perang Dunia ke-2 telah mendokumentasikan satu analisis empiris yang masih kasar di mana prosesnya masih belum jelas dimengerti bahwa di semua bagian dunia dan untuk pertama kali dalam sejarah dunia, semua sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah suatu bentuk sistem keluarga konjugal dan juga ke arah industrialisasi. Sejalan dengan

intuisi para analis sosial selama satu abad ialah penemuan bahwa dengan industrialisasi sistem keluarga tradisional, biasanya sistem keluarga yang diperluas atau gabungan dengan atau tanpa garis turunan atau marga sedang mengalami kehancuran. Sebaliknya, karena setiap sistem dimulai dari titik dasar yang berbeda, arah perubahan pada pola keluarga tertentu mungkin berbeda. Angka perceraian telah menurun selama setengah abad di Jepang, dan untuk waktu yang lebih pendek di beberapa negara Arab (umpamanya Aljazair) tetapi telah meningkat di kebanyakan negara Barat. Umur perkawinan mulai menurun di kebanyakan negara Barat, tetapi meningkat di India, negara-negara Arab dan di antara wanita di Sub Sahara Afrika, tetapi semua sedang menuju pada satu bentuk sistem konjugal (Goode, 2007:216-217).

Dari berbagai literatur sosiologi keluarga, terutama beberapa survei yang dilakukan di Amerika, sebagaimana yang dilakukan oleh Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1996) dapat dibuktikan bahwa sebuah keluarga akan terus ada. Angka perbandingan yang menyatakan bahwa satu dari jumlah pernikahan berakhir dengan perceraian, tidak dapat dibenarkan karena secara tidak langsung mengatakan bahwa setengah dari orang menikah berakhir dengan perceraian. Bahkan salah seorang ahli keluarga lainnya yakin bahwa keluarga batih akan ambruk dan digantikan oleh pasangan bebas berganti-ganti tidak terikat anak, kawan dekat dan tetangga sebagaimana ditemukan pada masa-masa lalu. Sebaliknya, beberapa

ahli keluarga meramalkan bahwa dalam dekade yang akan datang, keluarga akan menjadi semakin terstruktur dan tradisional. Oleh karena itu, keluarga batih akan tetap bertahan karena belum pernah ada masyarakat kompleks yang dapat bertahan tanpa keluarga batih. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai apakah sebuah keluarga akan bertahan. Namun arah perubahan keluarga tidak dapat diramalkan secara pasti.

Saat ini banyak wanita di samping melakukan pekerjaan rumah tangga juga melakukan kerja mencari nafkah. Beberapa alasan yang dikemukakan bagi wanita yang bekerja di luar rumah antara lain (Soedijoprpto, 1983):

- 1) Menambah pendapatan keluarga (*family income*) terutama jika pendapatan suami relatif kecil;
- 2) Memanfaatkan berbagai keunggulan (pendidikan, keterampilan, modal dan relasi) yang dimilikinya yang diharapkan oleh keluarganya;
- 3) Menunjukkan eksistensi sebagai manusia (aktualisasi diri) bahwa ia mampu berprestasi dalam kehidupan masyarakat;
- 4) Untuk memperoleh status atau kekuasaan lebih besar di dalam kehidupan keluarga.

Arief Budiman (1982:25) menempatkan wanita kerja di dalam rumah, pendapat ini mengundang pro dan kontra di kalangan wanita sendiri. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu di Indonesia terdapat

bentuk keluarga konvensional baru, yakni keluarga yang peran istri tetap melakukan tugas rumah tangga, tetapi mereka juga memiliki pekerjaan di luar rumah. Kecenderungan yang meningkat bagi wanita untuk bekerja walaupun telah berumah tangga menentukan bentuk keluarga Indonesia pada masa transisi dari masyarakat agrarian ke masyarakat industri.

Kegiatan wanita di luar rumah akan berdampak negatif jika ia tidak mendapatkan orang lain yang dapat merawat anaknya. Dalam keluarga, apabila anggotanya tidak mampu menjalankan fungsinya yang sesuai dengan peran sosialnya, akan terjadi disorganisasi keluarga yakni berkurangnya komunikasi antar anggota keluarga (*empty shell family*) (Goode, 1976:391). Dampak lain yang ditimbulkan wanita yang bekerja adalah kerawanan dalam komunikasi antara anggota keluarga dan sosialisasi dalam keluarga. Meskipun kualitas pemanfaatan waktu lebih penting daripada kuantitasnya, wanita bekerja perlu menyediakan waktu yang cukup, terutama bagi anak-anaknya. Berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa meskipun pengalokasian waktu untuk pekerjaan di luar rumah dapat menaikkan status dan penghasilan keluarga, status gizi anak-anaknya tidak dapat dijamin menjadi lebih baik, terutama jika pengasuhan anak diserahkan kepada pembantu. Dengan demikian, berkurangnya waktu pengasuhan anak oleh ibu rumah tangga yang berperan ganda memungkinkan rendahnya intensitas pengasuhan anak

sehingga terjadi perubahan pola, peran serta fungsi dalam pengasuhan anak.

Perlu bahasan tentang dampak transisi keluarga terhadap pendidikan nilai dalam keluarga karena pendidikan nilai dalam keluarga dilakukan terutama oleh ibu/istri. Uraian di atas menggambarkan arah perubahan keluarga yang sedang berlangsung. Sebagian orang yang sangat mencemaskan akan menerimanya dengan pasrah dan sebagian lagi mencoba untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang selama ini dianut. Oleh karena itulah, pertanyaan yang penting bukan apakah sebuah keluarga akan mampu bertahan dengan ikatan perkawinan yang kokoh, tetapi, bagaimana keluarga tetap menjadi sebuah keluarga. Di tengah-tengah suami istri yang harus bekerja di luar rumah, angka perceraian yang semakin meningkat, modernisasi yang merupakan hubungan antar anggota keluarga, hilangnya keakraban dan kehangatan dengan lingkungan tetangga dan dunia yang semakin acuh tidak acuh, impersonal dan keras. Sehingga arah perubahan keluarga pasti akan terus berlangsung, hanya saja sulit diramalkan secara pasti arahnya (Goode, 1976).

Arlene S. Scolnick dan Jerome H. Scolnick (1992:1-18) menyebutkan telah terjadi perubahan lebih dari tiga dekade ke belakang pada kehidupan keluarga di Amerika. Preston, 1984 (Scolnick & Scolnick, 1992:1) mengibaratkan sebagai "*an earthquake had shuddered through the American Family*". Tingkat perceraian membumbung tinggi,

munculnya emansipasi wanita, tingkat kelahiran mengalami penurunan. Pergerakan perempuan telah memberikan perubahan cara pikir dan perilaku baik kepada laki-laki maupun perempuan itu sendiri mengenai peran masing-masing baik di dalam rumah maupun di lingkungan luar rumah. Selain itu, kaidah sosial dan perubahan orientasi seksual banyak terjadi di seluruh penjuru dunia. Pasangan yang tidak menikah tapi hidup bersama, perempuan hamil di luar nikah tetapi tetap mempertahankan anaknya, aborsi menjadi hal yang dilegalkan menjadi salah satu pilihan gaya hidup (Scolnick & Scolnick, 1992).

Kembali ke tahun 1950-an, pada umumnya keluarga dianggap sebagai masyarakat kecil yang terdiri dari subsistem yang berstruktur, yakni anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap bagian memiliki hubungan antara satu dan lainnya yang menyatu dalam keluarga. Setiap bagian dari keluarga bersifat fungsional terhadap yang lainnya. Ayah berfungsi untuk mendapatkan penghasilan bagi keluarga dan beban mencari nafkah pun dibebankan kepada ayah. Fungsi laki-laki seperti ini dinamakan sebagai fungsi manifest, yaitu peran yang diharapkan terjadi pada ayah sebagai bagian dari keluarga. Jika fungsi ini tidak dijalankan oleh ayah, akan terjadi fungsi dalam keluarga yaitu fungsi yang tidak diharapkan dalam keluarga yang akan mengakibatkan hilangnya pemenuhan kebutuhan dalam keluarga, dan selanjutnya mengakibatkan disorganisasi dalam keluarga.

Salah satu akibat lahirnya industri di Inggris ialah terbukanya kemungkinan untuk kawin lebih muda; wanita mempunyai lebih banyak anak dan angka kelahiran naik. Hal ini disebabkan munculnya industri memberi kesempatan kepada anak-anak belasan tahun untuk bekerja sambil tetap tinggal di rumah tidak sekedar tinggal di rumah sampai mereka menikah (Goldthorpe, 1992:267).

Studi Michael Anderson (1971:85) tentang kehidupan keluarga di kota kapas Preston di Lancashire dalam abad kesembilan belas menunjukkan hasil yang lain. Berdasarkan berbagai pernyataan dari zaman itu, yang terdapat di dalam buku-buku dan dari bukti-bukti di depan panitia Parlemen, dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan keluarga sedang berantakan dan menghadapi bahaya akan segera hancur karena tekanan-tekanan industrialisasi. Sebuah alasan khusus yang menimbulkan keprihatinan ialah ancaman kaum muda untuk meninggalkan rumah dan tinggal di pondokan-pondokan atau tinggal serumah dengan kawan-kawan agar mereka dapat lebih bebas untuk mengikuti kesenangannya sendiri. Akibatnya dari kebebasan yang terlalu dini ini, dengan sendirinya segala hubungan dengan pengawasan keluarga menjadi kendur sekali. Namun pengamatan hasil sensus di Preston berlawanan dengan gambaran yang terjadi, proporsi kaum muda yang tinggal di rumah bersama orang tua mereka jauh lebih tinggi daripada di desa-desa pertanian di Lancashire. Mereka tetap bekerja di pabrik tekstil, berlawanan dengan hidup rumah tangga sebagai pelayan

yang menjadi tradisi dalam masyarakat pra-industri, dan tetap mengikuti norma daerah-daerah pedesaan di sekitarnya.

Cara lain memanfaatkan hubungan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan baru dalam masyarakat industri ialah meminta nenek untuk menjaga bayi pada saat ibu keluar untuk bekerja. Hal ini biasanya diterima baik oleh nenek maupun para ibu untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan kalau mereka menyerahkan pengawasan anak kecil kepada pengasuh anak yang mengerjakan untuk mencari nafkah.

Anderson (1971) membuktikan, bahwa dalam situasi kehidupan seperti itu pada umumnya hampir sama sekali tidak ada alternatif yang dapat berfungsi untuk menggantikan sistem kekerabatan sebagai sumber bantuan. Hal ini terjadi diakibatkan oleh usaha para kaum muda untuk menyusun dan memelihara kekerabatannya sendiri di kota yang baru, meskipun ada anggapan bahwa terjadinya migrasi merusak ikatan kekerabatan. Kesimpulan dari penelitian Anderson adalah bahwa perubahan pada sebuah keluarga semata-mata bukan hanya disebabkan oleh industrialisasi, mungkin hanya sebagai salah satu faktor saja yang memudahkan terjadinya transisi dalam keluarga.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Norma Sullivan (1991) tentang Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) di era Orde Baru menunjukkan suatu lokasi di mana subjek-subjek individu diproduksi sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas (Philpott, 2003:222-224). Tujuan utama Sullivan, adalah menunjukkan ketidaksetaraan struktural antara laki-laki

dan perempuan di Indonesia kontemporer. Menurut Sullivan, laki-laki memperoleh kekuasaan formal di domain politik publik, sedangkan perempuan di domain privat mempertahankan kekuasaan untuk mengatur serangkaian struktur yang ditetapkan oleh domain publik terhadap domain privat. Dalam hal ini, sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah Orde Baru, laki-laki dan perempuan tidak memiliki peran yang terpisah melainkan peran yang sejajar. Perempuan tidak dapat menentang berlakunya hubungan struktural yang dimunculkan oleh kekuasaan yang timpang.

Etos modernisasi PKK berbias gender karena perempuanlah yang harus menciptakan kondisi yang sehat, disiplin dan teratur untuk memudahkan berjalannya proses modernisasi. PKK membebankan kepada perempuan beberapa tanggung jawab berikut: merawat anak, menggunakan teknik penyiapan makanan yang higienis, menjaga kesehatan seluruh keluarga (secara fisik, mental, spiritual dan moral), menyiapkan anggaran rumah tangga yang efektif, perawatan rumah yang memaksimalkan keindahan dan kebersihan dan mengembangkan sikap keluarga agar sesuai dengan proses modernisasi. Sementara Du Bois (1991) berpendapat bahwa program-program seperti PKK tidak hanya mengindikasikan bahwa manusia dipahami sebagai sumber daya, tetapi juga dipahami sebagai sumber daya yang memerlukan modifikasi, adaptasi dan perubahan (Philpott, 2003:223).

Dengan menyematkan pertanyaan tentang resistensi pada program dan persoalan yang mengarah pada sasarannya , tujuan PKK mengindikasikan dua poin penting. Pertama, bukan semua perempuan yang menjadi target, tetapi perempuan yang ada dalam lokasi sosial tertentu, yaitu keluarga. Keluarga adalah salah satu lokasi di mana subjek dibentuk menjadi sesuai dengan tipe pelatihan tertentu. Du Bois mengungkapkan bahwa:

Jika pelatihan itu diperhatikan, kebanyakan proses pembangunan menggunakan transfer teknologi dan teknik dari agen pembangunan kepada para penerimanya. Dengan teknologi baru, tubuh harus dididik ulang; ia harus masuk ke dalam hubungan baru, bukan hanya dengan sesuatu, tetapi juga dengan pengetahuan baru (bagaimana mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki sesuatu tersebut) dan relasi kuasa yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. (Du Bois, 1991; Philpott, 2003)

Dari penjelasan di atas keluarga di Indonesia memang telah mengalami transisi. Kita selalu membanggakan bahwa sifat kekeluargaan tebal sekali dalam masyarakat kita. Penelitian lain dilakukan di kawasan Rawamangun pada tahun 1987 pada 80 keluarga yang ibunya bekerja dan 80 keluarga di mana ibu tidak bekerja, menunjukkan bahwa yang tinggal bersama memang mempunyai lebih banyak anggota dari satu keluarga batih saja. Namun cukup banyak keluarga di mana terdapat satu atau beberapa kerabat keluarga luas (*extended family*), seperti ayah/ibu dari suami atau istri (semuanya kira-kira 30% dari sampel) (Ihromi, 2004:298).

Jadi untuk Indonesia kelihatannya arti keluarga luas masih tetap besar walaupun perubahan masyarakat telah berlangsung ke arah struktur ekonomi yang industrial. Namun, perempuan dalam keluarga dituntut untuk memasuki hubungan baru dengan jenis pengetahuan dan teknologi tertentu, sehingga mereka juga memasuki hubungan yang baru dengan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

3. Peranan Keluarga sebagai Pendidik Awal Semangat Kebangsaan dan Patriotisme

Goode (1985) mengemukakan bahwa keberhasilan atau prestasi yang dicapai peserta didik dalam pendidikannya sesungguhnya tidak hanya memperlihatkan mutu dari institusi pendidikan saja. Tapi juga memperlihatkan keberhasilan keluarga dalam memberikan anak-anak mereka persiapan yang baik untuk keberhasilan pendidikan yang dijalani. Pendapat tersebut sangat mendasar. Keluarga adalah institusi sosial yang ada dalam setiap masyarakat. Bila berbicara tentang keluarga, biasanya akan langsung mengaitkannya dengan sepasang suami istri beserta anak-anak mereka yang belum menikah, tinggal bersama dalam satu rumah.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, keluarga menjadi instirusi terkuat yang dimiliki oleh masyarakat, karena posisi pertama di dalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Anak yang baru lahir

ibarat sebuah kertas kosong yang bentuk dan coraknya tergantung kepada keluarga bagaimana mengisi kertas tersebut. Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Orang tua mendidik dan membina anaknya agar untuk selanjutnya dapat hidup dalam sebuah masyarakat.

Lewat proses sosialisasi, seorang individu akan menghayati nilai-nilai, norma dan aturan yang dianut kelompok di mana ia hidup. Akhirnya individu tersebut menjadi unik, memiliki seperangkat nilai, kesukaan, ketidaksukaan, tujuan dan maksud, pola reaksi dan konsep yang mendalam dan konsisten tentang dirinya sesuai dengan latar belakang budaya, status sosial keluarga maupun perannya dalam keluarga. Identifikasi anak merupakan identifikasi atas orang-orang berpengaruh dalam proses sosialisasi primernya yaitu orang tua. Termasuk pandangan individu terhadap semangat kebangsaan dan penanaman sikap patriotisme.

Namun demikian, ada suatu kecenderungan bahwa peranan keluarga mulai berubah terutama di kota-kota besar di Indonesia, terutama peranan ibu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar tanggung jawab mendidik diberikan pada seorang ibu. Sejak dilahirkan, peranan tersebut tampak dengan nyata sekali, sehingga nilai-nilai yang tertanam pada diri anak biasanya sama dengan nilai-nilai yang tertanam pada ibu.

Perubahan-perubahan tersebut antara lain disebabkan oleh (Ihromi, 2004):

- a. Kesempatan bekerja yang semakin banyak bagi perempuan.
- b. Kesempatan untuk menempuh pendidikan semakin terbuka lebar
- c. Dibentuk organisasi-organisasi wanita di tempat suami bekerja.

Sudah tentu hal-hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesulitan-kesulitan di dalam melaksanakan proses internalisasi semangat kebangsaan yang ada pada orang tua terutama ibu pada diri anak, karena proses tersebut diserahkan kepada pembantu atau anggota keluarga lainnya yang belum tentu dapat melakukan peranan sebagai ibu dengan baik, akibatnya semangat kebangsaan anak tidak lagi muncul karena proses pendidikan keluarga sebagai pendidik awal tidak berjalan dengan semestinya.

D. SIKAP NASIONALISME DAN PEMUDA DALAM PERUBAHAN SOSIAL

1. Sikap Nasionalisme

Istilah sikap atau *attitude* makin banyak mendapat perhatian dari ahli psikologi dan pendidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari tugas mereka yang tidak dapat dipisahkan dari objeknya yaitu manusia, di mana setiap manusia memiliki sikap tidak sama terhadap objek yang dihadapinya. Meskipun mereka memiliki objek perhatian yang sama yaitu masalah sikap, namun pada kenyataannya terdapat perbedaan

pengertian dan pendekatan yang mereka pergunakan dalam mempelajari sikap. Dengan kata lain, belum ada kesepakatan pendapat mengenai pengertian sikap.

Banyak para ahli mendefinisikan tentang sikap. Saifuddin Azwar (1995; 4) menyatakan bahwa "Sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Objek ini meliputi: symbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan sebagainya".

Sementara itu Krech Crutchfield dan Ballachey dalam Sears (1992; 137) mengartikan sikap sebagai: Suatu sistem yang bertahan lama mengenai penilaian secara positif atau negatif terhadap suatu objek sosial, berkaitan dengan perasaan dan kecenderungan untuk setuju atau tidak setuju terhadap objek sosial itu. Sears juga menyatakan bahwa sikap melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan.

- a. komponen kognitif, berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek.
- b. Komponen afektif, yang menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
- c. Komponen konatif/psikomotor, melibatkan pada salah satu predisposisi untuk bertindak pada objek. Komponen ini berhubungan dengan kecenderungan bertindak.

Apabila individu memiliki sikap yang positif terhadap sesuatu objek, maka ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek itu. Sebaliknya bila ia memiliki sikap yang negatif terhadap sesuatu objek, maka ia akan mengecam, mencela, menyerang bahkan membinasakan. Para ahli psikologi sosial beranggapan bahwa ketiga komponen sikap tersebut berinteraksi secara selaras dan konsisten. Interaksi antara komponen kognisi, afeksi dan konasi tersebut akan menghasilkan sikap total.

Sementara pembahasan mengenai nasionalisme tidak dapat lepas dari *nation* itu sendiri. Ernest Renan melalui tulisannya yang terkenal, *What is a Nation?*, mengatakan, bahwa *nation* adalah jiwa dan semangat yang membentuk sebuah ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Identitas nasional merupakan produksi. kesadaran kesatuan identitas (nasional) tidak pertama-tama muncul berdasar kesadaran akan kesatuan latar belakang budaya, suku, agama, atau golongan sosial, tetapi lebih merupakan "strategi" (produk) sosial-budaya-politik untuk membangun, memproduksi, dan mereproduksi identitas diri (*self-identity*) baru sebagai penegasan terhadap identitas yang diimposisikan kekuatan penjajah. Nasionalisme merupakan wacana untuk menggugat identitas diri yang diimposisikan penjajah, memugar kesadaran diri yang baru, dan menegosiasi pola relasi baru (dengan "penjajah") berdasar kesadaran diri yang baru itu.

Nasionalisme merupakan strategi sosial-budaya-politik yang digunakan sebagai kendaraan untuk melawan imperialisme.

“Sejak kapan konsep “nasionalisme” ini muncul, untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, memang membutuhkan suatu studi tertentu dalam bentuk penelusuran informasi dan fakta secara historis. Akan tetapi jika kita melihat tulisan Erik Hobsbawm yang berjudul “*Nations and Nationalism since 1788*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Nasionalisme Menjelang Abad XXI* (1990) menunjukkan bahwa sejak tahun 1780 konsep “nasionalisme” sudah ada di belahan benua Amerika dan Eropa, atau mungkin telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Bahkan menurut Kohn, bahwa nasionalisme modern terjadi pada abad ke 17 di Inggris, yaitu munculnya kesadaran bangsa Inggris sebagai sebagai bangsa yang memiliki tanggung jawab dan beban atau kedudukan memimpin negara Eropa. Dengan kata lain, nasionalisme di Inggris merupakan penjelmaan semangat abad tersebut dalam hal mengutamakan perseorangan dan hak-haknya. Gagasan ini terlihat dalam filsafat John Locke, yang menekankan bahwa individu beserta kemerdekaan, kemuliaan dan kebahagiaannya tetap merupakan unsur-unsur asasi dari semua kehidupan nasional, dan bahwa pemerintah suatu bangsa adalah suatu kepercayaan moral yang tergantung kepada izin bebas dari yang diperintah. Semangat nasionalisme di Inggris saat itu memasuki semua lembaga dan menciptakan ikatan hidup antar golongan yang memerintah

rakyat (Kohn, 1984:23-24). Selanjutnya, atas pengaruh nasionalisme liberal Inggris, Perancis pada abad 18 berjuang melawan kekuasaan pemerintah yang lebih besar, melawan intoleransi, dan pengawasan dari pihak gereja dan negaranya, yang dikenal sebagai era “*Aufklärung*” (abad pencerahan). Gagasan tentang rasa nasionalisme di Perancis terlihat dalam pikiran J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa masyarakat politik yang sejati hanya dapat didasarkan atas sifat-sifat luhur warganya dan cinta mesranya kepada tanah air. Kemudian, munculnya kemerdekaan dalam dimensi agama, politik, dan sosial di Perancis, merupakan faktor kuat yang menyebabkan lahirnya nasionalisme Amerika pada tahun 1775. Adapun puncak nasionalisme di dunia menurut E.J. Hobsbawm yaitu sekitar tahun 1918-1950 (Hobsbawm,1992:151), sedangkan berakhirnya gelombang nasionalisme menurut Anderson (1999:192) kebanyakan menerpa wilayah-wilayah jajahan di benua Asia-Afrika, dan di Indonesia yaitu pada Zaman pergerakan nasionalisme Syahrir dalam menentang kolonialisme Belanda.

Pengertian nasionalisme menurut Ernest Gellner(via Eriksen 1993:99) adalah suatu prinsip politik yang beranggapan bahwa unit nasional dan politik seharusnya seimbang. Tepatnya, Gellner lebih menekankan nasionalisme dalam aspek politik (lihat juga Habsbawm 1992:9). Lebih lanjut menurut Gellner, jika nasionalisme adalah suatu bentuk munculnya sentimen dan gerakan, baru kita dapat mengerti

dengan baik jika kita mendefinisikan apa itu gerakan dan sentimen. Apa yang dimaksudkan sebagai suatu sentimen adalah secara psikologis merupakan suatu bentuk antipati atau ungkapan marah, benci, dan lain sebagainya (Kartodirdjo 1972:69). Dari penawaran Gellner tersebut mengenai konsep sentimen dan gerakan, nampaknya telah menjadi penekanan dari Anderson dalam melihat nasionalisme.

Seperti dikemukakan oleh Eriksen (1993:100) bahwa Anderson tidak seperti Gellner yang lebih menekankan nasionalisme dalam aspek politik, tapi Anderson justru tertarik untuk memahami kekuatan dan kontinuitas dari sentimen dan identitas nasional. Meskipun berbeda perspektif, akan tetapi keduanya menekankan bahwa bangsa (*nation*) adalah suatu konstruksi ideologi yang nampak sebagai pembentuk garis antara (*defenisi-diri*) kelompok budaya dan *state* (negara), dan mereka membentuk komunitas abstrak berdasarkan perbedaan dari negara *dynasti* atau komunitas berdasarkan kekerabatan yang yang mendahului pembentukan mereka.

Pengertian lain dari nasionalisme dapat disebut sebagai "*social soul*" (K. Lamprecht, 1920), "mental masyarakat" (F.Meinecke, 1901), "sejumlah perasaan dan ide-ide yang kabur" (F.Hertz, 1951), dan sebagai "*a sense of belonging*" (lihat Kartodirdjo 1972 65). Dan beberapa lagi pengertian nasionalisme yang lain, yaitu merupakan produk atau antitesis dari kolonialisme. (Lackner via June Nash dalam *Annual Review of Anthropology Vol.4* 1975:232; Sartono Kartodirdjo,1972:70).

Dari berbagai pengertian di atas tidak terdapat perbedaan yang mendasar, justru menunjukkan persamaan, yaitu semuanya lebih bersifat sosio-psikologis. Ini berarti nasionalisme sebagai suatu bentuk respon yang bersifat sosio-psikologis tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi lahir dari suatu respon secara psikologis, politis, dan ideologis terhadap peristiwa yang mendahuluinya, yaitu imperialisme (kolonialisme). Jika demikian halnya, maka awal terbentuknya nasionalisme lebih bersifat subjektif, karena lebih merupakan reaksi “*group consciousness*”, “*we-sentiment*”, “*corporate will*”, dan berbagai fakta mental lainnya (Kartodirdjo, 1972:65).

Lebih lanjut, Kartodirdjo (1972:65-69) mengatakan bahwa, dari sekian jumlah penggunaan istilah di atas umumnya tidak jelas, sebab semuanya merupakan komponen-komponen keadaan jiwa dan fikiran yang tidak dijelaskan secara rinci perbedaannya. Dengan demikian, akan mengalami kesulitan dalam menggunakannya sebagai terminologi maupun konsep analitis untuk mencari struktur dan sifat-sifat nasionalisme itu sendiri.

Secara analitis, nasionalisme mempunyai tiga aspek yang dapat dibedakan, pertama aspek *cognitive*, yaitu menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi atau fenomena, dalam hal ini adalah pengetahuan akan situasi kolonial pada segala porsinya; aspek *goal/value orientation*, yaitu menunjukkan keadaan yang dianggap berharga oleh pelakunya; dalam hal ini yang dianggap sebagai tujuan

atau hal yang berharga adalah, memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme; aspek *affective* dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelakunya. Misalnya berbagai macam diskriminasi pada masyarakat kolonial melahirkan aspek *affective* tersebut (Kartodirdjo, 1972: 65-66)

Masih menurut Kartodirdjo (1972:64) bahwa nasionalisme sebagai fenomena historis, timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik ekonomi dan sosial tertentu. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan adalah munculnya kolonialisme dari suatu negara terhadap negara lainnya. Hal ini terjadi sebab nasionalisme itu sendiri muncul sebagai suatu reaksi terhadap kolonialisme, reaksi yang berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus menerus. Dan hal ini tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi sosial dan kultural (Kartodirdjo, 1972:56-57).

Gerakan-gerakan yang bersifat nasional yang muncul menentang kolonialisme, dan berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu tersebut didorong oleh semangat nasionalisme. Sebagai bukti dari pernyataan tersebut, dapat kita lihat dalam buku Benedict Anderson (1999) yang berjudul *Komunitas-Komunitas Imajiner: renungan tentang asal usul dan penyebaran nasionalisme*. Dalam bukunya tersebut Anderson memfokuskan diri pada munculnya nasionalisme di kawasan Asia selama 107 tahun, yaitu dari tahun 1892 yang dimulai di Filipina

hingga berakhir pada tahun 1999 di Indonesia (gerakan Timor Leste) dan Makau (Hongkong). Apa yang ditunjukkan oleh Anderson dalam studinya tersebut, yaitu munculnya gerakan-gerakan nasional untuk memisahkan dan memerdekakan diri dari negara yang dianggap kolonial, sebagai suatu bentuk kesadaran nasional untuk membangun sebuah *nation state* yang baru.

Ruslan Abdul Gani (1964; 13) mengatakan nasionalisme mencakup patriotisme, namun lebih kuat dan mencakup tuntutan-tuntutan untuk bertindak dengan tujuan untuk memperkuat negara. Dengan demikian seorang nasionalis pastilah seorang patriot.

Hans Kohn (1965; 9) sejarawan yang sangat terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme memberikan definisi yang hingga kini tetap digunakan dalam pengajaran di sekolah-sekolah, dalam teks-teks dan monografi : "*Nasionalism is a state of mind, in which the supreme loyalty of individual is felt to be due to the nation state.*" Artinya nasionalisme adalah suatu paham, yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (*nation state*). Dalam definisi tersebut terkandung makna perjuangan nasionalisme untuk melepaskan diri dari aneka bentuk ikatan dan dominasi kekuasaan sosial dan politik lama seperti suku bangsa, raja feodal, negara kota, kerajaan dinasti, untuk kemudian menyerahkan kesetiaan tertingginya (*supreme loyalty*) kepada negara kebangsaan

(*nation state*) yang lebih menjamin rasa aman, keselamatan dan kesejahteraan.

Orientasi nilai-nilai sebagai ajaran moral semakin perlu pada jaman modern ini, hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan-perubahan itu terjadi di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua sendi-sendi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi dan globalisasi. Tidak ada dimensi kehidupan yang tidak terkena oleh perubahan tersebut. Rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, materialisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, pluralisme, serta sistem pendidikan modern, secara bersama-sama telah mengubah lingkungan social-budaya dan rohani di tanah air.

Dalam pidato "Lahirnya Pancasila", 1 Juni 1945, Bung Karno menegaskan: nasionalisme bangsa Indonesia bukanlah nasionalisme yang sempit melainkan nasionalisme yang "terbuka" dan "hidup subur" dalam "tamansari internasionalisme". Dalam konteks abad ke-21, kita tetap memegang prinsip dasar yang diletakkan Bung Karno dengan menerapkan nasionalisme dalam wujud yang terbuka, percaya diri dan berlandaskan dasar negara, Pancasila. Nasionalisme yang berlandaskan hati terbuka dan percaya diri serta yang hidup subur dalam "tamansari Internasionalisme" abad 21 dikenal sebagai globalisasi.

Sikap dasar nasionalisme generasi kelahiran tahun 1920-an, 1930-an, 1940-an dan 1950-an dibentuk dalam era "tamansari

internasionalisme" yang relatif lebih sederhana. Generasi ini seringkali merasa bahwa "rasa kebangsaan" atau "kepribadian bangsa" atau pun "nilai moral" kini terasa makin 'melemah', "luntur", atau pun "surut". Tidak sedikit di antara mereka yang menyatakan, bangsa Indonesia telah "kehilangan pegangan hidup" dan "sudah terpuruk".

Sebaliknya, generasi kelahiran 1960-an, 1970-an, apalagi 1980-an dan 1990-an dikenal sebagai generasi pascakomputer. Sikapnya dibentuk melalui proses bagaimana mengaitkan "nasionalisme", "kedaulatan nasional", "kepribadian bangsa" dalam "taman sari Internasionalisme" abad ke-21 yang lingkup, deras kecepatan, serta daya tembusnya jauh lebih dahsyat daripada "internasionalisme" 60 tahun silam.

Jelaslah, konteks penerapan "nasionalisme" dalam "tamansari internasionalisme" tahun 2000-an harus mengacu kepada kenyataan yang berbeda dibandingkan dengan kenyataan hidup kurun waktu tahun 1940-an. Wacana perbedaan tentang prinsip dan penerapan "kebangsaan" dan "globalisasi" belum lama ini kita saksikan dalam perdebatan tentang "kedaulatan" yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi dan pertahanan RI-Singapura. Juga dalam perdebatan tentang "hegemoni kapitalisme asing" berkenaan dengan kebijakan ekonomi-moneter atau tentang daftar negatif investasi asing yang baru-baru ini diumumkan.

Ungkapan emosional, seperti "kedaulatan kita dicabik-cabik", "Indonesia ditipu Singapura" (dalam hal perjanjian RI- Singapura), dan "Indonesia menjadi gundik kapitalisme global", "menjual diri kepada kepentingan kapitalis asing" (dalam hal pengumuman daftar negatif investasi), mencerminkan akan perlunya kita mengkaji ulang penerapan prinsip "nasionalisme" dalam "tamansari internasionalisme" abad ke-21.

Presiden Yudhoyono berkali-kali menegaskan globalisasi adalah keniscayaan yang harus kita terima dengan segala konsekuensinya, akan tetapi, selama kita berpegang pada empat prinsip dasar nasionalisme Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita tegar menerapkan kebangsaan dan kedaulatan dalam konteks kenyataan internasionalisme abad ke-21.

Penerapan nasionalisme dengan kenyataan internasionalisme sekarang, semestinya bangsa kita, terutama yang terdidik, tidak perlu gusar, khawatir apalagi kehilangan kepercayaan diri menghadapi tamansari internasionalisme abad ke-21. Dalam hal perjanjian ekstradisi dan pertahanan RI-Singapura, misalnya "kedaulatan nasional" kita dijamin secara yuridis formal melalui piagam PBB (kedaulatan dan kemanusiaan), Deklarasi ASEAN 1967 (kedaulatan dalam kerjasama), Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama ASEAN 1976 (identitas regional seiring dengan kedaulatan bangsa), Konvesi Hukum Laut 1982 (kedaulatan laut teritorial dan prinsip kepentingan warisan bersama

internasional). Deklarasi Bangkok 1992 tentang Asia Tenggara Bebas Senjata Nuklir (keamanan Asia Tenggara berhadapan dengan negara pemilik senjata nuklir) dan Deklarasi ASEAN 2004 tentang masyarakat Keamanan ASEAN. Semua prinsip tadi masuk dalam "payung hukum" perjanjian kerjasama RI-Singapura.

Dalam hal kedaulatan substansial (sering disebut kedaulatan nisbi atau kedaulatan efektif) sudah barang tentu prinsip kedaulatan nasional diuji di lapangan melalui perbandingan nyata kekuatan politik, ekonomi, sains teknologi, budaya, hukum yang dimiliki masing-masing negara.

Kekuatan teknologi militer Singapura lebih besar dan tangguh daripada Indonesia. Anggaran pertahanan Singapura adalah 4,5 miliar dollar AS per tahun, Indonesia hanya 3,3 miliar dollar AS setahun. Karena itu, melalui perjanjian pertahanan Indonesia menetapkan aturan pelaksanaan perihal di mana, kapan, berapa sering, jenis alat utama yang diperkenankan Indonesia kepada Singapura bila berlatih di wilayah latihan militer. Dengan kata lain kita tetap punya kedaulatan menentukan penggunaan ruang Indonesia untuk tiap jenis latihan.

Tokoh nasionalis, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Tan Malaka, Sutan Syahrir dan Sam Ratulangi, awal 1940-an meramalkan, seluruh wilayah Pasifik, termasuk Asia Tenggara, akan didominasi kekuatan politik ekonomi dan militer Amerika. Namun, selama Perang Dingin, meskipun ada rangkaian perjanjian pertahanan Amerika dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Asia Tenggara sampai ke Australia-

Selandia Baru (ANZUS), Indonesia tetap berpegang pada kedaulatan formal untuk tidak bergabung sebagai sekutu Amerika.

Perjanjian pertahanan RI-Singapura mencantumkan latihan kerjasama dengan pihak ketiga harus seijin Indonesia. Dengan kata lain, seraya mengakui bahwa Amerika Serikat secara nyata sudah "lama hadir" di kawasan Asia Tenggara (termasuk Singapura dan Indonesia), namun kehadirannya itu harus mendapat persetujuan formal kita selama di perairan kita. Dengan demikian kita tidak perlu menebar perasaan emosional seperti "hegemoni Amerika dihadirkan melalui kerja sama RI-Singapura".

Demikian pula dengan "kapitalisme global" atau "kapitalisme liberal" yang dihadirkan Amerika di kawasan Pasifik. Setiap bulan perputaran uang, modal, investasi dan perdagangan antar negara Asia Pasifik berjumlah lebih dari 800 miliar dolar AS, 400 miliar dollar AS diantaranya berasal, berputar dan berbalik arah ke Amerika, 80 miliar dollar AS dilakukan di Singapura, 70 dollar miliar di Hongkong. Selebihnya sekitar 250 miliar dollar AS dilaksanakan antara Jepang, China dan Korea Selatan. Inilah adalah kenyataan ekonomi keuangan abad ke-21.

Bursa efek Jakarta dan Surabaya terlalu kecil untuk dapat bermain efektif menghadirkan "kedaulatan ekonomi-keuangan" dalam perputaran modal, uang, investasi, dan perdagangan yang demikian deras dan luas. Karena itu, retorika ekonomi populis tentang "kapitalisme

korporasi global" atau tentang "hegemoni Bank Dunia/IMF" harus diubah dengan "nasionalisme terbuka dan percaya diri" abad ke-21. Retorika 'kalah perang sebelum bertarung' dengan menggunakan retorika ekonomi populisme 1970-an dan 1980-an tidak membantu mengatasi kemiskinan.

Saatnya mengkaji ulang dan menerapkan dengan hati dan pikiran terbuka sesuai dengan hati dan pikiran terbuka sesuai dengan pesan Bung Karno, yakni menerapkan "nasionalisme" "terbuka dan percaya diri" betapa pun kuatnya "tamansari internasionalisme" abad ke-21 dibidang politik, ekonomi, sains teknologi, budaya, militer, maka sebagai bangsa, sebagai negara, dan sebagai budaya harus menyambut pertautan abadi "nasionalisme" dan "internasionalisme" sekarang dengan sikap berani dan percaya diri. Bukan dengan ungkapan kekusaran, ketakutan dan pikiran sempit yang justru berlawanan dengan semangat Bung Karno 62 tahun lalu (Sudarsono, 2007; 7).

Namun, terlalu besar percaya diri dan sikap berani kalau tidak disertai kemajuan ekonomi, iptek, sikap budaya yang lemah juga menyudutkan Indonesia di forum dunia. Indonesia sudah tidak menarik bagi investasi modal karena biaya ekonomi tinggi akibat korupsi di mana-mana, upah *buruh* menjadi mahal karena demonstrasi terus menerus, sekarang ditambah listrik dipadamkan bergilir (*inefficiency*), maka Indonesia tidak menarik lagi bagi investasi asing/global. Akibatnya

modal pembangunan semakin sulit, ekonomi terpuruk dan menjadi *"the loser"* dalam kompetisi global.

Nasionalisme yang tidak didukung kemajuan iptek, etos kerja tinggi, pola hidup sederhana dan sikap yang tidak hedonistis akan mengakibatkan nasionalisme itu tersebut tidak *survival*.

Frans Magnis Suseno (1987; 144) mengatakan Dalam transformasi ekonomi, sosial, budaya, dan intelektual tersebut nilai-nilai budaya lama harus menghadapi nilai-nilai modern yang cenderung disenangi atau dipilih oleh masyarakat. Dalam konteks seperti inilah, maka orientasi nilai-nilai moral sangat diperlukan, agar tidak kehilangan arah, dan dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja berubah. Dengan demikian akan tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sangat diperlukan upaya penanaman sikap nasionalisme dalam era globalisasi sekarang ini. Dengan demikian memungkinkan tumbuhnya kesadaran dan sikap positif mahasiswa dalam dimensi kehidupan sehari-hari.

Nasionalisme dipahami oleh banyak orang sebagai pisau bermata dua, di satu sisi merupakan hal positif yang patut dimiliki oleh seseorang tentang negaranya, di sisi lain merupakan hal negatif yang dibenci oleh orang lain yang merasakan akibat buruk dibalik rasa nasionalisme yang berlebihan. Sebagai contoh semangat nasionalisme bangsa Amerika merupakan kebanggaan bangsa Amerika, tetapi merupakan momok bagi

bangsa yang menjadi sasaran semangat kebangsaan Amerika itu. Karena itu definisi nasionalisme menjadi beragam sesuai dengan perspektif ahli yang mendefinisikan

Menurut *catatan countrywacth.com* : *“Nationalism is an important social and political phenomenon that involves the process of making a nation or a nation-state into a definable identity”*. Sejalan dengan itu menurut Greenfield dan Chirot dalam Karim (1996) dinyatakan bahwa nasionalisme adalah seperangkat gagasan atau sentimen yang membawa kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersamaan dengan berbagai identitas lain seperti pekerjaan, agama, suku, bahasa, teritorial, kelas, gender, dstnya.

Ditinjau dari perspektif penjajah dan terjajah pengertian nasionalisme saling bertentangan. Bagi bangsa yang dijajah nasionalisme merupakan semangat kebangsaan yang muncul sebagai reaksi terhadap penjajah, seperti konsep nasionalisme pada negara-negara terjajah di abad yang lalu. Lain halnya dari perspektif imperialis, seperti dijelaskan Nangegast (Karim,1996) dalam uraiannya tentang asal usul nasionalisme Eropa termasuk Amerika. Nasionalisme merupakan istilah modernitas yang ada di Eropa dan Amerika, yang diturunkan dari jaman pencerahan dalam kondisi rasionalisme, perluasan penjajahan, peperangan agama, dan kapitalisme liberal yang berfungsi sebagai pembenaran politik dan legitimasi politik untuk konsep penyatuan teritorial, politik, dan budaya yang dipaksakan oleh hegemoni pemikiran

dan organisasi liberal. Bahkan Orwell (2002) seorang sastrawan mengatakan dalam catatannya tentang nasionalisme bahwa nasionalisme sesuatu yang berkaitan dengan power, yang menempatkan diri penganutnya merasa lebih dari orang lain.

Perspektif yang berbeda ini menjadi mudah dipahami dengan melihat sejarah singkat nasionalisme yang dipaparkan dalam *countrywacth.com* (2002). Secara historis sebelum kelahiran negara bangsa atau tepatnya di zaman peradaban kuno (2000 tahun yang lalu), di mana wilayah kekuasaan di bawah imperium, masyarakat mengikatkan dirinya tidak dengan negara tetapi dengan kekuasaan raja-raja feodal. Namun kemudian perang berkecamuk di mana batas-batas wilayah menjadi kabur, dan para penguasa memegang kekuasaan dengan hukum rimba. Hanya kemudian di akhir abad 18 ketika gagasan negara -bangsa mulai dikenal di Amerika Utara, Amerika Latin, dan Eropa Barat dimana parameter keterikatan diri dan kesejahteraan di hubungkan dengan negara. Pada abad ke 19 dapat dilihat gagasan ini dengan "*geist*" dan "*homeland*" di Jerman. Di lain pihak ketika kolonialisme berkembang di belahan bumi barat dan timur, model khusus dari negara- bangsa diekspor ketempat penjajahan, di mana kekuatan penjajah memecah belah daerah jajahan. Kemudian pertengahan abad 20 banyak negara terjajah dipengaruhi oleh api nasionalisme membawa kepada upaya merebut kemerdekaan mereka. Dewasa ini semangat nasionalisme muncul dalam bentuk lain dengan

semangat kelompok yang tinggi menjadikan negara yang bersatu terpecah belah seperti India, Pakistan, dan Yugoslavia.

Mengapa nasionalisme dapat menjadi pemersatu bangsa, tetapi kemudian menjadikan bangsa itu terpecah lagi. Dapat dilihat dari pendapat Karim (1996) yang melihat nasionalisme dapat memainkan tiga fungsi yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada dalam kursi utama ideologi nasional. Artinya ketika satu masyarakat tidak dapat tunduk dengan ikatan mental satu kelompok, mereka akan mencari ikatan lain yang lebih sejenis. Begitu seterusnya untuk kemudian berusaha merebut pengaruh sebagai kelompok yang dominan.

Dewasa ini dengan gelombang globalisasi di mana negara-bangsa menjadi entitas warga supranasional, dan gelombang imigrasi yang pesat ke negara-negara maju lengkap dengan identitas etnisnya, mengakibatkan identitas nasional suatu negara-bangsa yang selama ini menjadi landasan semangat nasionalis semakin kabur. Para nasionalis yang selama ini mengganggu satu negara-bangsa dengan satu identitas menjadi kehilangan pegangan, karena tidak satupun identitas yang dominan dalam masyarakat. Sebaliknya yang terus tumbuh adalah masyarakat multi identitas. Kasus seperti ini yang di alami Amerika saat ini. Seorang eksponen liberal bernama Schlesinger (Rex, 1996) mengungkapkan bahwa saat ini Amerika sedang dalam bahaya

perpecahan, dengan munculnya ideologi kelompok radikal dari African American, dan munculnya bahasa Spanyol sebagai bahasa alternatif dalam komunikasi massa.

Mendesak untuk dicermati reaksi-reaksi yang bermuatan nasionalistis, misalnya tentang pengiriman ribuan tentara ke Aceh hingga usulan pemutusan hubungan diplomatik dengan Swedia berkaitan dengan penumpasan Gerakan Aceh Merdeka. Demikian pula pemaksaan oleh sejumlah orang terhadap sejumlah aktivis *Kontras* untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. "Litsus" terhadap aktivis *Kontras* itu berakhir dengan kekerasan ketika aktivis tersebut tidak hafal menyanyikan lagu kebangsaan dan dianggap "anasionalis". Kurun waktu sebelumnya, juga muncul reaksi keras sejak "lepasnya" Timor-Timur hingga proses peradilan HAM bagi sejumlah perwira TNI/Polri.

Ilustrasi itu sekedar memberikan gambaran tentang artikulasi sentimen nasionalisme Indonesia yang semakin menguat. Bangkitnya sentimen nasionalisme semacam itu tentu saja mengingatkan atas sikap dan praktik Orde Baru di masa lalu yang kerap melontarkan jargon "demi persatuan dan kesatuan". Persoalannya di sisi lain, tidak kalah derasnya juga muncul aspirasi untuk mengubah watak dan praktik politik Orde Baru melalui upaya penegakan demokrasi dan HAM. Jika demikian, bagaimana meletakkan nasionalisme yang demokratis dan menghormati harkat martabat manusia.

Nasionalisme sering diartikan sebagai sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa dan negaranya. Namun secara empiris, nasionalisme tidak sesederhana definisi itu. Nasionalisme tidak seperti bangunan statis, tetapi selalu dialektis dan interpretatif, sebab nasionalisme bukan pembawaan manusia sejak lahir melainkan sebagai hasil peradaban manusia dalam menjawab tantangan hidupnya. Terbukti dalam sejarah Indonesia, misalnya, nasionalisme beberapa kali mengalami penafsiran ulang sesuai dengan perkembangan basis materialnya.

Nasionalisme pada prakemerdekaan disebut nasionalisme gelombang pertama (1908-1928) (Widodo Dwi Putro. 2003; 4) semula dipahami sebagai manifestasi patriotisme radikal untuk melawan imperialisme dan kolonialisme. Nasionalisme kemudian dipandang sebagai *renaissance* bangsa-bangsa terjajah untuk bangkit memerdekakan diri.

Semangat nasionalisme di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya, bila diusut ke belakang, selain dimatangkan oleh keadaan (kolonialisme), juga lepas dari pengaruh kebangkitan nasionalisme yang tumbuh di Eropa pada abad ke-18 dan 19. Di belahan Eropa saat itu, setelah Perang Dunia I, Prusia (Jerman) yang kalah perang merasa sebagai bangsa terhina, terutama oleh kemenangan Perancis. Sejak itu filsafat Jerman yang mengajarkan nasionalisme seperti yang

dikemukakan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan Bismarck mendapat tempat dalam pemikiran masyarakat Jerman.

Nasionalisme gelombang kedua (1928-1945), setelah Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad pertengahan, mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme abad pertengahan itu banyak mempengaruhi kalangan terpelajar Indonesia, misalnya, Soepomo sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat (*Ein Totaler Furherstaat*) dan persatuan negara dalam seluruhnya (*das Ganze der politisschen einheit des Volkes*). Demikian pula, pada masa ini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti *Indonesia Raya*, *Dari Sabang Sampai Merauke*, *Padamu Negeri* dan sebagainya. Selain Soepomo, Hatta, Sutan Syahrir pun sudah aktif berdiskusi tentang masa depan negaranya, ketika mereka masih belajar pada tahun 1920-an, atas beasiswa politik-etis balas budi-nya penjajah Belanda. Mereka inilah di masa pra & pascakemerdekaan yang nantinya banyak aktif berkiprah menentukan arah biduk kapal Indonesia.

Di negeri sendiri, Soekarno sejak remaja, masa mahasiswa bahkan setelah lulus kuliah, terus aktif menyuarakan tuntutan kemerdekaan bagi

negerinya, lewat organisasi-organisasi yang tumbuh di awal abad 20. Soekarno menjadi penghuni langganan penginapan gratis di penjara Sukamiskin dan penjara-penjara yang lainnya. Dua puluh tahun setelah kebangkitan nasional, kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti *Jong Java*, *Jong Celebes*, *Jong Sumatera* dan sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menggelar Sumpah Pemoeda di tahun 1928.

Meskipun demikian, pada masa Soekarno dan Soeharto letupan-letupan kecil di daerah selalu dapat diselesaikan secara mudah dengan mendatangkan militer. Terutama pada rezim Orde Baru, kata "persatuan" dan "kesatuan" menjadi senjata ampuh untuk meredam gerakan separatisme. Siapapun yang dicurigai membahayakan persatuan dan kesatuan kendati hanya bersifat protes akan hadapi ancaman pidana subversif. Pada rezim Orde Baru, nasionalisme dalam tafsir "persatuan" dan "kesatuan" mencapai kemapanan.

Ketika rezim otoritarian tumbang, nasionalisme yang dipaksakan dari satu pusat kekuasaan mengalami anomali, bahkan kemudian terperangkap dalam krisis yang berkepanjangan. Dalam sekejap stabilitas berubah menjadi kerusuhan di mana-mana. Kerusuhan meletus mulai dari Situbondo, Pekalongan, Ketapang, Mataram, Sampit, Ambon hingga Poso yang telah mengoyak nasionalisme yang

sebelumnya pernah mapan tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa ada sesama bangsa, bahkan antar tetangga yang dulu hidup rukun tiba-tiba saling menghabisi hanya karena perbedaan agama, etnik, dan sebagainya.

Ternyata nasionalisme yang dibangun dengan memaksa bergabungnya suku-suku sebagai satu kesatuan bernama bangsa tidak dengan sendirinya mampu memendam kesadaran etnik masing-masing kelompok. Pendekatan keamanan memang pernah menciptakan stabilitas dalam waktu yang relatif panjang, namun biaya sosialnya terlalu mahal untuk dibayar. Nation State yang dijaga dengan laras senapan, ibarat api dalam sekam. Begitu keseimbangan sosial absen, terutama dengan jatuhnya rezim otoritarian, potensi laten konflik komunal itu bangkit kembali.

Pada nasionalisme gelombang ketiga (1966-1998), negara tidak sekukuh keadaan seperti beberapa puluh tahun sebelumnya. Persatuan dan kesatuan yang pernah dibangun pada nasionalisme gelombang kedua berada pada posisi yang pelik, yaitu harus menghadapi resistensi yang terus menderas dari bawah ke atas seperti apa yang mereka sebut gerakan kemerdekaan (seperti *Gerakan Aceh Merdeka*, *Papua Merdeka*, *Riau Merdeka* dan *Timor Timur Merdeka*) di tengah krisis dan ketergantungan luar biasa dari bantuan asing. Pada Agustus 1999 negara tidak mampu menahan terjadinya referendum di Timor Timur

yang ternyata hasilnya 80 persen rakyat Timor Timur menolak "hidup bersama" dengan rakyat Indonesia.

Pada fase Nasionalisme gelombang keempat (1998-..), Nasionalisme yang perlu diwujudkan nasionalisme yang humanis dan dapat menjadi rekan sejawat demokrasi. Tentu saja dalam konteks ini gagasan nasionalisme gelombang keenam ini tidak dapat dibebankan pada pundak pejabat negara, perwira militer, atau kalangan intelektual saja, tetapi juga perlu mendengar dan merekam suara masyarakat akar rumput yang selama ini tidak tersuarakan. Nasionalisme gelombang keempat (1998) yang perlu didorong bukan yang asal besar dan asal bersatu ala Milosevic, melainkan nasionalisme yang humanis dan dapat menjadi rekan sejawat demokrasi. Tentu saja dalam konteks ini gagasan nasionalisme gelombang keempat tidak saja dibebankan pada pundak pejabat negara, perwira militer atau kalangan intelektual, tetapi juga perlu mendengar dan merekam suara masyarakat akar rumput yang selama ini tidak tersuarakan. Itu semua kalau negara dan bangsa ini tidak berujung pada kebangkrutan (Widodo, 2003: 4)

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa antara nasionalisme, bangsa/negara dan kewarganegaraan/kebangsaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Turner (1986) mengaitkan nasionalisme dengan fenomena kewarganegaraan (*citizenship*). Dalam pengertian ini, nasionalisme dipahami sebagai bagian dari persoalan pengembangan hak dan kewajiban warga negara, yaitu menggalakkan

partisipasi sosial dalam suatu komunitas tertentu sebagai anggota yang sah dan legal. Di sisi lain, keterkaitan antara nasionalisme, kewarganegaraan dan bangsa selalu terjalin, sebab masyarakat sebagai warganegara yang sah dari suatu bangsa hanya dapat eksis dan survive jika mereka mampu membangun dan menjaga keutuhan bangsanya. Untuk menuju kearah tersebut, maka kesadaran dan sentimen kebangsaan atau kebanggaan terhadap bangsa yang dimiliki haruslah menyangkut bangsa yang mengakui kita sebagai warga negara yang sah dan legal.

Meskipun demikian, kesadaran, sentimen dan nasionalisme kebangsaan itu tidak hanya dapat dikembangkan secara subyektif dari individu atau kelompok tertentu, akan tetapi dapat pula dikembangkan secara struktural, yaitu melalui kebijakan politik dan strategi politik. Dalam hal ini sangat terkait dengan kekuasaan, sebab politik itu sendiri terkait dengan kekuasaan, sedangkan kekuasaan selalu berurusan dengan pengendalian negara. Jika demikian halnya, munculnya gerakan nasionalisme baru seperti sekarang ini, dianggap terkait dengan kekuasaan dan politik. Oleh sebab itu, jika nasionalisme dalam kerangka nasional dikaitkan dengan nasionalisme dalam perspektif lokal atau bersifat kesukuan yang keluar dari kerangka nasional itu sendiri, oleh pemerintah pusat dan hukum yang berlaku dianggap sebagai gerakan “separatisme” yang mencoba merongrong integrasi bangsa. Namun demikian, perlu pula dipahami bahwa gerakan yang dianggap separatis

itu kemunculannya lebih disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan politik/ekonomi. Oleh sebab itu, baik nasionalisme, kekuasaan maupun politik haruslah ditempatkan dalam kerangka yang sejalan kepentingan nasional, dan tetap dipandang sebagai suatu hal yang bersifat dinamis.

Namun mengapa sekarang ini banyak pihak yang mulai meragukan nasionalisme, terutama dalam konteks globalisasi, sampai perlu tercetus istilah "pasca nasional-isme". Apakah itu cuma kegenitan intelektual ataukah sungguh-sungguh eksis atau bersifat futuristik. Clifford Geertz (1992) melihat memang ada kecenderungan patologis pada masyarakat modern ketika nasionalisme diangkat ke taraf supremasi politik. Dikatakannya bahwa "Dalam kadar yang meningkat, kesatuan nasional dipelihara tidak dengan berteriak kepada darah dan tanah melainkan dengan sebuah kesetiaan yang samar-samar, timbul tenggelam, dan rutin pada sebuah negara sipil, yang dilengkapi kurang lebih dengan penggunaan kekuatan-kekuatan polisi pemerintah dan desakan ideologis."

Nasionalisme telah kehilangan kekuatannya karena bersifat ideologis dan dipaksakan. Lebih tepat dikatakan bahwa nasionalisme telah dicemari berbagai kepentingan di luar nasionalisme itu sendiri, yaitu ketika dia tinggal retorika politik belaka dengan argumen historistik sehingga menutup dirinya untuk diartikulasikan dalam konteks kekinian. Nasionalisme dibelenggu dalam sejarah dan secara pesimis dianggap romantisme masa lalu.

"Negara anda sudah merdeka. tetapi apakah bangsa anda juga sudah merdeka?" tanya Rendra. Itulah pertanyaan sesungguhnya. Bukan pada masih ada tidaknya nasionalisme tapi pada "kemerdekaan" yang menyertai semangat nasionalisme itu sendiri. Apa yang diperjuangkan rakyat Indonesia dulu adalah kemerdekaan diri, kedaulatan dirinya di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia. Nasionalisme adalah motif dan pembenaran atas Revolusi Indonesia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuannya. Merdeka dari segala bentuk penindasan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keraguan terhadap nasionalisme bukanlah penolakan. Dia adalah sebuah kritik-diri terhadap kedaulatan bangsa dan cita-cita 28 Oktober 1928 dan 17 Agustus 1945. Kritik ini ingin membongkar kepalsuan "nasionalisme" yang cuma berhenti di tingkat buku sejarah formal dan pidato basa basi. Nasionalisme bukan sekedar ortodoksi tapi harus ditransformasikan menjadi ortopraksi. Revitalisasi dan realisasai nasionalisme adalah locus dari diskursus nasionalisme itu sendiri.

Negara Indonesia sudah merdeka, itu sudah jelas. Apakah bangsa Indonesia sudah merdeka, Negara dan (ke)bangsa(an) tidaklah sama. Negara bangsa selalu berdasarkan pada kebangsaan, tapi kebangsaan dapat ada tanpa negara kebangsaan. Nasionalisme mendahului negara, sebagaimana Sumpah Pemuda mendahului Proklamasi 1945. Proklamasi sudah kita lewati, apakah cita-cita

nasionalisme sudah tercapai? Bukankah UUD 1945 menegaskan bahwa (Proklamasi) mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tentu ini bukan sebuah rekaman peristiwa, tapi sebuah cita-cita nasionalisme yang kembali dipertegas. Nasionalisme harus diletakkan kembali pada jalur utamanya: pendorong ke arah kemerdekaan.

Nasionalisme bukanlah nasionalisme sempit yang membela bangsa apapun alasannya. "*Right or wrong is my country*" adalah sentimen berlebihan atas bangsa yang dapat berbuah rasialisme dan memperkosa kemanusiaan dan kebenaran. Nasionalisme tidak sekedar mengabdikan pada sebetuk negara politis semata-mata, tapi lebih pada bangsa dan nasib masyarakat di dalamnya. Dengan demikian kemanusiaan adalah panutannya, dan ke-Tuhanan adalah dasarnya. Nasionalisme tidak mati, dia hidup di hati rakyat Indonesia, termasuk pemudanya. Ada baiknya kita simak pernyataan "Sumpah mahasiswa" di era 1980-an ini yang mengaku bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. berbahasa satu, bahasa kebenaran."

Tiga poin pokok yang muncul (tanpa penindasan, keadilan, dan kebenaran) adalah diskursus nasionalisme masa kini yang menghadirkan kembali seruan kritis para pendahulu bangsa. Adalah betul bahwa para pemuda generasi sekarang tidak mengalami masa

penjajahan dan revolusi, tapi adalah naif bila dikatakan bahwa mereka tidak dapat berempati atas pengalaman itu dan tercerabut dari nasionalisme. Dulu adalah dulu dan sekarang adalah sekarang. Tapi pengalaman nasionalisme dulu pun hadir di masa sekarang meski berbeda dalam wujud dan strukturnya. Perjuangan atas cita-cita nasionalisme belumlah berhenti, tapi disambut oleh generasi sekarang untuk meneruskannya.

Nasionalisme, dalam perspektif sejarah, menunjukkan perkembangannya sangat pesat. Jika abad 19 sering disebut abad “Nasionalisme Eropa”, maka pada abad ke 20 nasionalisme telah menjadi *a universal idea-force* dalam kekuatan sejarah global kontemporer, bahkan sebagai abad *pan nasionalisme* (Kohn, 1965:72-73). Nasionalisme Indonesia-pun terlihat jelas menjadi suatu kekuatan besar sebagai proses yang dimotori oleh kemunculan kesadaran nasional yang dirumuskan oleh kaum intelektual dan diperluas melalui partai politik pergerakan nasional hingga menjadi gerakan massa yang anti kolonial (Alfian, 1996:34). Akan tetapi perjalanan nasionalisme itu tidak selalu menggembirakan dan belum berakhir. Terdapat kesan bahwa dalam perkembangan baru di berbagai bidang semakin gencar mendera nasionalisme. Nasionalisme pada tahap awal berhasil merekatkan penduduk yang heterogen menentang kolonialisme. Tetapi 50 tahun setelah proses dekolonisasi berlangsung terutama dalam *nation building*, perlu ada *revitalisasi* atau *redefinisi* nasionalisme yang

makin kompleks tantangannya menghadapi tekanan ekonomi, globalisasi, dan kebangkitan etnik/otonomi daerah, agar jangan sampai kehilangan peran dan maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Simatupang, 2002:45). Anderson (1983:14) mengingatkan bahwa nasionalisme adalah artefak-artefak budaya jenis khusus yang tercipta pada akhir abad ke 18 sebagai hasil “penyulingan” spontan atas persilangan berbagai kekuatan historis, namun sekali telah tercipta, artefak itu menjadi “modular” dapat ditanamkan dengan berbagai derajat kesadaran dan berbagai bentuk yang dipengaruhi rangkaian tata politis dan ideology yang luas”. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme masih tetap ada, hanya derajat dan bentuk-bentuk pengejawantahan nasionalisme itu sendiri yang berbeda, karena pengaruh zaman dan hakekat masalah yang dihadapi.

Nasionalisme dalam menghadapi tekanan ekonomi dan globalisasi, menurut Tjokrowinoto (1996:42) dapat memainkan dua peran pokok, yaitu sebagai ideologi yang mengatasi loyalitas dan solidaritas yang terbatas sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman kekuatan eksternal baik kekuasaan kolonial, penetrasi *transnational corporation*, *multinational corporation*, maupun lembaga-lembaga internasional lainnya pengaruh globalisasi. Uraian Tjokrowinoto tentang peranan nasionalisme, masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama; apakah relevansinya itu dan dimana posisi nasionalisme dalam menghadapi gejala-gejala mutakhir di Indonesia seperti masih

adanya proliferasi kelompok-kelompok sosial-politik dan ekonomi yang berwawasan sempit dan eksklusif di satu pihak, dan tantangan-tantangan global di lain pihak. Castles (1994:38) mengemukakan jawabannya bahwa perlu dibedakan antara “nasionalisme sempit” dan “nasionalisme yang terpadu” dengan nilai-nilai internasionalisme dan universalisme. Bentuk nasionalisme yang kedua inilah yang relevan dan memainkan peran positif, karena di era globalisasi masalah-masalah yang timbul itu tidak selalu dapat diselesaikan dalam batas-batas negara tertentu saja.

Nasionalisme Indonesia menghadapi pula tekanan kebangkitan etnik/otonomi daerah. Wiriaatmadja (2002:219-228) menyoroti masalah ini bahwa kesadaran etnik sudah diramalkan akan tumbuh pada abad ini dan mengancam kedudukan serta keutuhan negara bangsa (*nation state*), dengan merujuk pada ramalan yang dikemukakan oleh futurology seperti Toffler, Naisbitt dan Aburdene, serta Kennedy yang menyatakan bahwa kecenderungan etnik untuk menyatakan kesadaran diri dalam ikatan hubungan primordial (keturunan, ras, bahasa, keyakinan, atau budaya) akan meluas secara global. Ramalan ini pada masa Orde Baru tidak dihiraukan, sehingga melahirkan kebijakan kesamaan dalam semangat kesatuan dan persatuan antar suku bangsa, agama, ras, serta aliran dan golongan. Berbagai upaya dilakukan misalnya penerapan model pembangunan dan pemerataan pembangunan, pembagian wewenang pusat dan daerah, transmigrasi, pendidikan, hukum bahasa,

dan budaya yang melampaui batas-batas hak dan keadilan yang dirasakan kelompok tertentu dalam masyarakat atau etnik. Hal menunjukkan terjadi pengambilalihan sepenuhnya untuk nasional (pusat), yang sama halnya dengan membiarkan matinya budaya dan entitas lokal. Huda (2002:3) mengomentari bahwa: “akibat pemerintah/negara demikian telah memonopoli penciptaan idiom-idiom “identitas nasional”, tanpa memberi ruang yang cukup bagi budaya dan entitas lokal untuk memaknai kebangsaannya, telah menimbulkan mandulnya proses kreativitas dan emansipasi kesadaran masyarakat, telah menimbulkan frustrasi yang dalam bagi sekelompok masyarakat tertentu dalam membentuk berbangsa/bernegara, bahkan terjadi sekarang makin maraknya fenomena “disintegrasi bangsa”. Abdullah (2001:71) mencemaskan akibat tiadanya upaya mengakomodir nilai-nilai “ke-lokal-an” yang demikian hidup di masyarakat “tidak memperoleh kewajaran”. Akibatnya, dalam upaya mewujudkan keseimbangan dan keselarasan bangsa antara kepentingan lokal-nasional menjadi timpang dan tidak menyelesaikan persoalan, bahkan menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi transparansi dan kericuhan sistem multi partai yang disertai dengan persaingan elit politik di masa reformasi menyebabkan ledakan itu muncul ke permukaan menimbulkan berbagai gerakan separatis (Aceh dan Irian Jaya), konflik antar etnik (Ambon, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan), tuntutan otonomi daerah untuk keadilan (UU No.33 tahun 2003 tentang Pemerintahan

Daerah, UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Dana untuk Pemerintahan Pusat dan Daerah) dan sebagainya. Mengendurnya komitmen terhadap negara bangsa dan nasionalitas, dan kesadaran suku yang lebih menonjol adalah karena komitmen tersebut *tidak didukung oleh sense of belonging dan solidaritas*. *Sense of belonging* harus terus dipupuk dan disosialisasikan, tentang *self awareness* sebagai individu, suku, atau nation, baik melalui pendidikan maupun di luar lembaga pendidikan. Sedangkan solidaritas dibangun oleh *shared social opportunities and responsibilities*, dengan azas pemerataan dan keadilan. *Equality* dalam kesempatan dan *equity* dalam hasil dan keuntungan. Mengendur dan melemahnya nasionalitas dan etnisitas dalam integrasi bangsa dapat dikaji dari *pola gerak pendulum*, dimana suatu waktu bergerak ke arah etnisitas dan di waktu lain bergerak ke arah nasionalitas (Abdullah, 2001).

2. Pemuda dalam Perubahan Sosial

Permasalahan pemuda di Indonesia bukan saja penting karena tantangan jumlahnya yang sedemikian besar, tetapi pertanyaan mengenai di mana tantangan tersebut berlangsung, membutuhkan perhatian tersendiri. Di Indonesia perkembangan penduduk yang cukup pesat diikuti pula oleh tingkat urbanisasi yang tinggi. Ini berarti bahwa tekanan penduduk akan semakin terarah ke kota-kota besar yang dengan demikian harus mempersiapkan fasilitas pendidikan, lapangan

kerja, perumahan, sarana transportasi dan aneka ragam kebutuhan hidup dalam sebuah kota besar. Permasalahan pemuda di kota besar semakin rumit lagi jika diingat bahwa kapasitas yang dapat menampung sangat terbatas.

Ilmu pengetahuan sosial di Indonesia belum cukup melakukan usaha yang serius dan terarah terhadap gejala sosial dan masalah-masalah yang berhubungan dengan angkatan mudanya. Belum banyak diketahui tipologi sosial pemuda Indonesia, padahal banyak dan sering peristiwa nasional yang timbul karena faktor munculnya gerakan-gerakan pemuda-pelajar- mahasiswa, namun begitu jarang diperoleh bahan-bahan konseptual atau buku-buku yang menjelaskan atau menganggapi peristiwa-peristiwa tersebut dari segi analisis sosiologis, tinjauan historis, psikologi pendidikan ataupun analisis ilmu politik yang memadai.

Pengertian pemuda sendiri tidak begitu jelas batasannya. Pemuda (*Youth*) meliputi putera dan puteri berusia 12 sampai dengan 25 tahun sesuai dengan penetapan *Inter Regional Seminar on the Training of Professional Voluntary Youth Leader* di Denmark pada tahun 1969 yang diselenggarakan oleh UNESCO (N.Daldjoeni, 1974). Sementara dalam konsep lain disebutkan bahwa Pemuda atau generasi muda adalah konsep-konsep yang sering diberati oleh nilai-nilai (Abdullah, 1974). Hal ini terutama disebabkan karena keduanya bukanlah semata-mata istilah ilmiah tetapi lebih sering merupakan pengertian ideologis atau kultural.

Istilah “Pemuda harapan bangsa”, “pemuda pemilik masa depan” atau “Pemuda harus dibina” memperlihatkan betapa saratnya nilai yang telah terlekat pada kata pemuda tersebut. Hal ini telah umum disadari. Sebab itu aspek obyektif dari hal-hal tersebut perumusan berdasarkan patokan yang riil yang dapat diperhitungkan, seperti kesamaan umur dan berdasarkan aspek subyektif seperti perumusan yang bersumber kepada arti yang diberikan oleh masyarakat harus diperhitungkan.

Dilihat dari sudut kependudukan yang terlihat dalam statistik dan ekonomi, batasan pemuda lebih ditekankan pada pembagian umur (15-25 tahun) sementara sosiologi dan sejarah lebih menekankan kepada nilai subyektifnya dimana kepemudaan dirumuskan berdasarkan tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historis. Dalam hal ini maka ilmu-ilmu tersebut dibantu juga oleh psikologi yang memperkirakan periode pertumbuhan kepribadian yang sangat erat hubungannya dengan latar belakang kebudayaan. Namun pada dasarnya pengertian-pengertian ini saling mengisi dan melengkapi.

Generasi muda adalah penentu perjalanan bangsa di masa berikutnya. Mahasiswa sebagai inti dari generasi muda, mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah, selain semangat mudanya, sifat kritisnya, kematangan logikanya dan ‘*kebersihan*’-nya dari noda orde masanya. Sejarah menunjukkan bahwa mahasiswa adalah motor penggerak utama perubahan, seperti ditunjukkan oleh periode kebangsaan (1908-1945). Dan pada peralihan Orde Lama ke Orde Baru

(1966). Mahasiswa diakui perannya sebagai kekuatan pendobrak kebekuan dan kejumudan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kehidupan global dan tuntutan sebagai akibat dari adanya kemajuan dalam segala bidang, pemuda harus mampu melihat bahwa kemerdekaan bangsa harus kita terjemahkan dalam format pembentukan kedaulatan ekonomi, demokratisasi, serta kebebasan seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Indikator-indikator ekonomi dan sosial inilah yang menentukan makna dan tingkat pencapaian kemerdekaan, sekaligus juga untuk menandai adanya kemajuan bangsa dalam perjalanan sejarah penyelenggaraan negara.

Di era globalisasi saat ini, makna kemerdekaan merupakan sebuah fakta interdependensi di mana bangsa, kelompok, dan individu masyarakat saling tergantung satu sama lain untuk secara bersama-sama memajukan peradaban dan pengembangan kemanusiaan. Tidak jarang dalam proses interdependensi demikian muncul berbagai perbenturan kepentingan ataupun konflik peradaban yang secara tidak langsung akan menggiring masyarakat untuk terperosok ke dalam perangkap politik identitas sempit bersifat komunal.

Ekseks negatif dari arus globalisasi dan liberalisasi apabila tidak direspons secara arif, khususnya oleh para elite politik kita, justru akan mengancam makna kemerdekaan di tingkat individual di masyarakat.

Oleh karena itu, pengukuhan terhadap nilai-nilai dasar dari nasionalisme yang telah dibentuk sejak kemerdekaan, yaitu kecintaan terhadap pluralisme bangsa, solidaritas dan persatuan, merupakan ihwal yang esensial untuk dikembangkan sebagai upaya mengisi makna kemerdekaan kita.

Pluralisme tersebut di atas menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk itu perlu ada kesadaran dan komitmen seluruh bangsa guna menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya mempersatukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Kini tantangan dan kebutuhan bangsa telah berubah. Medan perjuangan telah bergeser jauh dibanding era Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Kondisi yang ada di hadapan bangsa telah berubah secara mendasar. Secara umum kondisi saat ini dalam berbagai aspek telah jauh berkembang dan maju dibanding era revolusi kemerdekaan tahun 1945. Namun demikian di sisi lain masih didapati kondisi buruk yang hidup di negeri ini, antara lain masih maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya penegakan hukum, belum optimalnya penerapan demokrasi, masih munculnya konflik bersenjata antarkelompok masyarakat, menurunnya penerapan nilai-nilai agama dan moral, berkembangnya pergaulan bebas, dan maraknya penyalahgunaan

narkoba. Seiring dengan itu sebagai dampak negatif globalisasi, di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, berkembang “kolonialisme gaya baru”, antara lain melalui politik, militer, ekonomi, dan budaya yang sangat merugikan kepentingan dan kedaulatan negara-negara berkembang.

Mengingat besarnya persoalan yang dihadapi bangsa tersebut, diperlukan kekuatan yang besar dan hebat untuk mengatasi dan menyelesaikannya. Kekuatan itu akan terbentuk jika dapat diwujudkan peneguhan kembali ikatan batin atau komitmen semua warga negara kepada cita-cita nasionalnya, yang disertai pembaruan tekad bersama untuk melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen.

Terkait dengan ini, hendaknya dipahami bersama bahwa peneguhan kembali ikatan batin dan pembaruan tekad bersama dari seluruh komponen bangsa merupakan kesempatan sejarah yang lain yang tidak kalah heroiknya dibanding kesempatan sejarah di sekitar zaman Proklamasi. Itulah kesempatan yang dapat ditangkap dan dikembangkan dalam semangat yang serupa dengan mereka yang menangkap kesempatan sejarah dalam zaman revolusi kemerdekaan dahulu.

Mengingat pada zaman Proklamasi 1945 kaum pemuda khususnya peran mahasiswa, telah memainkan sejarah sangat penting, maka sekarang ini kaum pemuda dipanggil kembali untuk mengambil peran kesejarahan yang lain (*another historical opportunity*), yaitu untuk

berjuang kembali mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang berkembang dewasa ini bersama-sama komponen bangsa yang lain secara demokratis dan konstitusional. Kaum pemuda, baik secara perorangan maupun kelompok dan organisasi, dapat mengambil peran sesuai ruang lingkup tugas, pekerjaan, dan pengabdianya. Baik hal itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pelajar, mahasiswa pengurus karang taruna atau remaja masjid, aktivis LSM, kader organisasi, pegawai pemerintah, pegawai swasta, guru, dosen, peneliti, politisi, polisi dan tentara, nelayan, petani, dan lain sebagainya.

Terkait dengan ini, kaum pemuda hendaknya menyadari bahwa “penjajahan gaya baru” yang tengah melanda berbagai negara berkembang, termasuk di negeri kita, tidak kalah merusaknya dibanding penjajahan bersenjata pada zaman dahulu. Oleh karena itu, kehidupan bangsa hendaknya dikembalikan dengan mengacu kepada nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan ajaran agama, moral, dan etika. Kaum pemuda dapat membentuk budaya sendiri yang mengakar kepada kepribadian dan adat istiadat masyarakat kita sendiri yang telah berkembang selama ratusan tahun, yang berciri religius, persaudaraan, persahabatan, dan harmoni dengan alam dan masyarakat. Budaya kita tersebut memiliki kelebihan dan keunggulan dibanding budaya impor dari negara maju yang bermuatan hedonisme, individualisme, dan liberalisme. Untuk itulah, kaum pemuda hendaknya memegang erat budaya bangsa serta mengembangkannya secara terus menerus agar

sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak menjadi kehilangan ciri khas dan substansi asalnya.

Peneguhan kembali ikatan batin dan pembaruan tekad bersama oleh kaum pemuda itu sangat membutuhkan kesadaran sejarah pertumbuhan bangsa dan perjalanan bangsa pada masa lalu yang dipenuhi masa pasang dan surut serta suka duka. Terkait dengan ini, penting bagi kaum muda untuk mempelajari sejarah bangsa kita secara utuh, obyektif, dan kritis. Berbagai lembaran sejarah Indonesia memberikan pelajaran dan pengalaman penting bagaimana seharusnya kaum pemuda memainkan peran dan membuat sejarah saat ini dan masa datang.

Sehubungan dengan hal ini, kaum pemuda hendaknya memiliki penghargaan yang tinggi kepada para pahlawan, pejuang, dan tokoh pada masa lalu yang telah mengukir dan membuat sejarah. Mereka telah memberikan pengabdian jauh di atas standar kewajaran, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Adalah sangat penting kaum muda menempatkan mereka pada tempat terhormat dengan tetap menyadari bahwa pemuda juga tetap manusia yang tidak luput dari salah dan kekurangan. Prinsip kaum pemuda dalam hal ini adalah apa-apa yang baik dari mereka hendaknya diteruskan, dan apa yang tidak baik, hendaknya ditinggalkan.

Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Nilai dasar

perjuangan berperan sebagai pemicu membangkitkan semangat bangsa dalam upaya pembangunan segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan keagamaan. Saat ini, sudah seharusnya segenap komponen bangsa bahu membahu menyatukan langkah memajukan bangsa, khusus untuk penyelenggara negara perwujudannya dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebenaran. Untuk generasi muda, momentum kemerdekaan dapat dijadikan sebagai pemicu membangkitkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

Ada hal fundamental yang membedakan kaum muda dari kaum tua. Kaum muda selalu melawan, sementara kaum tua senantiasa berkompromi. Peristiwa Rengasdengklok saat Soekarno-Hatta diculik kaum muda dan mendesak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah satu bukti sejarah yang sulit dibantah betapa kaum muda tidak tunduk pada "kompromi". Kaum muda memaksa Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Jepang, yang sudah dilumpuhkan oleh tentara Sekutu dalam Perang Dunia II setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom pada 6 dan 9 Agustus 1945, membuat pemuda tidak percaya pada janji kemerdekaan pemerintah kolonial Jepang.

Tidak salah jika Richard Robison (1986) kemudian mengkategorikan kaum muda atau pelajar/mahasiswa sebagai bagian

dari kelas menengah sosial, yakni mereka yang datang dari kelas intelektual dengan pengetahuan yang mapan. Robison menggunakan indikator intelektual untuk membedakannya dengan kelas menengah yang lain. Kaum muda (mahasiswa) adalah komunitas yang berpendidikan tinggi dan tercerahkan secara ilmu pengetahuan. Kaum muda adalah sosok yang berpikir kritis dan revolusioner dalam bertindak. Kaum muda punya nasionalisme kebangsaan yang tinggi.

Jika kita membandingkan nasionalisme yang lahir pada zaman pergerakan nasional dengan nasionalisme yang muncul tahun-tahun belakangan ini, nampak perbedaan yang cukup mendasar, meskipun terdapat persamaan. Persamaannya yang dapat kita lihat adalah nasionalisme pada zaman pergerakan nasional yang lebih bersifat global dan nasionalisme sekarang yang lebih bersifat lokal, lahir dan muncul sebagai suatu bentuk respon akan kesadaran ketidakadilan, merasa terjajah, tertinggal dan cinta tanah air. Sedangkan perbedaannya adalah, munculnya kesadaran dan sentimen nasionalisme pada zaman pergerakan nasional lebih disebabkan oleh perasaan ketertinggalan, kebodohan, tertindas, dan kemiskinan sebagai akibat dari ideologi kolonialisme Belanda, sedangkan nasionalisme sekarang lebih disebabkan oleh munculnya perasaan ketimpangan pembangunan daerah dan pusat, alokasi dana yang tidak seimbang, dan merasa adanya perasaan dieksploitasi oleh pemerintah pusat di Jakarta. Bahkan ada pula yang mendikotomikan antara pembangunan yang lebih berorientasi

Jawa dibandingkan luar Jawa, ketidakadilan dan ketidakseimbangan birokrasi pemerintahan antara Jawa dan luar Jawa. Bahkan perbedaan yang paling mendasar adalah, nasionalisme yang lahir pada zaman pergerakan nasional lebih bersifat sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif), sedangkan nasionalisme sekarang ini lebih bersifat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa (lebih bersifat disintegrasi).

Sejatinya, nasionalisme yang utuh adalah ide dan cita-cita tentang sebuah masa depan: bagaimana karakter sebuah bangsa yang merdeka kukuh di tengah arus globalisasi. Karena itu, nasionalisme lama harus dekonstruksi menjadi nasionalisme baru yang berpijak pada tantangan-tantangan kebangsaan yang makin kompleks. Nasionalisme baru kaum muda adalah nasionalisme original yang tidak dibangun dari atas lalu meluncur ke bawah yang oleh sejarawan Charles Tilly, disebut sebagai *state-led nationalism* (dalam buku *States and Nationalism in Europe 1492-1992*, 1994). Sebab, nasionalisme kaum muda adalah nasionalisme yang tidak dibentuk oleh rezim, melainkan sesuatu yang muncul secara alamiah (Ernest Renant 1990).

Perubahan cara pandang pemuda tentang nasionalisme terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan terutama dalam kehidupan sosial. Perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun sedemikian cepat sehingga mempengaruhi pola pikir dan sikap pada masyarakat yang mengalami perubahan tersebut. Dalam pengertian

yang sangat luas perubahan sosial didefinisikan sebagai perubahan penting dari struktur sosial dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial (Moore, 1967:3). Wilbert Moore memasukkan ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural.

Definisi lain menyebutkan bahwa perubahan sosial diartikan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial dan bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku (Laurel,1993:4). Perubahan sosial dipandang sebagai sebuah konsep yang serba mencakup, yang menunjuk kepada perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia. Dalam tingkat analisis perubahan sosial, pemuda sebagai individu yang ikut mengalami perubahan, terutama perubahan sikap yang berhubungan dengan keyakinan mengenai berbagai persoalan. Pemuda pada umumnya selalu berada di setiap jaman dan diyakini bahwa pemuda adalah pelopor perubahan dan perubahan tersebut ke arah yang buruk seperti kata-kata yang terdapat dalam buku kuno di Ur. yang menyebutkan bahwa “Peradaban kita akan menemui ajal bila tindakan generasi muda kita yang keterlaluan dibolehkan berlanjut” (Laurel, 1993:362). Sebaliknya pemuda sering membayangkan diri mereka sendiri sebagai pelopor perubahan dan mahasiswa selalu berpendapat bahwa harapan dunia (satu-satunya) terletak dalam tindakan pemuda.

Perubahan sosial memang ditandai oleh terjadinya kegentingan hubungan generasi yang mengganggu kemampuan sistem komunikasi yang efektif antar generasi. Daya tanggap terhadap peralihan situasi yang mulai mengitari diri bukan saja ditentukan oleh prasangka-prasangka budaya, kepentingan politik dan ekonomi, tetapi lebih penting oleh perbedaan generasi. Perbedaan pengalaman historis yang mendasar menjadi lebih penting. Dalam masalah ini sering proses perubahan tersebut ditandai oleh konflik generasi: generasi muda lebih sedikit punya kepentingan terhadap berlanjutnya dasar struktural sosial yang lama (Abdullah, 1982:3). Tentu saja dapat diduga bahwa makin melebarnya jaringan sistem sosialisasi yang berwujud lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah maka asas kesesuaian pun semakin meluas.

Perbedaan pandangan ini timbul karena generasi lebih tua sering memandang kebanyakan pemuda seolah-olah sebagai eksponen perubahan radikal, namun terdapat konservatisme yang besar di kalangan pemuda. Studi Remmers dan Radler tentang siswa SLTA di Amerika Serikat selama dua tahun (Laurel, 1993:362) selama tahun 1950-an menemukan, seperti orang dewasa, siswa cenderung tidak dapat mentoleransi sudut pandangan yang berbeda. Mereka agak tradisional dalam arti melanjutkan kebiasaan menghormati paham kebebasan berpikir, kebebasan berbicara dan kebebasan pers Amerika tradisional. Bukti konservatisme mendasar ini dikuatkan oleh hasil studi terhadap siswa dan mahasiswa berusia antara 16-23 tahun di

tahun 1973. Telah diwawancarai lebih dari 6.000 pemuda dan di antara temuannya adalah meskipun mayoritas yakin AS sebenarnya berjalan menurut kepentingan khusus, tetapi hanya 21% mahasiswa dan 25% non-mahasiswa yang yakin bangsa Amerika memerlukan perubahan radikal.

Perbedaan di kalangan pemuda sendiri sama besarnya dengan perbedaaan antara pemuda dan orang tua. Meskipun pemberontakan mahasiswa dan kerusuhan kampus di tahun 1960-an menunjukkan suatu generasi radikal, namun kita perlu mengingat bahwa universitas di dunia modern jauh lebih tenang dibandingkan dengan masa sebelumnya. Tidak ada bukti yang menunjukkan terjadinya pemberontakan politik antar generasi, baik di AS maupun di negara sedang berkembang. Sebaliknya terdapat bukti mengenai kelestarian perasaan solidaritas terhadap keluarga sejumlah besar tradisionalisme di kalangan pemuda dan tingkat kontinuitas antara generasi yang menandakan kelestarian pentingnya pengaruh orang tua.

Meskipun mayoritas pemuda berpandangan konservatif atau moderat, barangkali lebih banyak pemuda yang berpandangan moderat dibanding orang dewasa. Pemuda cenderung menjadi ekstrem, tetapi ekstremisme itu mungkin berhaluan kanan atau kiri. Kelompok penyelidik cuaca yang mendukung revolusi dengan kekerasan adalah organisasi pemuda; tetapi *pemuda Amerika untuk Kemerdekaan* yang juga organisasi pemuda, menekankan pandangan konservatif atau

reaksioner. Pengaruh pemuda atas perjalanan sejarah Amerika modern belum jelas sepenuhnya, namun dapat dikemukakan berbagai contoh yang menunjukkan peranan menentukan yang dimainkan pemuda dalam perubahan.

Pemuda Indonesia mempunyai karakter yang ditunjukkan pada saat Sumpah Pemuda 1928 seperti yang diutarakan oleh Kasdin Sihotang (2007) sekurang-kurangnya tiga karakter yang mencuat di dalamnya. *Pertama*, karakter pemberani. Situasi pada waktu itu jelas kurang kondusif untuk menyatakan tekad yang bulat, apalagi untuk menggalang kebersamaan, yang tentunya upaya unitas ini dirasakan oleh kaum penjajah sebagai ancaman bagi eksistensi kekuasaannya. Tetapi, keadaan terkungkung itu bukanlah hambatan bagi kaum muda mewujudkan semangatnya untuk bersatu. Justru situasi ini membangkitkan perasaan senasib dan sepenanggungan. Dengan demikian dapat dikatakan, meminjam pemikiran dialektis dari Hegel, kaum muda berjuang melawan tesis dengan antitesis. Tesisnya adalah upaya pemecah-belah dari penjajah terhadap bangsa ini, sedangkan antitesis adalah semangat untuk bersatu.

Terkait dengan butir pertama, karakter *kedua* adalah nasionalisme yang tangguh. Kala itu kaum muda menyadari betul bahwa kendati mereka berasal dari kelompok atau suku yang berbeda-beda dan berasal dari daerah yang berbeda-beda, namun mereka mengakui dirinya sebagai generasi bangsa yang senasib dan sepenanggungan.

Lewat proses evolusi dunia pengajaran dan pendidikan model Barat, mereka menumbuhkan dan memekarkan akselerasi kesadaran nasional yang tinggi untuk merintis kemerdekaan bagi bangsanya. Hal ini tentu dapat terwujud karena generasi 28 mampu mengalahkan naluri keberpihakannya pada kepentingan kelompok dan menempatkan kepentingan bersama sebagai skala prioritas. Di sinilah terlihat jelas semangat nasionalisme yang tangguh itu. Karena itulah mereka berani menyatakan tekad untuk bersatu dalam wilayah, dalam bangsa dan bahasa.

Karakter *ketiga* adalah intelektualitas dan moralitas. Intelektualitas karena generasi 28 merintis refleksi serta debat tentang prinsip-prinsip dasar cita-cita kebangsaan dengan pikiran dan pengetahuan. Mereka tidak mau terjerembab dalam kubangan sikap yang dikhawatirkan yakni penghianatan intelektual demi kepentingan sesaat. Mereka justru mengkritisi sikap-sikap penjajah dan mendalami filsafat bangsa, masyarakat, dan negara yang dicita-citakan. Menjadi moralis, karena atas dasar solidaritas yang tinggi serta keberpihakan pada nilai-nilai mendasar kemanusiaan, bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa mereka menyatakan perjuangan untuk melawan sang penindas dengan semangat yang sama.

Tiga karakter di atas menunjukkan bahwa kaum muda merupakan bagian integral dari perjuangan bangsa ini. Dalam bingkai ini, pengakuan akan peran serta mereka sangatlah penting. Namun, fakta partisipasi

kaum muda dalam sejarah bangsa ini tidak hanya bersifat afirmatif, tetapi juga harus bersifat imperatif. Dengan kata lain, terhadap kaum muda, selain berani mengakui peran historisnya, perlu juga memperhatikan eksistensi humanismenya.

Kepedulian pada eksistensi kaum muda diwujudkan melalui pendidikan karakter. Karakter seperti apa yang perlu dihidupkan di kalangan generasi muda sekarang, menurut Sihotang (2007), empat karakter penting berikut menjadi bagian pedagogi karakter itu.

Pertama, karakter perantau. Manusia perantau, meminjam istilah YB Mangunwijaya, adalah orang-orang yang menempatkan kerja keras, perjuangan serta usaha yang berkelanjutan sebagai prinsip hidup. Manusia seperti ini sadar akan keterbatasan dirinya. Karena kesadaran akan keterbatasan dirinya inilah maka nilai-nilai heroik menjadi bagian dari hidupnya. Hanya dengan modal keyakinan inilah seseorang mampu mengatasi keterbatasannya dan mampu membangun dunianya yang lebih humanis. Generasi muda sekarang adalah karakter manusia perantau di atas sangat relevan. Kaum muda sekarang berhadapan dengan tantangan yang luar biasa berat. Penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol serta kerusakan bumi yang semakin parah adalah realitas di hadapan mereka. Berhadapan dengan inilah mental manusia perantau sangat penting. Dengan mental perantau itu mereka telah disiapkan menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah menyerah.

Kedua, karakter intelektual. Generasi muda sekarang tentu tidak cukup dibekali dengan semangat juang yang tinggi serta kerja keras, melainkan juga perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai. Hal ini seiring dengan perkembangan zaman. Rudolf Dreikurs (1986) telah mengingatkan kita bersama bahwa di era digital ini pengetahuan yang luas merupakan modal yang tidak terhindarkan. Karena itulah semangat gemar membaca menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter generasi muda. Di era sekarang tuntutan ini merupakan tantangan besar. Kecanggihan teknologi justru telah membuat kaum muda lebih mencintai penemuan daripada pencarian. Tetapi, justru di tengah kultur pragmatisme ini karakter intelektual perlu mendapat perhatian.

Ketiga, karakter manusia otonom. Manusia otonom adalah orang yang memiliki prinsip yang jelas dalam hidupnya. Ia bukanlah orang yang mudah bimbang dan ragu terhadap keputusannya dan mudah tergiur dengan iming-iming kepuasan badaniah sesaat, melainkan memiliki pendirian yang teguh. Menurut Immanuel Kant, otonomi merupakan sikap mendasar dalam diri manusia. Otonomi bersumber dari pengakuan terhadap jati diri. Karena itu sifatnya internal, muncul dari dalam setiap pribadi. Kebenaran bagi seorang yang otonom bersumber dari keyakinannya sendiri bahwa itu benar, bukan karena dikatakan orang lain bahwa itu benar. Namun, ini bukan berarti sikap otonom mengesampingkan norma-norma, melainkan tetap menjadikannya bagian dari dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, bagi

manusia otonom ada kesejajaran antara dimensi subyektif dan dimensi obyektif. Dimensi subyektif adalah keyakinannya sendiri dan dimensi obyektif adalah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip atau norma etis yang berlaku di luar dirinya. Karakter ini perlu juga menjadi bagian dari pendidikan karakter kaum muda.

Keempat, karakter etis. Karakter ini terkait dengan karakter *ketiga*. Tekanan di sini adalah kebangkitan akan nilai-nilai moral di kalangan generasi muda. Kepada mereka diberikan modal yang kuat untuk mampu mempertimbangkan perbuatannya dari segi nilai-nilai. Ruang gerak agar karakter ini dapat tumbuh perlu tersedia, yakni kesempatan.

Mempertahankan integritas sebuah negara bangsa diperlukan kesadaran kebangsaan alias nasionalisme. Integritas sebuah bangsa tidak akan dapat dipertahankan dengan kekerasan atau lewat jalan militer, walaupun ada yang seperti itu, integritas yang terbentuk sangatlah rapuh. Jadi yang penting adalah membentuk kesadaran kebangsaan itu. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesadaran kebangsaan. Dalam pembahasan ini, peneliti akan menekankan pentingnya unsur pendidikan dalam proses menumbuhkan kesadaran kebangsaan alias nasionalisme. Untuk itu dibutuhkan suatu usaha untuk merevitalisasi *sense of nationalism* dalam diri generasi muda pada khususnya, sebagai calon penerus bangsa. Salah satu cara yang dianggap mengena adalah jalur pendidikan karena masa generasi muda merupakan masa belajar. Perlu diperhatikan

pendidikan yang akan sering muncul dalam bahasan ini adalah pendidikan dalam arti formal.

Nasionalisme penting kalau bangsa Indonesia mau bertahan. Tapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah nasionalisme macam apa yang hendak dipupuk. Untuk menjawab pertanyaan ini kiranya penting jika kita melihat ke belakang; meninjau ulang perjalanan sejarah bangsa ini. Harus begitu karena nasionalisme para *the founding fathers* kita itu adalah nasionalisme yang masih *fresh* dan belum tercampur apa-apa. Seperti ayam goreng yang baru saja matang; aromanya menggugah selera. Kiranya ada tiga poin penting yang menjadi ciri khas nasionalisme kaum muda.

Pertama, nasionalisme yang didasari oleh rasa sukarela dan tulus. Tidak ada satu pun yang merasa terpaksa untuk menganut nasionalisme. Justru pemaksaan itu dihindari. Ini tercermin dalam cara yang mereka (baca: para nasionalis) lakukan dalam bertukar pikiran dan menentukan pendapat, yaitu dengan berdialog, bahkan hingga berdebat, tapi debat yang dilakukan sama sekali tidak mempengaruhi rasa kesatuan mereka.

Selanjutnya, nasionalisme yang berorientasi pada nilai. Bagi mereka, bersatu bukanlah suatu tujuan melainkan sarana. Tujuan utama mereka amatlah luhur, yaitu keutamaan manusiawi. Sebagai contoh konkret, baiklah kita mengambil contoh ungkapan generasi '28 yang diwakili Mohammad Yamin: "...menyumbang pada kebudayaan dunia

dan dunia universal." Atau bahasa generasi '45: "...ingin melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial..."

Terakhir, nasionalisme yang dewasa. Manifestasi dari ciri ini adalah sikap mereka yang tidak meremehkan harkat dan martabat bangsa lain. Hal itu juga tampak dalam perang pasca-kemerdekaan, para bapak bangsa kita itu lebih mendahulukan cara damai melalui usaha-usaha diplomasi dan perundingan daripada cara perang. Para bapak bangsa kita itu tidak sampai pada sikap nasionalisme yang ekstrem berupa *chauvinisme* atau bahkan *jingoisme*.

Nasionalisme generasi muda Indonesia itu ada baiknya mengadopsi ketiga karakteristik dari nasionalisme para bapak bangsa Indonesia. Karakteristik nasionalisme seperti itu sudah terbukti dapat mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia walau ditekan oleh kekuatan asing, menjadi dasar semangat bangsa Indonesia dalam berjuang dan bahkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya, yaitu kemerdekaan.

Setiap bangsa terformat dari pengalaman bersama di masa lampau. Bahkan suatu ungkapan yang amat sering kita dengar pun mendukung pemahaman ini: *experience is the best teacher*. Jadi terminologi "belajar dari sejarah" bukanlah hal yang sepele, justru sebaliknya lewat sejarah itulah identitas seorang warga negara diperkokoh.

Pelajaran sejarah memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar: "siapakah aku"; "Siapakah bangsa Indonesia"

F. PENELITIAN YANG RELEVAN

Hasil penelitian mengenai pengajaran sejarah menunjukkan bahwa pengajaran Sejarah Nasional Indonesia tidak hanya dihadapkan kepada tantangan untuk melaksanakan tugasnya dalam mewariskan pemahaman mengenai pengalaman kolektif bangsa di masa lampau, akan tetapi terutama di dalam usaha menanamkan kesadaran kebangsaan dan memberikan kerangka acuan utama yang dapat dijadikan pedoman dan bimbingan ke arah pengenalan jatidiri berbangsa kepada para peserta didik.

Rochiati Wiriatmadja (1992) melihat bagaimana guru sejarah melaksanakan tugasnya, untuk kemudian diamati respons para siswa terhadap perlakuan itu, dan selanjutnya diperhatikan beberapa lingkungan yang diduga memberikan pengaruh terhadap program sekolah dalam bentuk dukungan atau ketidakpedulian, seperti keluarga, kehidupan beragama, persahabatan dengan teman sebaya, kegiatan berorganisasi dan perkumpulan remaja, serta tokoh yang dianggap mewakili masyarakat.

Prestasi belajar sejarah yang cukup memuaskan hanya menunjukkan dicapainya sasaran pendidikan di ranah kognitif, tetapi masih diragukan peraih nilai-nilai yang secara afektif diutamakan. "Budaya diam" yang melanda masyarakat pada umumnya, ternyata dialami juga oleh para siswa yang seringkali enggan bertanya, petunjuk bahwa keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar kurang diperhatikan guru. Diperlukan

transformasi dalam cara belajar mengajar dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan siswa, terutama di dalam memenuhi tuntutan kelas yang multietnik dengan kemajemukan sosial budaya.

Pendidikan kebangsaan yang berhasil baik dilaksanakan di sekolah adalah yang didukung berbagai upaya peneguhan. Salah satu diantaranya yang terpenting ialah relasi sosial di antara remaja Indonesia dari berbagai etnik secara intensif. Pesan-pesan tentang kesadaran kebangsaan yang dikomunikasikan di antara sesama remaja akan lebih efektif, karena dorongan untuk mendapat persetujuan dari teman sebaya merupakan salah satu bentuk pengabsahan identitas remaja.

Demikian pula dibutuhkan dukungan yang positif dari kehidupan keluarga dengan orangtua yang memberikan pendidikan kebangsaan kepada puteranya untuk memberikan kesan kesadaran yang lebih meyakinkan dan lestari. Dukungan dari lingkungan keagamaan diperlukan dalam bentuk nilai-nilai universal yang suportif, dan dari masyarakat dibutuhkan sikap-sikap yang terbuka, tidak berprasangka, mendukung dan konsisten sehingga dengan bentuk-bentuk dukungan itu semua pihak tidak meragukan hasil-hasil pendidikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. TUJUAN OPERASIONAL PENELITIAN

Hasil kajian teoretis menunjukkan banyaknya upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk sikap nasionalisme seseorang. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap nasionalisme mahasiswa. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan sikap Nasionalisme mahasiswa.
2. Untuk mengetahui hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme mahasiswa.

B. METODE PENELITIAN

Berangkat dari permasalahan dan tujuan penelitian di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini survei dengan pendekatan korelasi. Survei dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sejumlah sampel dari keseluruhan anggota populasi untuk mengumpulkan data penelitian. Pendekatan korelasional diterapkan untuk menguji hipotesis dalam menjelaskan hubungan dari ketiga

variabel. Model hubungan tersebut dapat dilihat dalam bagan yang menjelaskan konstelasi permasalahan penelitian pada Gambar 3.1.

Keterangan:

Y = Sikap Nasionalisme

X₁ = Pendidikan Sejarah

X₂ = Lingkungan Keluarga

Gambar 3.1: Konstelasi Hubungan antarvariabel Penelitian

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta. Kegiatan penelitian berlangsung dalam empat tahap, dimulai pada bulan Mei, 2002 sampai dengan bulan Februari, 2005. *Tahap pertama*, studi pendahuluan yang mencakup kegiatan pra-survei dan pengkajian literatur untuk menyusun kerangka teoretis yang dilaksanakan pada bulan Juli, 2002 sampai dengan bulan Desember, 2002. *Tahap kedua*, pengembangan instrumen penelitian yang mencakup penyusunan *draft* instrumen, uji coba instrumen untuk menguji validitas dan reliabilitasnya kemudian dilanjutkan dengan finalisasi instrumen yang dilaksanakan pada bulan Januari, 2003 sampai dengan bulan Mei, 2003. *Tahap ketiga*, pengumpulan data melalui penyebaran instrumen yang dilanjutkan dengan pengolahan serta analisis data yang dilaksanakan pada bulan Juli, 2003 sampai dengan bulan Desember, 2003. *Tahap keempat*, penyusunan laporan yang merupakan tahap akhir dari proses penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret, 2004 sampai dengan selesai.

D. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

1. Populasi

Populasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta. Pada saat penelitian dilaksanakan, mahasiswa yang terdaftar tersebar dalam 4 angkatan, mulai dari Angkatan 2001 sampai dengan Angkatan 2004. Dengan mempertimbangkan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, populasi yang menjadi jangkauan penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta mulai dari Angkatan 2001 sampai Angkatan 2004 sebanyak 70 orang yang ditetapkan sebagai kerangka sampel.

2. Sampel

Dalam upaya mendapatkan sampel yang representatif, prosedur untuk menetapkan sampel penelitian dilakukan menggunakan teknik *proportional random sampling*. Teknik ini digunakan karena populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jumlah mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah

UHamka setiap angkataannya berbeda namun setiap angkatan stratanya sama sehingga jumlah sampel yang diambil harus meliputi strata setiap angkatan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan dan mengelompokkan mahasiswa anggota populasi berdasarkan angkatan.
- b. Menetapkan jumlah sampel secara keseluruhan yaitu sebanyak 70 orang dan menentukan jumlah sampel sebagai wakil representatif dari masing-masing angkatan secara proporsional.
- c. Memilih anggota sampel secara acak sederhana yang mewakili masing-masing kelompok sampel (Angkatan) melalui pengundian sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada langkah (2).

Distribusi populasi dan sampel penelitian dari setiap angkatan diperlihatkan pada tabel 3.1.

No.	Mahasiswa	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1	Angkatan 2004	44	13
2	Angkatan 2003	60	18
3	Angkatan 2002	52	16
4	Angkatan 2001	78	23
Total		234	70

Tabel 3.1: Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian Berdasarkan Angkatan

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN PENELITIAN

Data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tiga variabel penelitian. Proses pengukuran dilakukan dengan menyebarkan instrumen (alat ukur) kepada sejumlah responden yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian. Instrumen tersebut dikembangkan sendiri oleh peneliti dan dikonsultasikan kepada para ahli dalam bentuk kuesioner dengan tipe respon tertutup melalui tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan definisi operasional untuk setiap variabel.
2. Menyusun kisi-kisi berdasarkan definisi operasional setiap variabel.
3. Mengembangkan butir kuesioner dalam bentuk pernyataan dilengkapi dengan alternatif respon jawabannya.

Sesuai dengan jumlah variabel dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis kuesioner yang digunakan sebagai instrumen pengumpul data yaitu:

1. Kuesioner pengukuran pendidikan sejarah

2. Kuesioner pengukuran lingkungan keluarga
3. Kuesioner pengukuran sikap nasionalisme mahasiswa.

Sebelum kuesioner tersebut digunakan untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu dilakukan ujicoba terhadap 25 orang responden. Melalui proses ujicoba, dilakukan pengujian validitas setiap butir soal dalam satu variabel dan dilakukan perhitungan koefisien reliabilitas untuk setiap jenis instrumen.

Pengujian validitas butir dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor butir soal dengan skor total (r_{hitung}) yang terdapat dalam satu variabel. Rumus yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah korelasi *Product Moment Pearson* (Hadi, 1991: 23) yaitu sebagai berikut:

$$r_{hitung} =$$

r_{hitung} = koefisien korelasi skor butir soal dengan skor total

n = jumlah responden ujicoba
X = skor butir
Y = skor total yang diperoleh dari penjumlahan skor butir.

Hasil uji validitas dari setiap butir soal ditetapkan berdasarkan

perbandingan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} . Butir soal dinyatakan valid, jika diperoleh $r_{hitung} \geq r_{tabel}$. Butir soal dinyatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$. Diketahui $r_{tabel} =$ untuk jumlah sampel $n = 30$ pada $\alpha = 0,05$ adalah 0,396. Selanjutnya dapat ditetapkan bahwa butir soal dinyatakan valid jika diperoleh $r_{hitung} \geq 0,396$.

Koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan data butir soal yang valid berdasarkan hasil uji validitas. Koefisien reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach (Hadi, 1991: 23) sebagai berikut:

- r_{tt} = koefisien reliabilitas
- M = jumlah butir soal yang valid
- V_x = jumlah varians skor butir yang valid
- V_t = varians skor total butir valid

Tingginya koefisien reliabilitas (mendekati angka 1) menunjukkan kuesioner yang diujicobakan reliabilitas digunakan sebagai instrumen pengumpul data.

1. Instrumen Pengukuran Pendidikan Sejarah

Variabel Pendidikan Sejarah diukur menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner. Data variabel Pendidikan Sejarah diperoleh

dengan menjumlahkan skor dari setiap butir pernyataan yang diajukan. Skor butir ditetapkan sesuai dengan jenis pernyataan dan pilihan responden terhadap lima alternatif respon jawaban yang telah disediakan. Untuk jenis pernyataan positif; jawaban “Sangat Setuju (SS)” mendapat skor 5, “Setuju (S)” mendapat skor 4, “Ragu-ragu (RR)” mendapat skor 3, dan “Tidak Setuju (TS)” mendapat skor 2, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 1. Untuk jenis pernyataan negatif; jawaban “Sangat Setuju (SS)” mendapat skor 1, “Setuju (S)” mendapat skor 2, “Ragu-ragu (RR)” mendapat skor 3, dan “Tidak Setuju (TS)” mendapat skor 4, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 5.

Pada tahap ujicoba instrumen, kuesioner variabel pendidikan sejarah terdiri dari 40 butir soal. Butir-butir soal yang diajukan untuk mengukur variabel tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi yang ditunjukkan pada tabel 3.2.

No.	Indikator	Nomor Butir	Jml. Butir	
			Ujicoba	Valid
1	Penerimaan terhadap tujuan dan guna sejarah	4-5-6-7-8-11 17-21-32	9	9
2	Partisipasi dalam mengembangkan tujuan dan guna sejarah	18-24-27-29 31-33-39-40	8	6
3	Penghargaan terhadap tujuan dan guna sejarah	12-20-23-35 36-37	6	5

4	Pengorganisasian nilai-nilai tujuan dan guna sejarah	2-10-14-15 19-22-34	7	6
5	Kecenderungan bertingkah laku seperti yang ada dalam tujuan dan guna sejarah	3-9-13-16 25-26-28-30-38	10	10
Total Butir			40	36

Keterangan:

... Menunjukkan butir yang dinyatidakan tidak valid berdasarkan hasil ujicoba

Tabel 3.2:

Kisi-kisi Instrumen Pengukuran Variabel Pendidikan Sejarah

Hasil uji validitas instrumen yang dilakukan terhadap 25 responden menunjukkan dari 40 butir pernyataan yang diujicobakan terdapat 4 butir pernyataan yang tidak valid. Dengan demikian variabel pendidikan sejarah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 36 butir pernyataan. Berdasarkan ketentuan pemberian skor yang dikemukakan di atas, secara teoretis rentang skor variabel pendidikan sejarah akan bervariasi antara skor minimal 36 sampai dengan skor maksimal 180. Hasil perhitungan koefisien reliabilitas diperoleh angka 0,928 yang menunjukkan instrumen reliabel

sehingga dapat digunakan sebagai pengumpul data.

2. Instrumen Pengukuran Lingkungan Keluarga

Variabel lingkungan keluarga diukur menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner. Data variabel lingkungan keluarga diperoleh dengan menjumlahkan skor dari setiap butir pernyataan yang diajukan. Skor butir ditetapkan sesuai dengan jenis pernyataan dan pilihan responden terhadap lima alternatif respon jawaban yang telah disediakan. Untuk jenis pernyataan positif; jawaban “Sangat Setuju (SS)” mendapat skor 5, “Setuju (S)” mendapat skor 4, “Ragu-ragu (RR)” mendapat skor 3, dan “Tidak Setuju (TS)” mendapat skor 2, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 1. Untuk jenis pernyataan negatif; jawaban “Sangat Setuju (SS)” mendapat skor 1, “Setuju (S)” mendapat skor 2, “Ragu-ragu (RR)” mendapat skor 3, dan “Tidak Setuju (TS)” mendapat skor 4, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 5.

Pada tahap ujicoba instrumen, kuesioner variabel lingkungan keluarga terdiri dari 40 butir soal. Butir-butir soal yang diajukan untuk mengukur variabel tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi yang ditunjukkan pada tabel 3.3.

No.	Indikator	Nomor Butir	Jml. Butir
-----	-----------	-------------	------------

	Ujicoba	Valid

1	Pola pembinaan keluarga	5-6-8-12-13 14-15-19-22 26-31-32-33 36	14	9
2	Hubungan orang tua dan anak	1-2-3-9-10 16-18-20-21 23-25-29-30 35	14	13
3	Hubungan antar anggota keluarga	4-7-11-17-24 27-28-34-37 38-39-40	12	12
Total Butir			40	35

Keterangan:

... Menunjukkan butir yang dinyatakan tidak valid berdasarkan hasil ujicoba

Tabel 3.3

Kisi-kisi Instrumen Pengukuran Variabel Lingkungan Keluarga

Hasil uji validitas instrumen yang dilakukan terhadap 25 responden menunjukkan dari 40 butir pernyataan yang diujicobakan terdapat 5 butir pernyataan yang tidak valid. Dengan demikian variabel lingkungan keluarga dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 35 butir pernyataan. Berdasarkan ketentuan pemberian skor yang dikemukakan di atas, secara teoretis rentang skor variabel lingkungan keluarga akan bervariasi antara skor minimal 35 sampai dengan skor maksimal 175. Hasil perhitungan koefisien

reliabilitas diperoleh angka 0,928 yang menunjukkan instrumen reliabel sehingga dapat digunakan sebagai pengumpul data.

3. Instrumen Pengukuran Sikap Nasionalisme Mahasiswa

Variabel sikap nasionalisme mahasiswa diukur menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner. Data variabel sikap nasionalisme mahasiswa diperoleh dengan menjumlahkan skor dari setiap butir pernyataan yang diajukan. Skor butir ditetapkan sesuai dengan jenis pernyataan dan pilihan responden terhadap lima alternatif respon jawaban yang telah disediakan. Untuk jenis pernyataan positif; jawaban “Sangat Setuju (SS)” mendapat skor 5, “Setuju (S)” mendapat skor 4, “Ragu-ragu (RR)” mendapat skor 3, dan “Tidak Setuju (TS)” mendapat skor 2, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 1. Untuk jenis pernyataan negatif; jawaban “Sangat Setuju (SS)” mendapat skor 1, “Setuju (S)” mendapat skor 2, “Ragu-ragu (RR)” mendapat skor 3, dan “Tidak Setuju (TS)” mendapat skor 4, dan “Sangat Tidak Setuju (STS)” mendapat skor 5.

Pada tahap ujicoba instrumen, kuesioner variabel sikap nasionalisme mahasiswa terdiri dari 40 butir soal. Butir-butir soal yang diajukan untuk mengukur sikap nasionalisme mahasiswa tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi yang ditunjukkan pada tabel 3.4 halaman

berikut.

No.	Indikator	Nomor Butir	Jml. Butir	
			Ujicoba	Valid
1	Memelihara kelangsungan hidup bangsa	4-8-9-12-13 16-18-22-25 27-30-37	12	12
2	Mengembangkan potensi bangsa	3-5-6-7-10 15-19-21-24 29-31-33 35-36-38	15	13
3	Mencegah hal-hal yang membahayakan eksistensi bangsa	1-2-11-14 17-20-23-26 28-32-34 39-40	13	12
Total Butir			40	37

Keterangan:

... Menunjukkan butir yang dinyatidakan tidak valid berdasarkan hasil ujicoba

Tabel 3.4: Kisi-kisi Instrumen Pengukuran Variabel Sikap Nasionalisme Mahasiswa

Hasil uji validitas instrumen yang dilakukan terhadap 25 responden menunjukkan dari 40 butir pernyataan yang diujicobakan terdapat 3 butir pernyataan yang tidak valid. Dengan demikian variabel sikap nasionalisme mahasiswa dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 37 butir pernyataan. Berdasarkan ketentuan pemberian skor yang dikemukakan di atas,

secara teoretis rentang skor variabel sikap nasionalisme mahasiswa akan bervariasi antara skor minimal 37 sampai dengan skor maksimal 185. Hasil perhitungan koefisien reliabilitas diperoleh angka 0,928 yang menunjukkan instrumen sikap nasionalisme mahasiswa reliabel sehingga dapat digunakan sebagai pengumpul data.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Analisis statistik inferensial untuk pengujian hipotesis tentang hubungan antar variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi. Teknik korelasi yang digunakan adalah Korelasi *Phi* (θ) karena data yang akan dikorelasikan berbentuk nominal. (Winarsunu, 2006:74). Untuk menyelesaikan perhitungan dengan menggunakan korelasi phi diperlukan tabel kontingensi (tabel 2x2) seperti pada tabel berikut.

Variabel		Y		Total
		1	2	
X	1	a	b	(a+b)
	2	c	d	(c+d)
Total		(a+c)	(b+d)	N

Tabel 3.5 : Tabel Kontingensi (Sudjana, 1996:100)

Data yang ada dalam tabel kontingensi dimasukkan ke dalam rumus korelasi phi untuk diketahui koefisien korelasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi phi adalah:

Hasil analisis korelasi phi dilakukan konversi ke nilai *chi-kuadrat* (χ^2) untuk mengetahui taraf signifikansi. Rumus nilai *chi-kuadrat* adalah :

$$\chi^2 = \theta^2 \times N \text{ (Winarsunu, 2006:75)}$$

Dimana : θ = nilai korelasi phi

N = jumlah sampel

Untuk mengetahui taraf signifikansi nilai *chi-kuadrat* hitung

diperlukan nilai *chi-kuadrat* tabel yang sudah tersedia pada tabel nilai *chi-kuadrat*. Sebelumnya harus ditemukan lebih dulu derajat kebebasan (db) dari distribusi yang teliti, yaitu dengan menggunakan rumus:

$$db = (k - 1) \times (b - 1)$$

di mana: db = derajat kebebasan

k = jumlah kolom

b = jumlah baris

Setelah nilai *chi-kuadrat* didapat (taraf signifikansi 5%) maka dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai *chi-kuadrat* yaitu:

- Jika $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ maka H_0 ditolak
- Jika $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$ maka H_0 diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pembahasan hasil penelitian berikut ini akan mengungkapkan hubungan antara tiga variabel penelitian yaitu: (1) Pendidikan Sejarah yang ditetapkan sebagai variabel bebas X_1 ; (2) Lingkungan Keluarga yang ditetapkan sebagai variabel bebas X_2 , dan (3) Sikap Nasionalisme yang ditetapkan sebagai variabel terikat Y . Hubungan antara ketiga tersebut dijelaskan dengan melakukan analisis korelasi terhadap data yang diperoleh melalui survei terhadap mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta. Pembahasannya diawali dengan mendeskripsikan profil Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta dilanjutkan dengan pengujian hipotesis untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

A. DESKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA JAKARTA

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta (U HAMKA) dahulunya adalah IKIP Muhammadiyah Jakarta. Alasan berganti nama berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud N0. 138/DIKTI/Kep/1997,

tanggal 30 Mei 1997 dikarenakan keinginan untuk mengembangkan diri menjadi salah satu lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dan telah berbuat banyak dalam memberikan kontribusi tenaga kependidikan dalam pembangunan bangsa sehingga sejalan dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, IKIP Muhammadiyah Jakarta perlu melakukan upaya pengembangan yang tidak hanya dalam bidang kependidikan, tetapi juga dalam bidang non-kependidikan yang selaras dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan pada masa ini dan masa mendatang. Kampus U Hamka berada di 4 (empat) lokasi yaitu Kampus Limau, Kampus Pasar Rebo, Kampus Klender dan Kampus Matraman.

Fakultas dan jurusan yang dibina di lingkungan U HAMKA saat ini berjumlah 9 (sembilan) fakultas yaitu

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (terdiri dari 4 Jurusan dan 14 Program Studi).
2. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (5 Jurusan)
3. Fakultas Matematika dan IPA (3 Jurusan)
4. Fakultas Teknik (3 Jurusan)
5. Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan (3 Jurusan)
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1 Jurusan)
7. Fakultas Agama Islam (2 Jurusan)
8. Fakultas Psikologi (1 Jurusan)

9. Program Pascasarjana (6 Jurusan)

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah merupakan program studi yang ada dalam lingkup Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP U HAMKA. Pada saat penelitian dilaksmahasiswaan, mahasiswa yang terdaftar tersebar dalam 4 angkatan, mulai dari Angkatan 2001 sampai dengan Angkatan 2004. Dengan mempertimbangkan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, populasi yang menjadi jangkauan penelitian ini adalah: mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta mulai dari Angkatan 2001 sampai Angkatan 2004 sebanyak 70 orang yang ditetapkan sebagai kerangka sampel.

B. PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian yaitu:

1. Hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan sikap Nasionalisme mahasiswa.
2. Hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan sikap Nasionalisme mahasiswa.

Pengujian hipotesis untuk menjelaskan hubungan tersebut dilakukan dengan menerapkan teknik analisis korelasi *Phi* dilanjutkan dengan

menggunakan chi-kuadrat untuk uji signifikansinya.

1. Hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme

Hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme akan dijelaskan melalui pengujian hipotesis statistik yang dinyatakan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme

H_1 : Terdapat hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme

Dari hasil kuesioner di dapat nilai untuk variabel pendidikan sejarah dan variabel sikap nasionalisme. Nilai tersebut di bagi ke dalam dua kategori yaitu tinggi dan rendah. Penentuan nilai tinggi dan nilai rendah dilakukan dengan prosedur:

a. Menentukan nilai minimum

Nilai minimum untuk pendidikan sejarah adalah 138

Nilai minimum untuk sikap nasionalisme adalah 132

b. Menentukan nilai maksimum

Nilai maksimum untuk pendidikan sejarah adalah 169

Nilai maksimum untuk sikap nasionalisme adalah 170

c. Menentukan nilai rata-rata

Nilai rata-rata untuk pendidikan sejarah adalah 153,5

Nilai rata-rata untuk sikap nasionalisme adalah 151

Setelah prosedur di atas dilakukan maka pengkategorian nilai masing-masing variabel adalah:

Variabel	Kategori	Rendah	Tinggi
Pendidikan Sejarah (X_1)		138 - 153	154 - 159
Sikap Nasionalisme (Y)		132 - 151	152 - 170

Tabel 4.1
Pengkategorian Nilai Pendidikan Sejarah dan
Nilai Sikap Nasionalisme

Untuk memudahkan perhitungan menggunakan SPSS 16 maka kategori rendah diberi nilai 1 dan kategori tinggi diberi nilai 2. Dengan demikian didapatkan hasil sebagai berikut:

No Responden	Y	Kategori i	X1	Kategori
1	147	1	145	1
2	140	1	140	1
3	161	2	169	2
4	151	1	151	1
5	159	2	160	2
6	166	2	161	2
7	144	1	152	1
8	140	1	156	2

9	152	2	151	1
10	156	2	169	2
11	150	1	153	1
12	132	1	146	1
13	136	1	152	1
14	144	1	141	1
15	163	2	151	1
No Responde n	Y	Kategor i	X1	Kategori
16	157	2	153	1
17	142	1	159	2
18	150	1	152	1
19	164	2	165	2
20	149	1	167	2
21	148	1	145	1
22	151	1	157	2
23	158	2	151	1
24	146	1	144	1
25	151	1	162	2
26	155	2	163	2
27	154	2	160	2
28	142	1	143	1
29	161	2	163	2
30	140	1	141	1
31	133	1	147	1
32	161	2	156	2
33	143	1	162	2
34	141	1	160	2
35	135	1	139	1
36	139	1	143	1
37	140	1	146	1
38	168	2	168	2
39	147	1	152	1
40	147	1	147	1
41	156	2	165	2
42	140	1	157	2
43	166	2	168	2
44	144	1	163	2
45	148	1	157	2

46	149	1	156	2
47	150	1	153	1
48	153	2	156	2
49	158	2	165	2
50	153	2	167	2
No Responden	Y	Kategori	X1	Kategori
51	170	2	162	2
52	147	1	148	1
53	165	2	159	2
54	145	1	169	2
55	149	1	145	1
56	150	1	160	2
57	154	2	154	2
58	152	2	160	2
59	149	1	143	1
60	145	1	138	1
61	146	1	141	1
62	147	1	164	2
63	148	1	158	2
64	151	1	151	1
65	159	2	160	2
66	168	2	161	2
67	144	1	152	1
68	140	1	156	2
69	152	2	151	1
70	156	2	169	2

Keterangan : 1 = Rendah; 2 = Tinggi

Y = Sikap Nasionalisme; X₁ = Pendidikan Sejarah

Tabel 4.2
Hasil Pengkategorian Nilai Pendidikan Sejarah dan Sikap Nasionalisme

Dari perhitungan SPSS 16 didapat data sebagai berikut:

Variabel		Sikap Nasionalisme (Y)		Total
		1	2	
Pendidikan Sejarah (X ₁)	1	27	5	32
	2	16	22	38
Total		43	27	70

Keterangan : 1 = Rendah; 2 = Tinggi

Tabel 4.3
Tabel Kontingensi antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme

Pengukuran Koefisien Korelasi Phi			
		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.433	.000
	Cramer's V	.433	.000
N of Valid Cases		70	

Tabel 4.4
Hasil Pengukuran Koefisien Korelasi Phi Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme (Menggunakan SPSS 16)

Hasil analisis korelasi phi (tabel 4.4) sebesar 0,433 tersebut, dikonversi ke nilai chi-kuadrat (χ^2) untuk dapat menguji taraf signifikansinya. Rumus nilai chi-kuadrat adalah :

$$\chi^2 = \theta^2 \times N \text{ (Winarsunu, 2006:75)}$$

Dimana : θ = nilai korelasi phi

N = jumlah sampel

Berdasarkan rumus di atas didapat nilai chi-kuadratnya

$$\chi^2 = (0.433)^2 \times 70 = 13.124.$$

Pada tabel kontingensi (tabel 4.3) ada 2 kolom dan juga 2 baris sehingga berdasarkan rumus untuk mencari derajat kebebasan (db) = $(k-1)(b-1)$ didapatkan db = $(2-1)(2-1) = 1$. Pada tabel chi-kuadrat, apabila db = 1, maka pada taraf signifikansi 5% akan menunjukkan angka 3,841. Berdasarkan hasil ini maka dapat dilihat bahwa nilai chi-kuadrat hitung sebesar 13,124 lebih besar dari pada nilai chi-kuadrat tabel, yaitu 3,841 sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan sejarah dengan sikap nasionalisme mahasiswa dilihat dari tinggi rendahnya nilai masing-masing variabel

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan sikap nasionalisme mahasiswa adalah dengan cara memperbaiki pengorganisasian proses belajar dalam upaya pemerolehan pengetahuan dan pembentukan sikap yang dapat diwujudkan dalam kepribadian dan tingkah laku peserta belajar (mahasiswa) dalam menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah untuk membentuk sikap positif terhadap kesetiaan yang harus diberikan pada negara dan bangsa.

2. Hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme

Pengujian hipotesis yang kedua dilakukan untuk menguji hubungan antara lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme. Hasil uji hipotesis akan dijelaskan melalui pengujian hipotesis statistik yang dinyatakan sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme

H_1 : Terdapat hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme

Dari hasil kuesioner di dapat nilai untuk variabel lingkungan keluarga dan variabel sikap nasionalisme. Nilai tersebut di bagi ke

dalam dua kategori yaitu tinggi dan rendah. Penentuan nilai tinggi dan nilai rendah dilakukan dengan prosedur:

a. Menentukan nilai minimum

Nilai minimum untuk lingkungan keluarga adalah 117

Nilai minimum untuk sikap nasionalisme adalah 132

b. Menentukan nilai maksimum

Nilai maksimum untuk lingkungan keluarga adalah 155

Nilai maksimum untuk sikap nasionalisme adalah 170

c. Menentukan nilai rata-rata

Nilai rata-rata untuk lingkungan keluarga adalah 136

Nilai rata-rata untuk sikap nasionalisme adalah 151

Setelah prosedur di atas dilakukan maka pengkategorian nilai masing-masing variabel adalah:

Variabel	Kategori	Rendah	Tinggi
Lingkungan Keluarga (X_2)		117 - 136	137 - 155
Sikap Nasionalisme (Y)		132 - 151	152 - 170

Tabel 4.5
Pengkategorian Nilai Lingkungan Keluarga dan
Nilai Sikap Nasionalisme

Untuk memudahkan perhitungan menggunakan SPSS 16 maka

kategori rendah diberi nilai 1 dan kategori tinggi diberi nilai 2. Dengan

demikian didapatkan hasil sebagai berikut:

No Responden	Y	Kategori	X2	Kategori
1	147	1	130	1
2	140	1	131	1
3	161	2	141	2
4	151	1	128	1
5	159	2	120	1
6	166	2	141	2
7	144	1	136	1
No Responden	Y	Kategori	X2	Kategori
8	140	1	137	2
9	152	2	131	1
10	156	2	151	2
11	150	1	138	2
12	132	1	134	1
13	136	1	125	1
14	144	1	134	1
15	163	2	153	2
16	157	2	137	2
17	142	1	129	1
18	150	1	138	2
19	164	2	150	2
20	149	1	137	2
21	148	1	136	1
22	151	1	142	2
23	158	2	140	2
24	146	1	135	1
25	151	1	137	2
26	155	2	129	1
27	154	2	146	2
28	142	1	131	1
29	161	2	150	2
30	140	1	144	2
31	133	1	117	1

32	161	2	141	2
33	143	1	138	2
34	141	1	122	1
35	135	1	123	1
36	139	1	124	1
37	140	1	130	1
38	168	2	143	2
39	147	1	150	2
40	147	1	146	2
41	156	2	131	1
42	140	1	118	1
43	166	2	150	2
No Responde n	Y	Kategor i	X2	Kategori
44	144	1	126	1
45	148	1	120	1
46	149	1	129	1
47	150	1	134	1
48	153	2	131	1
49	158	2	149	2
50	153	2	147	2
51	170	2	155	2
52	147	1	127	1
53	165	2	145	2
54	145	1	154	2
55	149	1	132	1
56	150	1	135	1
57	154	2	139	2
58	152	2	139	2
59	149	1	139	2
60	145	1	121	1
61	146	1	119	1
62	147	1	150	2
63	148	1	139	2
64	151	1	133	1
65	159	2	127	1
66	168	2	141	2
67	144	1	136	1
68	140	1	137	2

69	152	2	131	1
70	156	2	152	2

Keterangan : 1 = Rendah; 2 = Tinggi

Y = Sikap Nasionalisme; X₂ = Lingkungan Keluarga

Tabel 4.6
Hasil Pengkategorian Nilai Lingkungan Keluarga dan Sikap Nasionalisme

Dari perhitungan SPSS 16 didapat data sebagai berikut:

Variabel		Sikap Nasionalisme (Y)		Total
		1	2	
Lingkungan Keluarga (X ₂)	1	28	7	35
	2	15	20	35
Total		43	27	70

Keterangan : 1 = Rendah; 2 = Tinggi

Tabel 4.7
Tabel Kontingensi antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme

Pengukuran Koefisien Korelasi Phi			
		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.382	.001
	Cramer's V	.382	.001
N of Valid Cases		70	

Tabel 4.8
Hasil Pengukuran Koefisien Korelasi Phi Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme (Menggunakan SPSS 16)

Hasil analisis korelasi phi sebesar 0,382 tersebut, dikonversi ke nilai chi-kuadrat (χ^2) untuk dapat menguji taraf signifikansinya. Rumus nilai chi-kuadrat adalah :

$$\chi^2 = \theta^2 \times N \text{ (Winarsunu, 2006:75)}$$

Dimana : θ = nilai korelasi phi

N = jumlah sampel

Berdasarkan rumus di atas didapat nilai chi-kuadratnya

$$\chi^2 = (0.382)^2 \times 70 = 10.215$$

Pada tabel kontingensi di atas ada 2 kolom dan juga 2 baris sehingga berdasarkan rumus untuk mencari derajat kebebasan (db) = $(k-1)(b-1)$ didapatkan db = $(2-1)(2-1) = 1$. Pada tabel chi-kuadrat, apabila db = 1, maka pada taraf signifikansi 5% akan menunjukkan angka 3,841. Berdasarkan hasil ini maka dapat dilihat bahwa nilai chi-kuadrat hitung sebesar 10.215 lebih besar dari pada nilai chi-kuadrat

tabel, yaitu 3,841 sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan sikap nasionalisme mahasiswa dilihat dari tinggi rendahnya nilai masing-masing variabel.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan sikap nasionalisme mahasiswa adalah dengan cara memperbaiki semua kondisi dalam kehidupan yang terbentuk oleh adanya interaksi antara mahasiswa dengan orang tua yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan pertumbuhan seseorang (mahasiswa) untuk membentuk sikap positif terhadap kesetiaan yang harus diberikan pada negara dan bangsa.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme.

Hasil penelitian yang melihat hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dalam pengertian pendidikan sejarah yang menarik akan membentuk sikap nasionalisme. Pendidikan sejarah yang menyenangkan akan mengubah paradigma mahasiswa tentang sejarah itu sendiri.

Model pengajaran yang tepat untuk pendidikan sejarah akan

menambah semangat mahasiswa untuk menggali segala potensi bangsa dan negara sehingga muncul kebanggaan terhadap bangsanya sendiri. Belajar sejarah dapat mengkonsepsikan kehidupan sesuai dengan perjalanan waktu yang terjadi dengan menempatkan diri kita di dalamnya. Menanamkan rasa bangga terhadap pendidikan sejarah bukanlah hal yang mudah, diperlukan berbagai upaya untuk membuat pendidikan sejarah disukai oleh mahasiswa.

Pendidikan sejarah seharusnya tidak hanya sebagai wahana pengembangan kemampuan intelektual dan kebanggaan masa lampau saja (Hasan, 1999:9) tetap justru kejadian pada masa lampau harus dijadikan sebagai guru yang baik untuk memperbaiki kehidupan di masa sekarang. Pendidikan sejarah bukan sekadar nama dan tanggal, tetapi menyangkut penilaian, kepedulian dan kewaspadaan. Dengan pendidikan sejarah kita diperkenalkan kepada hal-hal yang tidak dialami dan lihat sebelumnya, sehingga diperlukan dosen/pengajar yang dapat membantu mahasiswa melihat masa lalu yang tidak pernah kita alami sebagai kulit luar dari persoalan-persoalan penting yang tetap ada hingga saat ini.

Mahasiswa menyadari bahwa sikap nasionalisme mereka berkurang akibat dari ketidaktahuan mereka terhadap sejarah. Sejarah dianggap sesuatu yang membosankan, tidak berarti dan tidak patut untuk disimak. Mahasiswa tahu sejarah hanya karena sifat

seremonialnya saja tanpa menggali lebih dalam "ada apa dibalik kejadian tersebut" sehingga kejadian-kejadian penting yang berkaitan dengan menumbuhkan sikap nasionalisme hanya bersifat "suatu keharusan yang harus dikerjakan tanpa harus tahu makna dari apa yang dilakukan".

Sebenarnya mahasiswa tertarik dengan pendidikan sejarah apabila pendidikan tersebut dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pendidikan sejarah dan tujuan dari pendidikan sejarah. Keberhasilan suatu proses pendidikan sebetulnya sangat tergantung dari mahasiswanya itu sendiri. Mahasiswa yang memasuki program studi pendidikan sejarah pada umumnya dikarenakan oleh faktor ketertarikan terhadap sejarah karena pemilihan jurusan ditentukan sendiri oleh mahasiswanya. Dosen di program studi sejarah merupakan salah satu sumber belajar, namun justru kemampuan dosen mengajarkan sejarah yang mengarah pada pembentukan sikap nasionalisme memegang peranan yang signifikan. Dosen dapat menyertakan materi cinta tanah air pada setiap pokok bahasan di perkuliahan sehingga mahasiswa mendapatkan motivasi untuk berlaku sama. Setelah mahasiswa mendapatkan pengalaman dari dosennya, sebagai tambahan sumber belajar mahasiswa dapat mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan perjuangan para pahlawan, mendiskusikan dengan kawan-

kawan, mencari sumber dari internet, dan menanamkan kedalam dirinya cinta tanah air sehingga muncullah sikap nasionalisme.

Mahasiswa merupakan bagian dari kaum intelektual seperti yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci dalam bukunya *Prison Notebooks* (Said, 1998:1) bahwa "orang dapat mengatakan semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua orang dalam masyarakat memiliki fungsi intelektual". Karier Gramsci sendiri menjadi contoh peran yang digambarkan oleh Edward W. Said (1998) sebagai intelektual dalam arti Gramsci seorang filologis, pengorganisir gerakan kelas-pekerja di Italia dan jurnalis. Gramsci juga merupakan salah seorang pengamat sosial yang paling peduli dan bertujuan untuk membangun pergerakan sosial dan juga segenap formasi budaya yang padu dengan pergerakan sosial yang dilakukannya.

Indonesia mempunyai catatan tersendiri mengenai peran intelektual terhadap munculnya sikap nasionalisme. Gerakan Budi Utomo di Indonesia tahun 1908 merupakan reaksi dari kaum intelektual untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda yang menjajah Bangsa Indonesia dengan cara menyatukan pemikiran yang berorientasi kepada persatuan bangsa, dimulai oleh kaum mahasiswa/kalangan terpelajar yang merupakan *agent of change* di setiap masanya. Meskipun banyak mendapatkan kritik dari sebagian orang bahwa hal ini hanya sebuah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok

elit Jawa, tetapi justru pemikiran kaum intelektual ini merupakan embrio gerakan-gerakan pemuda selanjutnya.

Meskipun muncul berbagai gerakan yang lebih bersifat kesukuan, seperti Boedi Oetomo, *Jong Java*, *Jong Sumatera* dan *Jong Celebes*, akan tetapi pada akhirnya dapat dipersatukan oleh berbagai gerakan atau organisasi lainnya yang lebih bersifat integratif karena merangkul berbagai gerakan kesukuan antara lain Gerakan Pribumi, Perhimpunan Indonesia, dan puncaknya saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Perhimpunan Indonesia (PI) dikatakan sebagai suatu bentuk gerakan yang lebih bersifat integratif dan nasionalis karena memiliki berbagai fikiran pokok yang lebih mengarah pada "Ideologi Nasionalis", antara lain (Kartodirdjo, 1972): (1) *Kesatuan Nasional*: perlunya mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dan perbedaan berdasarkan daerah dan perlu dibentuk suatu kesatuan aksi melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu; (2) *Solidaritas*: tanpa melihat perbedaan yang ada antara sesama orang Indonesia, maka perlu disadari adanya pertentangan kepentingan yang mendasar antara penjajah dan yang dijajah, dan kaum nasionalis haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dengan kulit sawo matang; (3) *Non-Kooperatif*: keharusan untuk menyadari bahwa kemerdekaan bukan hadiah sukarela dari Belanda, akan tetapi harus direbut oleh bangsa Indonesia

dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dan oleh karena itu tidak perlu mengindahkan dewan perwakilan kolonial seperti *Volksraad*; (4) *Swadaya*: dengan mengandalkan kekuatan sendiri perlu dikembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi dan hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial.

Dari keempat bentuk ideologi nasionalis dari organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) seperti di atas, menunjukkan pada kita, dan menjadi suatu bukti nyata bagaimana ideologi itu muncul sebagai suatu bentuk reaksi terhadap kolonialisme Belanda. Bahkan ideologi tersebut dianggap sebagai suatu manifestasi dari kesadaran dan rasa nasionalisme yang tinggi. Fenomena di atas menunjukkan bahwa kesadaran akan ketertinggalan dan kungkungan kolonialisme, serta munculnya gerakan-gerakan yang bersifat nasionalisme, umumnya dipelopori oleh para pemuda, terutama para mahasiswa dan kaum terpelajar lainnya (Kartodirdjo, 1972).

Gramsci membagi dua jenis fungsi intelektual dalam masyarakat yaitu *intelektual tradisional* semacam guru, ulama dan para administrator yang secara terus menerus melakukan hal yang sama dari generasi ke generasi. Kedua, disebut sebagai intelektual organik, yaitu kalangan yang berhubungan langsung dengan kelas atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan mereka untuk berbagai

kepentingan, serta untuk memperbesar kekuasaan dan kontrol seperti pengusaha kapitalis yang menciptakan di sekelilingnya teknisi industri, spesialis ekonomi, penggagas kultur baru, pencetus sistem hukum baru dan sebagainya. Gramsci yakin bahwa intelektual organik aktif dalam masyarakat, yakni mereka senantiasa berupaya mengubah pikiran dan memperluas pasar. Tidak seperti intelektual tradisional yang melakukan pekerjaan yang sama dari tahun ke tahun, intelektual organik selalu aktif bergerak dan berbuat (Said, 1998:2).

Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa tentu saja diajarkan oleh intelektual tradisional yang menghasilkan intelektual yang berpura-pura bahwa mereka adalah sesuatu yang lebih tinggi, nilai pamungkas, moralitas bermula dengan aktivitas mereka dalam dunia sekuler kita, dimana ia berlangsung, kepentingan siapa yang dilayani, bagaimana ia cocok dengan etika yang konsisten dan universal, bagaimana ia membedakan antara kekuasaan dan keadilan, apa yang ia ungkap sehubungan dengan pilihan dan prioritas seseorang sehingga menghasilkan intelektual yang harus berpikiran sama dengan pemimpin atau pengajarnya (Said, 1998:93).

Menurut Said (1998:93-94), seorang intelektual harus mampu menjaga ruangan dalam pikiran yang terbuka untuk keraguan dan kewaspadaan. Mahasiswa harus mempunyai keyakinan dalam pengambilan keputusan dengan cara bekerja dan bekerja sama dengan

para intelektual lainnya. Moralitas dan prinsip-prinsip seorang intelektual janganlah terdiri atas kotak persneling tertutup yang mengendalikan pikiran dan tindakan dalam satu arah dan didayai oleh sebuah mesin dengan sumber bahan bakar tunggal. Intelektual harus mengitari, harus punya ruang untuk berdiri dan berkata balik kepada otoritas, karena kepatuhan mati kepada otoritas dalam dunia sekarang merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan intelektual yang aktif dan bermoral.

Memang sulit menghadapi ancaman terhadap diri sendiri dan bahkan lebih sulit menemukan jalan untuk menjadi konsisten dengan keyakinan sendiri dan pada waktu yang sama tetap bebas bertumbuh, mengganti pikiran, menumbuhkan hal baru atau menemukan kembali apa yang pernah dikesampingkan. Aspek tersulit untuk menjadi intelektual adalah merepresentasikan karya dan intervensi sendiri tanpa dibekukan ke dalam sebuah institusi atau sejenis tindak mekanis menurut perintah sebuah sistem atau metode. Seseorang yang merasakan keriangannya dari sebuah sukses dari sana dan juga berhasil mempertahankan kewaspadaan dan kesolidan serta akan menghargai bagaimana jarangnyanya konvergensi itu. Tapi satu-satunya jalan untuk pernah mencapainya adalah tetap mengingatkan diri sendiri bahwa sebagai seorang intelektual, mahasiswa adalah satu-satunya yang dapat memilih antara menyampaikan secara aktif kebenaran dengan

semampunya dan secara pasif mengizinkan seorang patron atau otoritas untuk tetap mengarahkan kita (Said, 1998:94)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendidikan sejarah memiliki hubungan dengan sikap nasionalisme, hal itu menunjukkan besarnya peran pendidikan sejarah terhadap pembentukan sikap nasionalisme di kalangan mahasiswa. Sejarah memang telah merekam peristiwa-peristiwa yang mampu melahirkan emosi, sikap, nilai, cita-cita yang memberikan hidup bermakna lewat sebuah perjuangan hidup yang membutuhkan pengorbanan diri bahkan bertaruh dengan nyawa. Sejarah juga dapat memunculkan segala kesetiaan seseorang kepada negara, agama maupun kelompoknya sendiri. Kesetiaan tersebut muncul karena adanya kebersamaan, perasaan memiliki, rasa cinta dan rasa bangga terhadap apa yang dimiliki secara kolektif dengan yang lainnya, walaupun secara kasat mata peristiwa yang terjadi tidak dijalani bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama tetapi tetap terbentuk satu komunitas yang dapat merasakan peristiwa tersebut sehingga muncullah yang disebut dengan *Imagined Community* (Anderson, 1999).

Jika kita memperhatikan nilai guna sejarah (Sjamsuddin, 1996:17) maka agar kita mampu memahami diri kita sendiri diperlukan peranan keluarga sebagai wahana pendidikan yang pertama bagi mahasiswa. Penelitian menunjukkan jika kita mengontrol faktor lingkungan keluarga

maka kontribusi pendidikan sejarah terhadap sikap nasionalisme juga akan semakin besar.

Membandingkan hasil penelitian dengan apa yang diungkapkan oleh Banks (1990: 282) mengenai: *"Many educators and lawmakers believe that history should be taught in the public schools because it contributes to the development of patriotism and democratic attitudes"*, dapat diyakini bahwa pendidikan sejarah memberikan kontribusi untuk membangun sikap patriotisme, apalagi untuk mahasiswa jurusan pendidikan sejarah yang memang memiliki minat untuk mempelajarinya. Tentu saja keyakinan tersebut akan semakin tertanam apabila pengajaran sejarah dibuat semenarik mungkin dengan mengedepankan aspek-aspek sikap nasionalisme dalam setiap pokok bahasannya. Sehingga pendidikan sejarah dapat menjadi media untuk pembentukan sikap nasionalisme.

2. Hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme.

Lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan kepribadian mahasiswa. Khususnya lingkungan keluarga. Kedua orang tua adalah pemain peran ini. Peran lingkungan dalam mewujudkan kepribadian seseorang, baik lingkungan pra kelahiran maupun

lingkungan pasca kelahiran adalah masalah yang tidak dapat dipungkiri khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan kepribadian mahasiswa sejak dini. Dengan kata lain kepribadian mahasiswa tergantung pada pemikiran dan perlakuan kedua orang tua dan lingkungannya.

Pola asuh yang dianut oleh masing-masing keluarga, memberikan pengaruh yang berbeda terhadap mahasiswa-mahasiswanya terutama dalam bersikap dan berperilaku. Sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh mahasiswa di lingkungan masyarakat, sangat tergantung pada bagaimana orang tua mendidik mahasiswa tersebut di lingkungan keluarganya. Sikap dan perilaku mahasiswa akan menjadikan penyempurna mata rantai interaksi anggota keluarga dan pada saat yang sama interaksi ini akan membentuk kepribadiannya secara bertahap dan memberikan arah serta menguatkan perilaku mahasiswa pada kondisi-kondisi yang sama dalam kehidupan.

Jika mahasiswa itu lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang otoriter maka apa-apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut bukan berdasarkan keinginan sendiri melainkan karena tunduk dan patuh yang disertai oleh rasa takut akibat sikap keras yang ditunjukkan oleh orang tua. Akibatnya bagi mahasiswa adalah mahasiswa tersebut akan menganggap bahwa sikap yang diajarkan

tersebut benar dan dibawa terus oleh dirinya pada saat berpartisipasi di masyarakat walaupun ternyata pada akhirnya bertentangan dengan pola pikir yang dianut oleh masyarakat. Sementara itu jika mahasiswa dibesarkan dalam keluarga demokratis kecenderungan yang terjadi adalah mahasiswa akan diberi kebebasan untuk memilih apa yang disukai dan boleh menolak apa-apa yang tidak disukai dengan segala konsekuensinya. Hanya saja kadang kala, sikap demokratis juga tidak selamanya benar karena justru kalau terlalu demokratis yang akan terjadi akhirnya adalah kebebasan yang *kebablasan*.

Penggabungan pola didik mahasiswa dalam keluarga dapat dilakukan dengan mengambil beberapa konsep otoriter yang memang menguntungkan bagi mahasiswa dan juga mengambil konsep demokratis yang dapat mendukung pertumbuhan mahasiswa. Sikap otoriter tetap diperlukan untuk penanaman nilai-nilai yang memang mau tidak mau mahasiswa harus menerima seperti menunjukkan rasa bangga terhadap tanah air dengan merasa bangga pada budaya, kesenian, adat istiadat, kekurangan, kelebihan dari negaranya sehingga mahasiswa akan merasa bangga juga. Sementara sikap demokratis diperlukan untuk membimbing mahasiswa agar tidak menjadi orang yang egois dan individualistik terhadap suatu pandangan yang berbeda dari dirinya.

Sikap nasionalisme dapat ditanamkan di lingkungan keluarga.

Keluarga adalah lingkungan pertama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa dalam bersikap. Jika orang tua selalu menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dengan cara menceritakan bagaimana pahlawan berjuang, riwayat hidup dari pahlawan tersebut dan implikasi kisah terhadap kehidupan pada masa ini, maka dalam benak mahasiswa akan tertanam suatu keyakinan bahwa negara ini terbentuk dari perjuangan yang luar biasa yang disertai dengan pengorbanan materi maupun non materi. Sehingga mahasiswa akan merasa bangga dengan sejarah bangsanya lewat kepahlawanan-kepahlawanan yang diceritakan oleh orang tua.

Selain itu juga penanaman sikap nasionalisme dapat dilakukan dengan memperingati hari besar nasional seperti hari Kartini, hari pahlawan, hari kemerdekaan Indonesia dan hari besar nasional lainnya. Peringatan hari besar tersebut dengan melibatkan mahasiswa ke dalam peristiwa tersebut, bukan hanya memakai baju daerah atau kebaya saja tetapi juga memberi wawasan kebangsaan tentang pendidikan yang diperlukan oleh kaum perempuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Selain itu, konsep-konsep yang diterangkan oleh orang tua konteksnya harus dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan. Kebaya misalnya menunjukkan keterbatasan kaum perempuan dalam bergerak, karung mungkin

menunjukkan sulitnya untuk mendapatkan baju berbahan katun, panjat pinang menunjukkan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga selain mahasiswa merasa senang dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, mereka juga mendapatkan gambaran betapa susahny meraih kemerdekaan sehingga akan muncul empati dan perasaan bangga terhadap para pahlawannya yang pada akhirnya memberikan kesadaran pada mahasiswa untuk selalu bersyukur dan mengisi hari-hari setelah kemerdekaan dengan hal yang berguna.

D. KETERKAITAN PENDIDIKAN SEJARAH, LINGKUNGAN KELUARGA DAN SIKAP NASIONALISME

Proses pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara individu yang ada dalam masyarakat. Interaksi pendidikan merupakan proses yang saling mempengaruhi baik disengaja ataupun kegiatan meniru individu lainnya. Interaksi saling mempengaruhi peranan pendidik (orang tua, guru dan masyarakat individu dewasa) itu yang paling besar pengaruhnya, karena kedudukannya lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak menguasai nilai-nilai, pengetahuan dan ketrampilan (Nana Syaodih, 2003:3). Peran peserta didik lebih banyak sebagai penerima pengaruh, sebagai pengikut, oleh karena ini disebutnya sebagai "peserta didik" atau "terdidik". Berdasarkan pemikiran tersebut maka proses pendidikan yang terkait dengan nilai-nilai, mendidik berarti "memberikan,

menanamkan, menumbuhkan” nilai-nilai pada masyarakat yang lebih muda.

Tujuan pendidikan pada hakekatnya adalah perubahan perilaku. Perilaku (*behaviour*) merupakan segala manifestasi kehidupan setiap kegiatan individu, yaitu semua ciri-ciri yang menyatakan bahwa individu itu hidup. Perilaku ini bukan hanya mencakup hal-hal yang dapat diamati tetapi juga hal-hal yang tersembunyi atau sikap. Konsep pendidikan yang berhubungan dengan menanamkan nilai, menumbuhkan perkembangan sikap dan nilai-nilai keyakinan itu merupakan fondasi dari kepribadian individu tersebut. Pendidikan sikap dan perilaku dalam keluarga maupun di sekolah merupakan bagian penanaman ideologi atau keyakinan tentang konsep-konsep yang dibawanya. Keluarga dan sekolah merupakan wahana pembelajaran yang paling efektif untuk membentuk karakter pribadi individual.

Bagi mahasiswa, pendidikan sejarah merupakan upaya memperoleh pengetahuan yang bermakna tentang perjalanan dan perjuangan bangsanya dimasa lampau. Di samping menuntut kedewasaan belajar sejarah juga membantu mengembangkan kedewasaan. Individu menjadi dewasa karena belajar sehingga pengetahuan, sikap dan ketrampilannya berkembang. Karena membantu kedewasaan subjek didik maka pendidikan sejarah tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang kesejarahan (kognitif) melainkan juga mengenalkan pengalaman-pengalaman hidup manusia, perjalanan, dan perjuangan bangsanya pada masa lampau (afektif) yang berguna bagi masa kini.

Penghayatan sejarah secara mendalam akan mempercepat

pembentukan kepribadian bangsa. Setelah mendapatkan pendidikan sejarah sikap mahasiswa diharapkan positif terhadap nasionalisme. Karena pendidikan sejarah merupakan pendidikan nilai yang memanfaatkan peristiwa sejarah maka sikap mahasiswa akan selalu berhubungan dengan nasionalisme. Tentu saja dalam menyampaikan nilai dan manfaat peristiwa sejarah kepada mahasiswa tidaklah mudah. Dibutuhkan dosen yang mampu menggambarkan secara jelas peristiwa sejarah sehingga mahasiswa betul-betul mempunyai gambaran dari peristiwa sejarah tersebut.

Gambaran yang dimiliki oleh mahasiswa akan terbayang dalam benak mahasiswa sehingga mahasiswa betul-betul menghayati dan mampu merefleksikan peristiwa sejarah yang didengarkan ke dalam kehidupan pada masa sekarang. Dilihat dari skor yang responden dapatkan ternyata jumlah kelompok yang memperoleh skor di bawah rata-rata jumlahnya sama dengan mahasiswa yang skornya berada di atas rata-rata. Hal ini dapat berarti bahwa bagi mahasiswa pendidikan sejarah akan menarik apabila penyampaiannya dilakukan secara menarik pula.

Pendidikan sejarah agar menarik dan menyenangkan dapat dilaksanakan mahasiswa dengan berbagai cara antara lain dengan mengajak mahasiswa pada peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar mahasiswa. Di lingkungan tempat tinggal sekitar mahasiswa

terdapat berbagai peristiwa sejarah yang dapat membantu dosen untuk membantu pemahaman mahasiswa tentang masa lalu. Demikian juga mahasiswa akan lebih tertarik terhadap pendidikan sejarah karena berhubungan dengan situasi nyata di sekitarnya, selain itu mahasiswa dapat menggambarkan suatu peristiwa masa lalu seperti dalam perkuliahan sejarah.

Kondisi nyata di sekitar mahasiswa dapat digunakan oleh dosen sebagai cara untuk menggambarkan suatu peristiwa sejarah. Seperti diketahui bahwa setiap daerah di Indonesia mengalami perjalanan waktu dan perubahan dari sejak jaman pra-sejarah hingga jaman sekarang. Banyak daerah menyimpan berbagai peninggalan sejarah sebagai bukti otentik terjadinya peristiwa sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah di setiap daerah di Indonesia mempunyai benang merah; dalam artian saling berkaitan sehingga dalam konteks holistik akan membentuk substansi sejarah yang saling melengkapi, yang akan membawa mahasiswa pada lingkup yang lebih luas, misalnya kepada pemahaman sejarah yang maksimal.

Peristiwa sejarah di sekitar mahasiswa diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami bentuk-bentuk peristiwa masa lalu dan terjadinya suatu peristiwa masa lalu, selain itu mahasiswa mampu menggambarkan suatu peristiwa sejarah. Penggunaan peristiwa sejarah di sekitar mahasiswa dapat juga digunakan sebagai

contoh untuk menerangkan suatu konsep-konsep kesejarahan, misalnya konsep tentang kepahlawanan, penjajahan, perjuangan, perlawanan, kolonialisme. Penggunaan peristiwa sejarah dari lingkup sekitar mahasiswa atau lokal bergerak ke lingkup daerah lain dan nasional bahkan internasional dikenal dengan proses induktif. Saat ini masih terbuka ruang-ruang yang perlu dikemukakan untuk melengkapi sejarah nasional Indonesia. Sejarah Indonesia masih lebih banyak membahas bagian barat saja, malahan didominasi sejarah tentang Jawa.

Berpijak dari hasil penelitian, lingkungan keluarga mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap nasionalisme. Hal ini sesuai dengan kajian teoretis bahwa sikap nasionalisme mahasiswa erat kaitannya dengan lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor dalam pembentukan sikap nasionalisme, hal ini dapat dimengerti sebab interaksi yang terjadi antar anggota keluarga merupakan hubungan antar anggota keluarga dengan lingkungan tempat individu itu berinteraksi.

Lingkungan keluarga sebagai suatu ekosistem yang dinamis dan adaptif dengan lingkungan yang membentuk kerjasama. Lingkungan keluarga juga disebut sebagai suatu unit korporasi yang di dalamnya terdapat hubungan saling bergantung. Seorang anggota keluarga seringkali tidak memiliki fungsi tanpa dukungan yang lain. Hubungan

saling mendukung inilah yang membentuk sikap nasionalisme.

Dalam kajian teoretis tentang perkembangan sosioemosional mahasiswa yang disebut dengan dengan teori Ekologi *Bronfenbrenner* memfokuskan pada konteks sosial di mana mahasiswa tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mahasiswa (Santrock, 2007:84-85; Sarwono, 2005:75). Teori ekologi ini terdiri dari lima sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas yang terdiri dari *mikrosistem*, *mesosistem*, *ekosistem*, *makrosistem* dan *kronosistem*. Berdasarkan teori Ekologi *Bronfenbrenner* peneliti mencoba menggambarkan hubungan antara lingkungan keluarga dan pendidikan di sekolah/ kampus serta pengaruhnya terhadap sikap nasionalisme.

Pada tingkatan yang terkecil (mikrosistem) menunjukkan individu baik itu laki-laki ataupun perempuan, berbagai tingkatan usia, kondisi kesehatan yang ada dalam lingkaran mikrosistem. Individu menghabiskan banyak waktu dalam lingkaran mikrosistem, di dalamnya ada pengaruh dari lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, area bermain di lingkungan sekitar, kelompok-kelompok keagamaan dan pelayanan masyarakat lainnya seperti kesehatan. Sikap nasionalisme akan terbentuk pada lingkaran makrosistem yang dipengaruhi oleh sebuah mesosistem dan ekosistem.

Teori Bronfenbrenner memberikan kerangka teoretis untuk

mengkaji konteks sosial secara sistematis baik itu di tingkat mikro maupun makro. Teori ini menjembatani *gap* antara teori *behavioral* yang berfokus pada setting kecil dan teori antropologi yang menganalisis *setting* yang lebih luas. Teorinya memicu perhatian orang pada arti penting kehidupan mahasiswa dalam setting yang lebih dari satu. Dalam penelitian ini *setting* yang dilihat pada diri mahasiswa adalah lingkungan keluarga dan pendidikan sejarah yang diharapkan dapat membentuk sikap nasionalisme. Di lingkungan sekolah/kampus dosen perlu mempertimbangkan bukan hanya apa yang terjadi di dalam kelas tetapi juga apa yang terjadi dalam keluarga, lingkungan dan kelompok temannya. Sebaliknya pada lingkungan keluarga, orang tua juga perlu mempertimbangkan apa yang didapat oleh mahasiswa di kampus maupun lingkungan luar rumah sehingga sikap nasionalisme tidak hanya terbentuk dari salah satu faktor mikrosistem saja melainkan dari beberapa unsur yang ada dalam lingkaran mikrosistem.

Berkaitan dengan teori tersebut maka dosen dapat mengajarkan sejarah kepada mahasiswa dengan cara (Santrock, 2007:86):

1. memandang mahasiswa sebagai sosok yang terlibat dalam berbagai sistem lingkungan dan dipengaruhi oleh sistem-sistem tersebut. Lingkungan itu antara lain sekolah dan guru, orang tua dan saudara kandung, komunitas dan tetangga, teman dan rekan sebaya, media, agama dan kultur.

2. memperhatikan hubungan antara sekolah dan keluarga dengan menjalin hubungan melalui saluran formal dan informal
3. menyadari pentingnya komunitas, status sosioekonomi dan kultur dalam perkembangan mahasiswa. Konteks sosial yang luas ini dapat sangat memengaruhi perkembangan mahasiswa.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

1. KESIMPULAN

Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian , setelah peneliti memaparkan beberapa kondisi pada lingkungan keluarga dan proses pendidikan sejarah, serta dari beberapa temuan yang diperoleh selama penelitian ini dilaksanakan. Kesimpulan pada dasarnya merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dipaparkan pada bab I. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Hubungan antara Pendidikan Sejarah dengan Sikap Nasionalisme.

Di dalam konteks pendidikan nasional, amat dibutuhkan kesadaran untuk membangkitkan warga negara yang penuh dedikasi terhadap bangsa dan negara. Agar pelajaran sejarah mempunyai dampak afektif yang tinggi kiranya cukup relevan dengan mempelajari biografi orang-orang besar yang secara konkret menggambarkan *role-model* tentang semangat pengabdian hidupnya yang sering berakhir dengan pengorbanan jiwa.

Dengan pendidikan sejarah diharapkan akan timbul kesadaran sejarah yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengenal dirinya dalam hidup bersama di komunitas yang lebih besar, sehingga menumbuhkan kesadaran kolektif dalam memiliki kebersamaan dalam

sejarah, kebersamaan dalam memiliki riwayat masa lampau. Proses pengenalan diri yang meningkat menjadi kesadaran kolektif ini merupakan titik awal timbulnya rasa harga diri, rasa bangga (*sense of pride*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa dan tanah air.

Mempelajari sejarah bukan sekedar menghafal nama tokoh-tokoh, rentetan angka tahun, peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi dimaksudkan agar mahasiswa didik mengerti betul-betul apa yang dipelajari. Selanjutnya untuk dijadikan cermin bagi tindakan di masa sekarang, karena dengan bercermin pada masa lampau tentang keadaan sekarang, diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Pengalaman-pengalaman dalam sejarah bukan hanya diketahui saja, tetapi dapat dipakai sebagai pelajaran untuk memperbaiki usaha-usaha pada masa mendatang.

Sejarah merupakan memori pengalaman manusia, karena melalui sejarah pengalaman-pengalaman manusia dapat dilukiskan kembali. Mengingat berarti berusaha untuk mengetahui lagi pengalaman-pengalaman masa lampau. Sebab itu mempelajari sejarah dapat menentukan kadar atau harkat kemanusiaan. Tanpa memahami sejarah tidak akan memiliki pengetahuan mengenai perilaku manusia, karena melalui dan dari belajar sejarah akhirnya masyarakat dapat menyadari dan mengetahui bahwa harkat, martabat, dan identitas sebagai manusia dibentuk dan disempurnakan melalui dan oleh

sejarah, manusia memanfaatkan dirinya melalui sejarah. Pendidikan sejarah mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan sejarah sebagai bagian dari pendidikan nasional dituntut harus mampu menumbuhkan jiwa patriotik dan sikap nasionalisme. Pendidikan sejarah yang sesuai akan membentuk sikap mahasiswa yang positif dengan tujuan pendidikan sejarah.

Definisi nasionalisme yang hingga kini tetap digunakan dalam pendidikan di sekolah-sekolah, dalam teks-teks dan monografi : *“Nationalism is a state of mind, in which the supreme loyalty of individual is felt to be due to the nation state.”* Artinya nasionalisme adalah suatu paham, yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (*nation state*). Dalam definisi tersebut terkandung makna perjuangan nasionalisme untuk melepaskan diri dari aneka bentuk ikatan dan dominasi kekuasaan sosial dan politik lama seperti etnik, raja feodal, negara kota, kerajaan dinasti, untuk kemudian menyerahkan kesetiaan tertingginya (*supreme loyalty*) kepada negara kebangsaan (*nation state*) yang lebih menjamin rasa aman, keselamatan dan kesejahteraan.

Orientasi nilai-nilai sebagai ajaran moral semakin perlu pada jaman modern ini,. hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan-perubahan itu terjadi di bawah hantaman

kekuatan yang mengenai semua sendi-sendi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi dan globalisasi. Tidak ada dimensi kehidupan yang tidak terkena oleh perubahan tersebut. Rasionalisme, individualisme, nasionalisme, sekularisme, materialisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, pluralisme, serta sistem pendidikan modern, secara bersama-sama telah mengubah lingkungan sosial-budaya dan rohani di tanah air.

Nasionalisme bukanlah nasionalisme sempit yang membela bangsa apapun alasannya, tidak sekedar mengabdikan pada sebarang negara politis semata-mata, tapi lebih pada bangsanya, nasib warga di dalamnya. Dengan demikian kemanusiaan adalah panutannya, dan ketuhanan adalah dasarnya. Nasionalisme tidak mati, dia hidup di hati rakyat Indonesia, termasuk pemudanya. Ada baiknya simak pernyataan "Sumpah mahasiswa" di era 1980-an ini yang mengukuhkan "Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran."

Tiga poin pokok yang muncul (tanpa penindasan, keadilan, dan kebenaran) adalah diskursus nasionalisme masa kini yang menghadirkan kembali seruan kritis para pendahulu bangsa. Adalah betul bahwa para pemuda generasi sekarang tidak mengalami masa penjajahan dan revolusi, tapi adalah naif bila dikatakan bahwa mereka tidak dapat berempati atas pengalaman itu dan tercerabut dari nasionalisme. Dulu adalah dulu dan sekarang adalah sekarang. Tapi

pengalaman nasionalisme dulu pun hadir di masa sekarang meski berbeda dalam wujud dan strukturnya. Perjuangan atas cita-cita nasionalisme belumlah berhenti, tapi disambut oleh generasi sekarang untuk meneruskannya. Nasionalisme dipahami oleh banyak orang sebagai pisau bermata dua, disatu sisi merupakan hal positif yang patut dimiliki oleh seseorang tentang negaranya, disisi lain merupakan hal negatif yang dibenci oleh orang lain yang merasakan akibat buruk dibalik rasa nasionalisme yang berlebihan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sangat diperlukan upaya penanaman sikap nasionalisme dalam era globalisasi sekarang ini. Mahasiswa merupakan generasi yang paling labil dan mudah mendapatkan pengaruh baik maupun pengaruh buruk. Berdasarkan hasil penelitian ternyata banyak mahasiswa yang tidak sadar dengan wawasan kebangsaan. Padahal mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan, apalagi pada era reformasi dimana sering terdengar demonstrasi dimana-mana yang dipimpin oleh mahasiswa menimbulkan anggapan bahwa mahasiswa dapat diharapkan sebagai wakil dari mahasiswa lainnya yang dapat mencintai bangsanya.

Pendidikan sejarah, walaupun dirasa *kering* namun ternyata banyak di antara mahasiswa yang tertarik dengan apa yang dikandung dalam sejarah. Mereka sangat antusias pada saat mendapatkan cerita-cerita kepahlawanan atau pada saat dosen dengan penuh semangat menceritakan sebuah peristiwa sejarah, dengan demikian

memungkinkan tumbuhnya kesadaran dan sikap positif mahasiswa dalam dimensi kehidupan sehari-hari.

2. Hubungan antara Lingkungan Keluarga dengan Sikap Nasionalisme.

Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama yang dikenal mahasiswa memiliki peran yang sangat menentukan dalam membantu perkembangan kepribadiannya. Berbagai aliran dalam dunia psikologi mengakui hal itu. Aliran psikoanalisis misalnya sangat menekankan dan percaya akan pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan kepribadian mahasiswa. Bahkan dinyatakan bahwa pola kepribadian mahasiswa sudah terbentuk dalam usia yang masih sangat muda, yaitu antara 0 sampai 5 tahun. Lingkungan keluarga yang sehat, biasanya akan melahirkan anak-anak yang berkepribadian sehat pula. Sebaliknya lingkungan keluarga yang tidak sehat akan melahirkan anak-anak yang memiliki kepribadian yang tidak sehat pula.

Keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, di samping agama, yang secara resmi telah berkembang di semua masyarakat. Istilah "struktur sosial" dalam ilmu antropologi seringkali dipergunakan dalam pengertian struktur keluarga dan kekeluargaan. Sebaliknya, ada yang membantah dalam masyarakat tertentu sistem hukum tidak ada karena memang tidak ada suatu badan atau hukum resmi. Memang kemungkinan untuk mengabstraksikan aspek hukum, ekonomi dan

dinamika politik tingkah laku dapat dilakukan, meskipun tidak ada badan yang secara resmi menangani bidang-bidang ini dalam masyarakat itu. Tetapi kedudukan pribadi dalam keluarga dan tanggung jawabnya merupakan perhatian baik secara resmi maupun tidak pada masyarakat dengan tingkat teknologi tinggi maupun rendah.

Namun pada saat ini peranan keluarga terutama di kota-kota mulai berubah. Ibu yang bekerja dan pengasuhan anak yang diserahkan pada orang lain membuat anak menjadi orang lain. Orang tua tidak lagi menjadi panutan dirumah karena sering tidak bertemu dengan anak-anaknya yang berdampak pada berkurangnya rasa hormat anak pada orang tua. Dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 30 Januari-1 Februari 2008 yang dilakukan melalui telepon kepada 880 responden berusia 17+ yang dipilih acak dari Buku Petunjuk Telepon Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado dan Jayapura dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa akibat individualisme di perkotaan menyebabkan pola kekerabatan merenggang. Akibatnya, sikap pada orang tua pun sedikit demi sedikit berubah. Dari total responden sebanyak 51,9% warga Jakarta menyebutkan bahwa penghormatan kepada orang tua masih kuat, hanya selisih sedikit dengan yang menjawab sudah lemah yaitu sebesar 46,5% dan tidak menjawab sebesar 1,6%. Sementara di luar

Jakarta penghormatan kepada orang tua masih kuat sebesar 55,1 %, sudah lemah 42,5% dan tidak menjawab 2,4%.

Hasil tersebut diakibatkan oleh semakin jaranginya frekuensi pertemuan antara orang tua dengan anaknya atau walaupun sering bertemu tetapi tidak terjadi komunikasi yang efektif. Hal ini berimbas pada penanaman nilai-nilai positif yang membangun sikap anak terhadap suatu pandangan. Akibat lemahnya pendidikan dalam lingkungan keluarga mengakibatkan mahasiswa tidak mempunyai teladan apalagi untuk penanaman nilai-nilai untuk menumbuhkan sikap nasionalisme.

Penelitian ini melihat pola hubungan dalam keluarga dilihat dari cara orang tua mendidik mahasiswa. Ada beberapa pola asuhan yang dapat digunakan orang tua dalam membina, membimbing dan mendidik anak-anaknya. Pola asuhan orang tua atas 3 pola, yaitu pola otoriter, permissive, dan demokratis. Pola otoriter dan permisif, sebagai pola asuhan yang jelek (*bad-parent*), dan pola demokrasi dipandang sebagai pola yang baik (*good parent*). Demikian juga ada yang membedakan menjadi tiga yaitu otoriter, bebas, dan demokrasi.

Pola asuh yang otoriter akan terjadi komunikasi satu dimensi atau satu arah. Orang tua menentukan aturan-aturan dan mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap perilaku anak yang boleh dan tidak boleh dilaksanakannya. Anak harus tunduk dan patuh terhadap orang tuanya, anak tidak mempunyai pilihan lain. Orang tua memerintah dan

memaksa tanpa kompromi. Anak melakukan perintah orang tua karena takut, bukan karena suatu kesadaran bahwa apa yang dikerjakannya itu akan bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Orang tua memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan anak, keinginan anak, keadaan khusus yang melekat pada individu anak yang berbeda-beda antara anak yang satu dengan yang lain. Perintah yang diberikan berorientasi pada sikap keras orang tua, sikap keras merupakan suatu keharusan bagi orang tua. Sebab tanpa sikap keras ini anak tidak akan melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam keluarga yang bersifat otoriter perkembangan anak ditentukan oleh orang tuanya. Sifat pribadi anak yang otoriter biasanya suka menyendiri, mengalami kemunduran kematangan, ragu-ragu di dalam semua tindakan serta lambat berinisiatif.

Pola asuh bebas, berorientasi bahwa anak itu makhluk hidup yang berpribadi bebas. Anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat menurut hati nuraninya. Seorang anak yang lapar, ia harus memasukkan nasi ke dalam mulutnya sendiri, mengunyah sendiri dan menelan sendiri. Tidak mungkin orang tua yang mengunyah dan memasukkan makanan ke dalam perut anaknya. Orang tua membiarkan anaknya mencari dan menemukan sendiri apa yang diperlukan untuk hidupnya. Anak telah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggap baik. Orang tua sering mempercayakan anaknya kepada orang lain, sebab orang tua terlalu

sibuk dalam pekerjaan, organisasi sosial dan sebagainya. Orang tua hanya bertindak sebagai polisi yang mengawasi permainan menegur dan mungkin memarahi. Orang tua kurang bergaul dengan anak-anaknya, hubungan tidak akrab dan anak harus tahu sendiri tugas apa yang harus dikerjakan.

Jika diperhatikan dua pola asuh tersebut di atas dapat mengetahui bahwa pola otoriter memandang anak sebagai objek saja. Anak dipandang sebagai keranjang sampah yang dapat diisi sesuka orang tua. Pada anak tidak ada pilihan lain, kecuali mengikuti perintah orang tua. Pada pola yang kedua anak dipandang sebagai subjek yang diperbolehkan berbuat menurut pilihannya sendiri. Segala tugas diserahkan sepenuhnya pada anak. Dua pola ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Pola asuh otoriter memang memungkinkan terlaksananya proses transformasi nilai dapat berjalan lancar. Akan tetapi anak mengerjakan tugas dengan rasa tertekan dan takut. Akibatnya jika orang tua tidak ada mereka akan berbuat yang lain. Dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Pola asuh bebas memang memandang anak sebagai subjek, anak bebas menentukan pilihannya sendiri. Akan tetapi anak menjadi berbuat semau-maunya; ia berbuat dengan mempergunakan ukuran diri sendiri. Padahal anak berada dalam dunia anak dan dia harus masuk pada dunia nilai dari dunia anak. Oleh karena itu anak akan kebingungan ibarat anak ayam yang ditinggalkan induknya.

Akhirnya anak akan lari ke sana ke mari tanpa arah. Idealnya anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri dan diberi dorongan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa kebangsaan yaitu dengan mengikuti berbagai lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional. Dengan demikian sedikit-sedikit akan timbul kecintaan pada bangsa dan negaranya.

Pola asuh yang ketiga adalah pola asuh demokratis yang berpijak pada dua kenyataan bahwa anak adalah subjek yang bebas dan anak sebagai makhluk yang masih lemah dan butuh bantuan untuk mengembangkan diri. Manusia sebagai subjek harus dipandang sebagai pribadi. Anak sebagai pribadi yang masih perlu mempribadikan dirinya, dan terbuka untuk dipribadikan. Proses pembribadian anak akan berjalan dengan lancar jika “cinta kasih” selalu tersirat dan tersurat dalam proses itu. Dalam suasana yang diliputi oleh rasa cinta kasih ini akan menimbulkan pertemuan sahabat karib, dalam pertemuan dua saudara. Dalam pertemuan itu dua pribadi bersatu padu. Dalam pertemuan yang bersatu padu akan timbul suasana keterbukaan. Dalam suasana yang demikian ini maka akan terjadi pertumbuhan dan pengembangan bakat-bakat anak yang dimiliki oleh anak dengan subur.

Demikian juga dengan penggunaan identitas pribadi seperti nama, bahasa, budaya akan menanamkan dan memunculkan kesadaran jati diri. Hal ini penting untuk proses penanaman semangat/jiwa

nasionalisme dalam keluarga yang akhirnya diharapkan akan berkembang. Anak akan bangga menunjukkan identitas dirinya dimana pun berada sebagai anak bangsa Indonesia. Karena menganggap bahasa dan budaya yang dimiliki sama dan sederajat dengan bangsa lain.

Mahasiswa yang hidup dalam keluarga demokratis, hubungan orang tua dengan mahasiswa terbuka. Ada sesuatu masalah dibicarakan bersama, dipecahkan bersama pula. Sikap mahasiswa lebih menyesuaikan diri, fleksibel, dapat menguasai diri, mau menghargai pekerjaan orang lain, menerima kritik dengan terbuka, aktif dalam hidupnya, emosi lebih stabil dan mempunyai tanggung jawab. *Children brought up by democratic method, make better social adjustment outside the home and have more favorable attitude toward people.*

Di dalam kehidupan nyata sehari-hari sebenarnya pengasuhan yang digunakan orang tua sifatnya multidimensional. Yaitu mengkombinasikan ketiga pola tersebut. Meskipun multidimensional sifatnya, namun orang tua akan memperlihatkan cara-cara yang dominan dalam mengasuh anak-anaknya.

Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa sikap nasionalisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika mahasiswa diasuh dengan pola asuh yang dikombinasikan dengan keteladan dan contoh dari orang tua tentang bagaimana bersikap

sebagai seorang warga negara yang mampu mencintai tanah airnya karena tidak sedikit orang tua pada jaman globalisasi ini yang tidak tahu dan tidak merasa bangga dengan negara dan bangsanya.

2. IMPLIKASI

Bertolak dari kesimpulan-kesimpulan penelitian, maka implikasi penelitian yang diajukan ini mengisyaratkan bahwa sikap nasionalisme mahasiswa dapat tumbuh dan berkembang apabila materi sejarah yang diberikan dalam pembelajaran di kampus dapat menarik perhatian mahasiswa, mengingat selama ini ada anggapan bahwa pendidikan sejarah 'kering'. Peran penting dosen sebagai pemegang kebijakan dalam menentukan pembelajaran di dalam kelas, tidak dapat diabaikan, karena itu dosen mutlak harus memiliki wawasan yang luas dan mengetahui berbagai metode dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan aktifitas dan kreatifitas mahasiswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar dalam sejarah. Dosen dituntut harus memahami keinginan mahasiswa dalam belajar tetapi tidak melepas begitu saja. Dosen tetap bertanggung jawab sepenuhnya dalam proses belajar mengajar.

Oleh karena itu, proses pendidikan sejarah sudah seharusnya diarahkan pada penekanan proses yang dilakukan selama pembelajaran, bukan hanya dilihat dari hasil akhir sehingga mahasiswa tidak lagi menganggap bahwa mata kuliah sejarah merupakan

pelajaran yang membosankan tetapi justru dalam prosesnya siswa diajak untuk menyenangi mata kuliah sejarah. Dengan mementingkan proses siswa dibiasakan dan dilatih untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan sejarah.

Sikap nasionalisme dapat bertumbuh dan berkembang juga dengan pendidikan di lingkungan keluarga. Orang tua yang mengajarkan cinta tanah air dengan cara memperkenalkan keagungan dan keindahan alam Indonesia misalnya, akan membuat mahasiswa merasa bangga dengan tanah airnya. Lain halnya jika orang tua selalu berorientasi pada produk luar negeri, selalu bangga dengan pendidikan, barang dan kemajuan yang dicapai oleh bangsa lain, akan membuat mahasiswa tidak mengenal tanah airnya sendiri. Tentu saja lingkungan keluarga mahasiswa yang belajar sejarah menentukan pula sikap nasionalisme mahasiswa tersebut.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi dalam menumbuhkembangkan sikap nasionalisme yaitu:

1. Dosen sejarah yang memegang posisi strategis dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas mempunyai tanggung jawab untuk terus mengembangkan kemampuan dan kesadaran mahasiswa. Dosen sejarah dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk

memiliki kemampuan menemukan permasalahan, mengajukan hipotesis, menggali informasi, dan menyusun kesimpulan. Pengembangan kemampuan dosen ini sejalan dengan tuntutan dosen sebagai sejarawan pendidik.

2. Untuk orang tua mahasiswa, diperlukan kesadaran untuk memperkenalkan mahasiswanya sejak dini terhadap sikap nasionalisme ini dengan berbagai cara seperti memperkenalkan sejarah kota tempat tinggal, mengunjungi objek-objek wisata yang bersejarah, mencintai produk dalam negeri, dan bangga akan kesenian Indonesia. Selain itu pula orang tua harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi mahasiswa tidak hanya memberikan pemahaman secara teoretis saja.
3. Peneliti menyadari masih banyak indikator dan variabel yang mempengaruhi sikap nasionalisme mahasiswa selain lingkungan keluarga ataupun pendidikan sejarah. Namun, karena keterbatasan keilmuan maka diperlukan penelitian lain untuk menggali pembentukan sikap nasionalisme terutama pada jaman globalisasi sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulgani, Ruslan. *Nasionalisme Asia*. Djakarta: Jajasan Pantjaka. 1964.
- Abdullah, Taufik, *Nasionalisme Dan Sejarah*, Bandung: Satya Historika. 2001
- Abdullah, Taufik. (ed) *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta:LP3ES. 1982.
- Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa. 1984.
- Anderson, Benedict, *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Omi Intan Naomi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Insist. 1999
- Anderson, Michael. *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations*. Cambridge. 1977
- Ary, Donald. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Terjemahan: Sanafiah Faisal. Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty. 1995.
- Bahar, Saafroedin, *Sumbangan Daerah Dalam Proses Nasion-Building dalam Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Ichlasul Amal & Armaidly Armawi (Penyunting). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998
- Baharuddin & Makin. *Pendidikan Humanistik (Konsep, Teori, dan Aplikasi Praksis dalam Dunia Pendidikan)*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media. 2007.
- Banks, J. *Teaching Strategies for the Social Studies*. New York & London:

Longman. 1990.

Barnadib, Imam. *Dasar-Dasar Metode Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta. 1973.

Baswir, Revrison. *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2006.

Berger, Peter L. *Piramida Korban Manusia, Etika Politik dan Perubahan Sosial* (terjemahan). Jakarta: LP3ES. 1982.

Brameld, Theodore. *Philosophies of Education in Cultural Perspectives*, New York: Rinehart and Winston. 1955.

Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia. 1982.

Chadwick, Bruce, A. dkk. *Social Science Research Methods*. Terjemahan: Sulistia dkk. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewoods Cliffs. 1991.

Daldjoeni, N. 1974. *Sosiologi Pemuda Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Tulisan pada buku *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1982.

Diamond, Larry & Plattner, Marc F. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*. Penerbit ITB. Bandung: 1998.

Dissanayake, Wimal (Editor), *Nationalism and Colonialism in Asian Cinema*, Bloomington: Indiana University Press. 1994.

Dewantara, Ki Hadjar. *Buku I: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa. 1962

Djahiri, A. Kosasih. *Buku Ajar I - II - III - IV*, LPPMP UPI. 2001.

Djahiri, A. Kosasih. *Strategi Pengajaran Aktif Nilai Moral VCT Dan Games Dalam VCT*, Bandung Jurusan PMPKn FPIPS IKIP Bandung. 1985.

Djahiri, A. Kosasih. *Dasar Umum Metodologi dan Pengajaran VCT*.

- LPPMP IKIP Bandung. 1998.
- Djahiri, A. Kosasih. *Menelusuri Dunia Afektif*, LPPMP IKIP Bandung. 1999.
- Djahiri, A. Kosasih. *Model Portofolio*, LPPMP UPI. 2000/2001.
- Djahiri, A. Kosasih. *Operasionalisasi Kurikulum PPKn 1994*, LPPMP IKIP Bandung. 1998.
- Djahiri, A. Kosasih. *Kapita Selekta Pembelajaran, Pembaharuan Paradigma PKn, PIPS, PAI*. Lab PMPKn FPIPS Bandung. 2007.
- Dreikurs, Rudolf. *Disiplin Tanpa Hukuman*. Bandung: karya, 1986.
- Erickson, B.H. *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta. Gramedia. 1984.
- Eriksen, Thomas Hylland. *Ethnicity & Nationalism Anthropological Perspectives*. Pluto Press. London. 1993.
- Farizi, Imam. "Pendidikan Sejarah Sebagai Pendidikan Kebangsaan yang Emansipatoris dan Membebaskan". *Historia Magistra Vitae*. Menyambut 70 tahun Prof.Dr.Hj. Rochiati Wiriaatmadja, M.A. Editor. Helius Sjamsuddin & Andi Suwirta. Bandung. Historia Utama Press. Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS. Universitas Pendidikan Indonesia. 2003.
- Freire, Paulo. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. (terjemahan:Agung Prihantoro & Fuad Arif Fudiyartanto). Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2007.
- Fukuyama,Francis. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, penerbit Qalam, Yogyakarta. 2001.
- Garvey, B. & Krug, M. *Models of History Teaching in the Secondary School*. Oxford: Oxford University Press. 1977.
- Gazalba, Sidi. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bratara. 1981.
- Geertz,Clifford. *Politik Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

- Giddens, Anthony *Tumbang Modernitas, Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan*, Penerbit IRCISOD, Yogyakarta. 1999
- Goldthorpe, J.E. *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Bumi Aksara. Jakarta: 2007.
- Goode, William J. "*Family Disorganization*" New York: Harcourt. 1976
- Gordon, Thomas. *Menjadi Orang Tua Efektif*. Jakarta: P.T. Gramedia. 1983.
- Gunarsa, Singgih D. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Mutiara. 1983
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM. 1982.
- Hall, D.G.E., *Sejarah Asia Tenggara*, diterjemakan oleh I.P Soewarsha, Surabaya: Usaha Nasional. 1988.
- Hariyono. *Pembelajaran Sejarah*. IKIP Malang. 1995
- Hasan, Said Hamid. *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta. Proyek Pendidikan Tenaga Akademik. 1996.
- Hill, C.P. *Saran-Saran Tentang Mengajarkan Sejarah*. Terjemahan: Haksan W. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K. 1956.
- Hobsbawm, E.J., *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*, penerjemah: Hartian Silawati, Yogyakarta: Tiara Wacana. 1990
- Hobsbawm, E. J, *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Hartian Silawati (Penerjemah). Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. *Sosiologi* (diterjemahkan oleh Amiruddin Ram dan Tita Sobari). Jakarta: Erlangga. 1996.
- Hurlock, B. Elizabeth. *Personality Development*. New Dehli: Mc.Graw Hill

Publishing Co. Ltd. 1974

- Husken, Frans, *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta:Grafindo. 1998.
- Huntington, Samuel P. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta:2000.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: 2004.
- Ingleson, John, *Jalan Ke Pengasingan*. Zamakhsyari Dhofier (Penerjemah). Jakarta: LP3ES. 1983.
- Kartodirdjo, Sartono. *Multidimensi Pembangunan Bangsa Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius. 1999
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1983.
- Kohn, Hans, *Nationalism Its Meaning and History*, Malabar Florida: Robert E. Krieger Publishing Company. 1965
- Kohn, Hans, *Nasionalisme. Arti dan Sejarah*. Sumantri Mertodipuro (Penerjemah). Jakarta: Erlangga. 1984.
- Kohn, Hans. *Nationalism: Its Meaning and History*. New York: D.Van Nostrand Company. 1965.
- Kuhn, Thomas S, *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Bandung:Rosda. 1989.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Budaya. Yogyakarta: 1999.
- Laurel, H. Robert. (1993). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Loomba, Ania. *Kolonialisme/Pascakolonialisme*. Bentang Budaya. Yogyakarta:1999.
- Lorenz, Edward. *The Essence of Chaos*. London:University College London Press. 1993.
- Mangandaralam, Syahbuddin, *Apa dan Siapa Bung Karno*, Jakarta: Rosda Jayaputra. 1986.
- Mangandaralam, Syahbuddin. *Apa dan Siapa Bung Hatta*, Jakarta: Rosda Jayaputra. 1986
- Mangandaralam, Syahbuddin. *Apa dan Siapa Sjahrir*, Jakarta: Rosda Jayaputra. 1986.
- Mas'ood, Mohtar, *Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini dalam Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional* Ichlasul Amal & Armaidly Armawi (Penyunting). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Mcluhan, D.W. *Understanding Media: The Extensive of Man*, New York: McGraw-Hill. 1964
- Meullen, W.J. Vander. *Ilmu Sejarah dan Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. LKiS. Yogyakarta:2007.
- Moore, Wibert E. *Order and Change; Essay in Comparative Sociology*, New York, John Wiley & Sons. 1967.
- Mursell, James L. *Succesful Teaching*. Terjemahan: IP. Simanjuntak dan Soeitoe. Pengajaran Berhasil. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1975.
- Nasikun, "Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk", dalam *Nasionalisme. Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1996.
- O'Hara, Lucy and Mark O'Hara. *Teaching History 3-11*. London: New york:

Contium. 2001.

Ohmae, Kenichi. *The End of the Nation States: Rise of Regional Economies*. Harper Collins, 1995.

Pai, Young. *Cultural Foundation of Education*. New York: Macmillan Publishing Company. 1990.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. 2007.

Philpott, Simon. *Meruntuhkan Indonesia Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta. LKiS. 2003.

Poole, Ross, *Moralitas dan Modernity Dibawah Bayang-Bayang Nihilisme*, diterjemahkan oleh F.Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius. 1993.

Purwanto, Ngalm. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Karya. 1988.

Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remadja Rosdakarya. 1993,

Renan, Ernest, "*What is A Nation?*" dalam *Nation and Narration*, Diedit oleh Homi Bhabha, London: Routledge. 1990.

Riantiarno, N (editor), *Teguh Karya dan Teater Populer 1968-1993*, Jakarta: Pustaka harapan. 1993.

Said, Edward, W. *Peran Intelektual*, Penerjemah Rin Hindryati P. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.

Santrock, John W. *Psikologi Pendidikan (terjemahan)*. Jakarta: Kencana. 2007

Santoso, Singgih. *Masalah Statistik dengan SPSS versi 11.5*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2004.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Sosial. Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005

- Sears, David. *Social Psychology*. Terjemahan: Michael Adriyanto. Jakarta: Erlangga. 1992.
- Semiawan, Conny. *Memupuk Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah : Petunjuk Bagi Guru dan Orang Tua*. Jakarta: Gramedia.1984
- Shiraishi, Takashi ""Satria" vs "Pandita", *Sebuah Debat dalam Mencari Identitas*", dalam Akira Nakazumi (editor), Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang (Perubahan Sosial-Ekonomi Abad XIX & XX dan Berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta.2000
- Simatupang, Maurits, *Budaya Indonesia yang Supraetnis*, Jakarta: Sinar Sinanti. 2002.
- Singarimbun, Masri. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Depdikbud. Dikti. Jakarta: 1996.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Ombak. Jogjakarta: 2007.
- Sjamsuddin, Helius. *Pegustian dan Temenggung Akar Sosial, Politik, Etnis dan Dinasti. Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 1859-1906*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Skolnick S.Arlene & Skolnick H. Jerome. *Family in Transition: Rethinking Marriage, Sexuality, Child Rearing, and Family Organization Seventh Edition*. New York: HarperCollinsPublishers. 1992.
- Soedijoprpto, Endang. I. *Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. Jakarta:PDIN. 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga:Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta:Rineka Cipta. 2004
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi, Jilid Pertama*, Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi. 1959.

- Suhendi, Hendi. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung: 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Sugiyono. *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya. 2003.
- Sulaiman, Wahid. *Statistik Non-Parametrik: Contoh Kasus dan Pemecahannya dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. 2005.
- Sunal, C.S. & Haas, M. *Social Studies and the elementary/middle school student*. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers. 1993.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius. 1997.
- Swasono, Sri-Edi. *Anak Bangsa Menggugat Nasionalisme, Kemandirian dan Kewirausahaan*. LP3ES. Yogyakarta. 2003.
- Tilly, Charles. *States and Nationalism in Europe 1492-1992*. 1994.
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka. 1990.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Wahyono, Teguh. *Belajar Sendiri SPSS 16 (Cara Mudah dan Praktis Melakukan Analisis Statistik dengan Berbagai Model Analisis)*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2008.
- Widja, I.G. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu: Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang. Satya Wacana. 1988.
- Wineburg, Sam. *Berpikir Historis Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: 2006.

Winkel. (1987). *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta:Media Abadi

Wiriaatmadja, Rochiati. *Pendidikan Sejarah di Indonesia Perspektif Lokal, Nasional dan Global*. Bandung : Historia Utama Press. 2002.

Zanten, Van. *Statistik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Disertasi

Supardan, Dadang. "Pembelajaran Sejarah Berbasis Pendekatan Multikultural dan Perspektif Sejarah Lokal, Nasional, Global, untuk Intergrasi Bangsa (Studi Kuasi Eksperimental terhadap Siswa Sekolah Menengah Umum di Kota Bandung)". *Disertasi* pada Program Studi PIPS Program Pascasarjan UPI Bandung. 2004.

Wiriaatmadja, Rochiati. "Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia Dalam Pembentukan Identitas Nasional (Upaya Peraihan Nilai-nilai Integralistik Dalam Proses Sosialisasi dan Enkulturas Berbangsa di Kalangan Siswa SMAK I BPK Penabur di Bandung)". *Disertasi*. Fakultas Pasca Sarjana. IKIP Bandung. 1992.

Jurnal

Abdullah, Taufik. "Di Sekitar Pengajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif". *Sejarah* No.6 Pebruari 1996. Jakarta: Gramedia. 1996.

Alfian, Teuku, I, "Nasionalisme dalam Perspektif Sejarah" dalam *Jurnal Filsafat Pancasila* No. 2, th. 11 Desember 1998, Yogyakarta:

Gadjah mada Press. 1996

Castles, Lance, "Etnisitas dan Keutuhan Wilayah Negara-Negara: Pandangan Global", *Makalah* Seminar Nasional: Sumbangan Ilmu-Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional, Yogyakarta: UGM. 1994

David, Kingsley & Judith Blake. "Social Structure and Fertility". *Economic Development and Social Change*. 1956

Du Bois, M. "The Governance of the Third World: A Foucauldian Perspective on Power Relation in Development". Dalam *Alternatives*, Vol 16, No. 1 Januari 1991.

Gonggong, Anhar. "Indonesia Baru: Perspektif Politik dan Sejarah", *makalah* untuk Kongres Prodem, Jakarta 13 April 2002.

Hasan, Said Hamid. "Pendidikan Sejarah untuk Membangun Manusia Baru Indonesia". *Mimbar Pendidikan*. Nomor 2, Tahun XVIII. 1999. Bandung: University Press IKIP Bandung. 1999.

Hidayat, Bambang, "Karakter Tak Terlupakan: Soekarno Pemimpi, Penggagas, dan Pelaksana", *Jurnal Historia*, jurnal Pendidikan Sejarah No.7 Vol IV, Juni 2003.

Karim, Rusli. "Arti dan Keberadaan Nasionalisme". *Analisis CSIS*. Tahun XXV. No.2. 1996.

Kartodirdjo, Sartono., "Kesukuan dan Masyarakat Adab (Ethnicity and Civil Society) dalam Regionalisme dan Nasionalisme di Indonesia Pada Abad 19 dan Abad 20". *Lembaran Sedjarah* No. 8. Yogyakarta:UGM Press. 1998.

Kartodirdjo, Sartono, "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Pada Abad 19 dan Abad 20". *Lembaran Sedjarah* No.8. Yogyakarta : Seksi Penelitiin Djurusan Sedjarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. 1972.

Kartodirdjo, Sartono. "Menggali Warisan Leluhur Untuk Memperkokoh Identitas Nasional Fungsi Pembelajaran Sejarah Dalam Pembangunan". *Makalah*. Surakarta: PPS UNS. 1988.

- Nash, June, "Nasionalisme And Fieldwork" dalam *Annual Review Of Anthropology*. Bernard J. Siegel (editor). Volume 4, Tahun 1975, hal: 225-245. 1975.
- Rex, John. "National Identity in the Democratic Multicultural State". *Sociological Research Online* Vol 1 No.2. 1996.
- Sjamsuddin, Helius. "Sejarah dan Pendidikan Sejarah". *Mimbar Pendidikan*. No.2, Tahun XVIII. 1999. Bandung: University Press IKIP Bandung. 1999.
- Suryo, Djoko. "Kesadaran Sejarah Sebuah Tinjauan". *Makalah*. Disampaikan dalam seminar Kesadaran Sejarah di UNS. Surakarta, 5 Mei 1991.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, "Nasionalisme dalam Perspektif Politik", dalam *Jurnal Filsafat Pancasila* No. 2, th. 11 Desember 1998, Yogyakarta: Gadjah mada Press. 1998.
- Wiriaatmadja, Rochiati. "Landasan Filosofis Kurikulum Pembelajaran Sejarah (SMU) Tantangan dan Harapan". *Makalah*. Simposium Pembelajaran Sejarah. Jakarta: Depdikbud. 1998.

Surat Kabar

- Huda, Nurul, "Radikalisme Agama dan Problem Kebangsaan", dalam *Kompas*, Jakarta: 18 November 2002.
- Kaisiepo, Manuel. "Nasionalisme dan Revolusi Indonesia", dalam *Harian Kompas*, 30 Pebruari 1995.
- Koran Tempo* Edisi Khusus. "400 tahun VOC: Peta Rempah-rempah dan Kolonialisme". Selasa, 2 Juli 2002.

Koran Tempo Edisi Khusus. "Mal dan Nasionalisme Sayup-sayup". Kamis, 20 Mei 2002.

Koran Kompas. "Barometer Penghormatan Anak Kepada Orang Tua". Minggu, 17 Februari 2008

Putro, Widodo Dwi. "Nasionalisme Gelombang Keempat". *Kompas*, Rabu, 11 Juni 2003.

Pabotinggi, Mochtar. "Rentang Nasionalisme Kita", dalam *Harian Kompas*, 22 September 1993.

Internet

Aulia A Muhammad (www.suamamerdeka.com, 2004)

Fukuyama, Francis. *After the "end of History"*. http://www.opendemocracy.net/author/Francis_Fukuyama.jsp. 2 Mei 2006.

<http://www.nationalismproject.org/what/renan.htm>

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan

<http://www.tamilnation.org/selfdetermination/nation/renan.htm>

Kartodirdjo, Sartono. *Jangan Gabungkan Sejarah Dengan Pelajaran Lain*. *Kompas* 30 Oktober 2001. Tersedia: <http://www.Kompas.com> (8 Nopember 2001).

Hayati, Emmy Nur. *Peran lingkungan keluarga dalam membentuk kepribadian anak*. <http://salehlapadi.wordpress.com/2007/02/25/peran-lingkungan-keluarga-dalam-membentuk-kepribadian-anak/>. 5 Februari 2007

Ohmae, Kenichi. *Beyond the Nation State*. <http://www.theglobalist.com/DBWeb/StoryId.aspx?StoryId=461>. 13 Juni 2005.

Sihotang, Kasdin. *Pendidikan Karakter Generasi Muda*. <http://>

www.suarapembaruan.com/News/2007/10/27/Editor/edit01.htm.
[2007](#)

Wahid, Hidayat Nur. *Sikap Generasi Penerus Bangsa Mengisi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia*. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=747&Itemid=135. 5
Agustus 2007

RIWAYAT HIDUP

Rudy Gunawan, lahir di Bekasi 6 Juli 1968. Anak ke empat dari 8 bersaudara. Orang tua bernama H. Tasminuddin BA (Alm) dan Hj. Royani (Almh). Lulus Sekolah Dasar Negeri 01 Pulogadung Jakarta 1982. Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 90 Jakarta 1985. Lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 36 Rawamangun Jakarta 1988. Lulus S1 Jurusan Sejarah IKIP Muhammadiyah Jakarta 1992. Lulus S2 Pendidikan Sejarah UNS Surakarta 1996.

Dosen PNS di Kopertis Wilayah III Jakarta dtk Uhamka. Dengan jabatan akademik Lektor Kepala. Di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof.Dr. Hamka Jakarta. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain: Penelitian Kualitatif sebuah Alternatif dipresentasikan di Universitas Bengkulu 1998, Masuk dan Perkembangan Islam di Bali. Laporan penelitian. Program Studi Sejarah FKIP UHAMKA 1999. Inovasi Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran Sejarah di Sekolah dalam Jurnal Visi FKIP UHAMKA 2002, Isu-isu Kontroversial dalam Perspektif Sejarah Kontemporer dalam Jurnal Visi FKIP UHAMKA 2003, Sejarah dan Perkembangan Pelacuran di Indonesia dalam Jurnal TARIKH 2003, Jabatan Akademik bagi Dosen dalam TA'DIB FKIP UHAMKA 2006. Sejarah Australia. Diktat. Prodi Sejarah.FKIP

UHAMKA; Esensi Filsafat Ilmu dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Widya. Maret-April 2008. Kopertis III Jakarta.

Menikah dengan Swastika Rini, S.Pd. guru di SMPN 25 Jakarta. Dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Farhan Ariiq setelah menunggu kehadirannya selama tujuh tahun pernikahan. Alhamdulillah Allah SWT memberikan amanah.

Pada tahun 2000, penulis melanjutkan jenjang pendidikan S-3 di Program Pascasarjana IKIP Bandung Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang sekarang menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung.